



# STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)

## KABUPATEN BARITO TIMUR

Disusun oleh:  
POKJA PPAS  
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN 2022

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkah dan Rahmat-Nya Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Barito Timur dapat diselesaikan oleh Kelompok Kerja Perumahan, Kawasan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (POKJA PPAS) sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk pelaksanaan Implementasi SSK Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Barito Timur adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk menyusun perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam mencapai target layanan daerah maka diperlukan dokumen perencanaan yaitu Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Barito Timur tahun 2022 – 2027. Dalam konteks yang lebih luas, SSK adalah sebuah langkah penting menuju pencapaian target SDG's di tahun 2024.

Target pencapaian layanan sanitasi layak akan diimplementasikan melalui penyusunan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan mengusung Visi sanitasi Kabupaten Barito Timur yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Barito Timur yang bersih sehat, indah dan teduh melalui pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi yang ramah lingkungan”**

Atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam penyusunan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Barito Timur, diucapkan terima kasih dengan harapan semoga dalam penyusunan Dokumen ini bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kabupaten Barito Timur.

Tamiang Layang, Desember 2022

Bupati Barito Timur,

**AMPERA A. Y MEBAS**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)**

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten yang di maksud untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Barito Timur dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Penyusunan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Barito Timur merupakan lanjutan dari rangkaian proses pengembangan strategi sanitasi perkotaan yang terdiri dari lima tahapan yakni pengenalan program dan pembentukan Pokja Sanitasi, penyusunan Buku Putih Sanitasi, penyusunan dokumen SSK, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap penyusunan rencana tindak sanitasi dan pemantauan / monitoring dan evaluasi. Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Barito Timur berisikan tujuan serta strategi-strategi pencapaian yang digunakan. Perumusan strategi tersebut terbagi dalam dua aspek penting yaitu aspek teknis dan non teknis yang mencakup perumusan strategi dan pengembangan strategi sub-sektor sanitasi yang terdiri dari air limbah, persampahan, dan drainase.

Penentuan wilayah cakupan SKK berdasarkan kriteria kepadatan penduduk, angka kemiskinan, jumlah penduduk, daerah urban/rural, daerah/wilayah yang dialiri sungai dan daerah tergenang banjir dan merupakan kawasan peruntukan permukiman perkotaan di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Barito Timur berdasarkan RTRW Kabupaten Barito Timur.

Dalam merumuskan pengembangan pengelolaan sanitasi, pentahapan dibagi ke dalam tahap jangka pendek (1-2 tahun), dan jangka panjang (5 tahun). Pentahapan yang dilakukan untuk mengejar target RPJMN dan SDG's tahun 2024. Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Barito Timur ini disusun

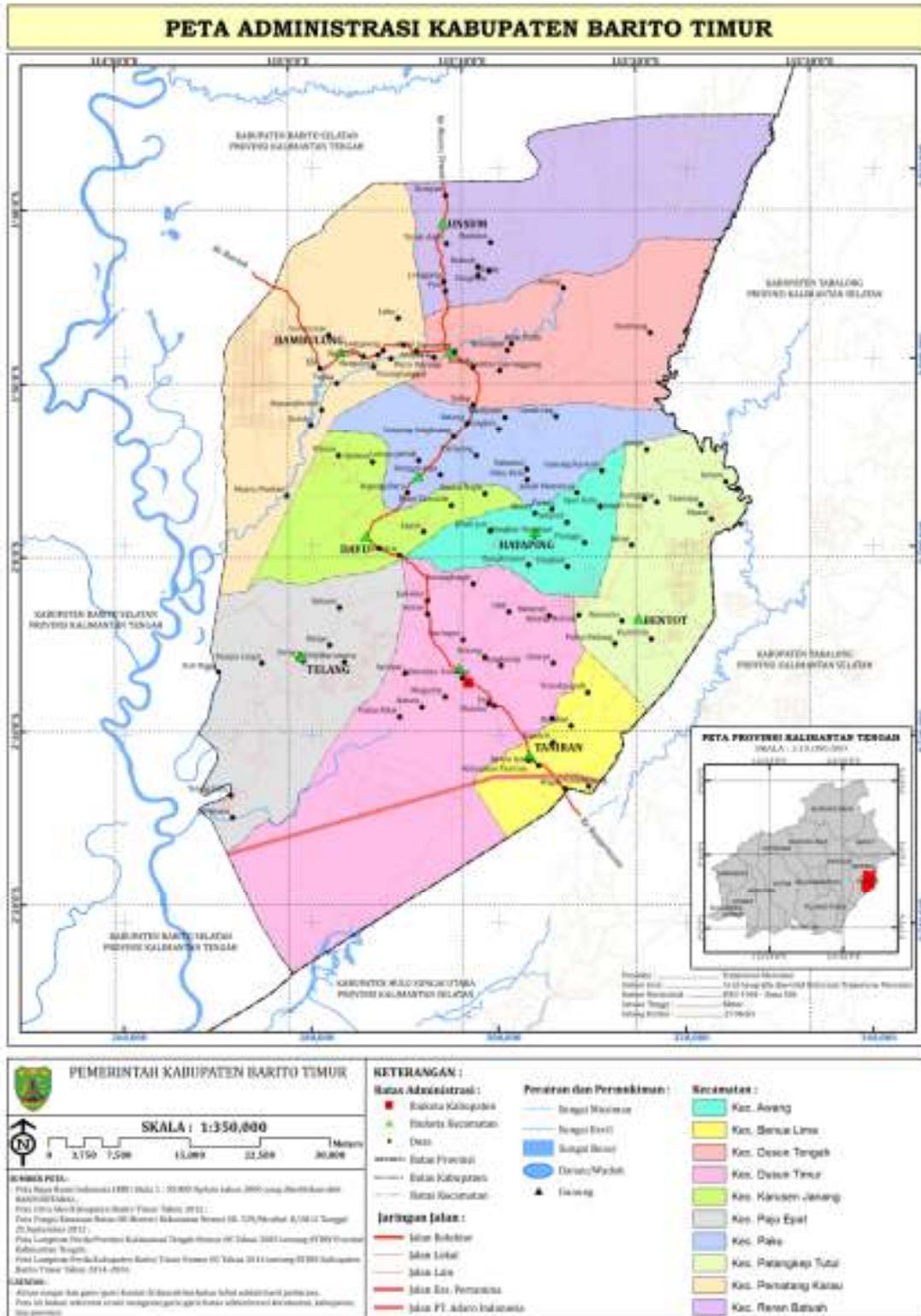
untuk advokasi dan komunikasi secara khusus bagi Kepala Daerah dan Kelompok eksternal kepentingan lainnya (APBN, Baznas, masyarakat, dan lain-lain).

### ***Kondisi Administratif***

Wilayah Kabupaten Barito Timur terletak di bagian paling timur Provinsi Kalimantan Tengah dan berada pada posisi Timur terletak diantara 1°2' Lintang Utara dan 2°5' Lintang Selatan, 114° dan 115° Bujur Timur. Luas wilayah administrasi Kabupaten Barito Timur adalah 3.834 Km<sup>2</sup>. Wilayah kabupaten ini, seluruhnya merupakan wilayah daratan dan tidak memiliki kawasan pesisir dan laut.

Adapun batas-batas wilayah secara administratif, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Kalimantan Tengah), Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan)



***Tabel Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-  
Kecamatan***

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ desa		Luas terbangun (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah rumah tangga		Kepadatan terbangun (Jiwa/Ha)
		Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	BENUA LIMA	7	0	3.096	6.336	0	1.585	0	2,05
2	DUSUN TIMUR	16	1	11.141,36	18.121	10.747	4.536	2.687	2,59
3	PAJU EPAT	9	0	14.883,6	6.270	0	1.571	0	0,42
4	AWANG	11	0	2.436	6.101	0	1.529	0	2,50
5	PATANGKEP	10	0	3.060	7.117	0	1.783	0	2,33
6	DUSUN TENGAH	5	3	7.560,8	6.059	18.399	1.517	4.601	3,23
7	RAREN BATUAH	9	0	2.232	8.551	0	2.142	0	3,83
8	PAKU	12	0	3.264	8.686	0	2.177	0	2,66
9	KARUSEN	7	0	2.136	5.312	0	1.332	0	2,49
10	PEMATANG KARAU	13	0	6.948	13.358	0	3.345	0	1,92
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>56.757,7</b>	<b>85.911</b>	<b>29.146</b>	<b>21.517</b>	<b>7.288</b>	<b>24,03</b>

Sumber : Data BPS Kabupaten Barito Timur 2021

### ***Profil Sanitasi Saat ini***

#### ***Air Limbah Domestik***

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Barito Timur diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Subsistem Pengangkutan SPALD-Setempat**

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	<b>Pemerintah Daerah</b>		
2	Jumlah truk tinja	Unit	0
3	Status aset	Serah terima aset atau pembelian sendiri (UPTD)	
4	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	0
5	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
6	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0
	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0
1	<b>Swasta</b>		
2	Jumlah truk tinja	Unit	0
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	0
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0

Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja	RT/hari	0
--	---------	---

**SPALDS-Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja**

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
	<b>SPALD-S</b>		
1	Nama IPLT	Tidak Ada	
2	Status aset	Belum Proses	
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	0
4	Tahun Pembangunan	0	
5	Tahun Rehabilitasi	0	
6	Wilayah Ckupan Pelayanan	0	
7	Wilayah layanan terdekat	Km	0
8	Wilayah layanan terjauh	Km	0
	<b>Deskripsi IPLT</b>		
1	Sistem yang digunakan	Tidak ada – Tidak Ada – Tidak Ada – Tidak Ada	
2	Kondisi IPLT	Tidak Ada	
3	Kualitas Effluen	1	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses	Belum Memadai (Aspal dan tanah)	

**Tabel sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat**

Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (baik/rusak)	Pengelola (Dinas/UPTD/Masyarakat)	Pengecekan Effluent (dilakukan/tidak dilakukan)	Status Aset
IPAL Pondok Karet	Tamiyang Layang	2017	-	250	200	Anaerobic baffled reactor- bak pengendapan kedua	Baik	Dinas	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset

**FOTO DOKUMENTASI SPALD-T**



**Persampahan**

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Barito Timur diuraikan sebagai berikut:

**Timbulan Sampah**

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	83,88
	Perkotaan	ton/hari	20,74
	Perdesaan	ton/hari	63,15
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% anorganik	80,00
		% anorganik	20,00

**Pengumpulan**

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	0
	Gerobak Motor	unit	1
	Pick Up	unit	0
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	0

	Gerobak Motor	m3	1,5
	Pick Up	m3	0
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	1

### Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	Unit	0
	TPS	Unit	19
	Kontainer	Unit	6
	Tong Sampah Pejalan Kaki	Unit	0
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	0
	TPS	m3	2
	Kontainer	m3	4,5
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	0
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	Unit	0
	Arm roll truck	Unit	2
	Dump Truk	Unit	4
	Pick Up	Unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	0
	Arm roll truck	m3	8
	Dump Truk	m3	16
	Pick Up	m3	0
5	RitasI Pengangkutan	rit/hari	1

### Pengolahan

No	Jenis Pengolahan	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Wilayah Cakupan Layanan	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM / Dinas / UPTD)	Status Aset
1	Tidak ada	Tidak ada	0	Tidak ada	0	0	0	0	0	0	0	0

**Pemrosesan Akhir**

No	Deskripsi	Satuan	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nama dan Lokasi TPA	0	Desa Lenggang Kec Raren Batuah
	Wilayah Pelayanan	0	Kecamatan Dusun Tengah dan Raren Batuah
2	Tahun pembangunan	0	2010
	Tahun Optimalisasi	0	0
	Usia Pakai TPA (tahun)	0	0
3	Status aset (pilih salah satu)	0	
		0	
		0	
4	Luas lahan efektif tersedia	Ha	1,2
5	Luas lahan efektif terpakai	Ha	1,2
6	Sistem TPA yang digunakan	Pilih	Open Dumping
7	Kondisi TPA	Pilih	Beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	0
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	0
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Perkerasan
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	3,82
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya: ....)	Ton/hari	0,3
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	0
14	Listrik	Gwh/hari	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)	0	Tidak Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	Km	3,1

**Sarana Pengumpulan**



Foto 1 : (foto diambil 20 November 2018)



Foto 2 : (foto diambil 20 November 2018)

**Sarana Penampungan Sementara**



Foto 1 : (foto diambil 19 Juli 2021)



Foto 2 : (foto diambil 18 Juli 2021)



Foto 1 : (foto diambil 6 Februari 2022)

**Tempat Pemrosesan Akhir**

	
<p>Keterangan Foto (diambil 06 Februari tahun 2022)</p>	<p>Keterangan Foto (diambil 06 Februari tahun 2022)</p>

**TPS 3R**

	
<p>Keterangan Foto (diambil tanggal 09 Juni tahun 2022)</p>	<p>Keterangan Foto (diambil tanggal 09 Juni tahun 2022)</p>

**BANK SAMPAH**

	
<p>Keterangan Foto (tanggal 27 April tahun 2022)</p>	<p>Keterangan Foto (tanggal 27 April tahun 2022)</p>

***GAP pencapaian target akses saat ini***

**Tabel Capaian Akses Air Limbah Domestik Kabupaten Barito Timur Tahun 2022**

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
<b>A</b>	<b>Akses Aman</b>	0,70%
<b>B</b>	<b>Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)</b> Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) Akses Layak Bersama	5,50%
<b>C</b>	<b>Akses Belum Layak*</b> <b>BABS Tertutup</b>	12,80%
<b>D</b>	<b>BABS di Tempat Terbuka</b>	6,30%
Wilayah Perdesaan		
<b>A</b>	<b>Akses Aman</b>	0,00%

<b>B</b>	<b>Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)</b> Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) Akses Layak Bersama Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	16,70% 3,70% 45,40%
<b>C</b>	<b>Belum Layak BABS Tertutup</b>	0,00%
<b>D</b>	<b>BABS di Tempat Terbuka</b>	9,10%

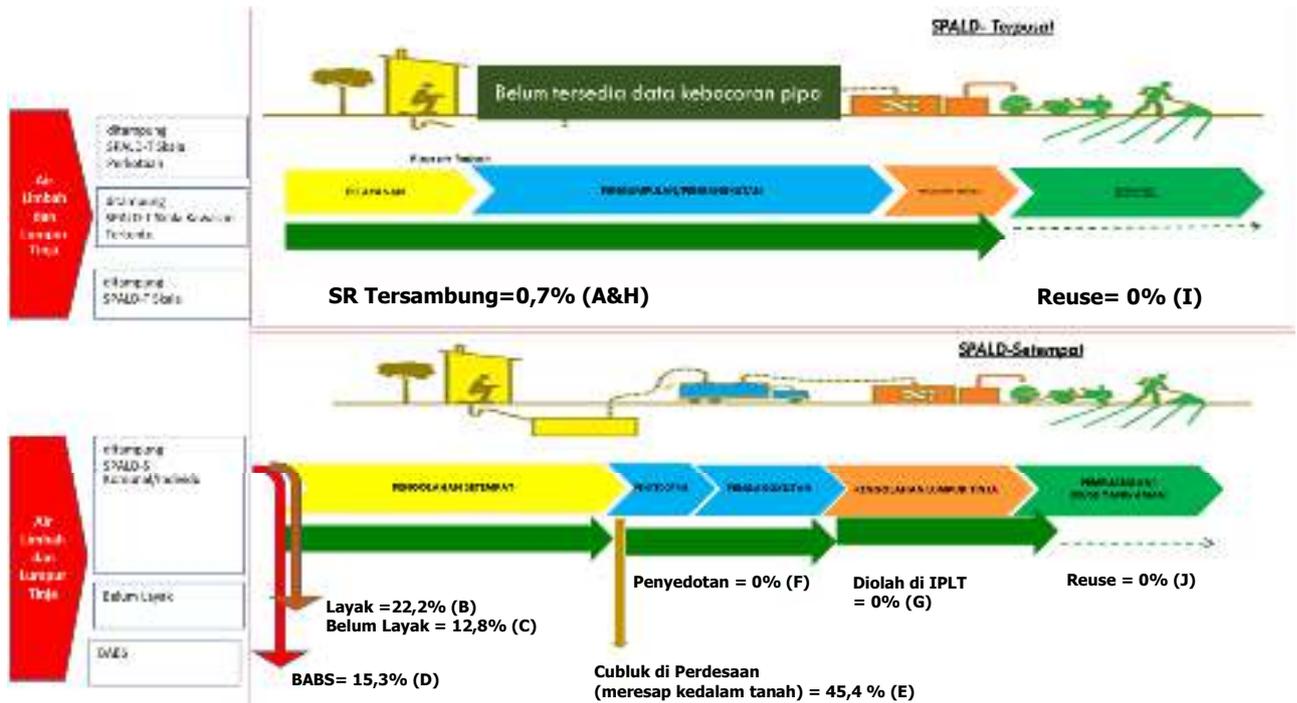
**Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan target RPJMN 2021-2024**

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2021	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten BARITO TIMUR	Kabupaten BARITO TIMUR			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	83,0%	71,0%	72,0%	32,3%	38,7%	39,7%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	17,0%	28,0%	27,0%	0,1%	27,9%	26,9%

**Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting**

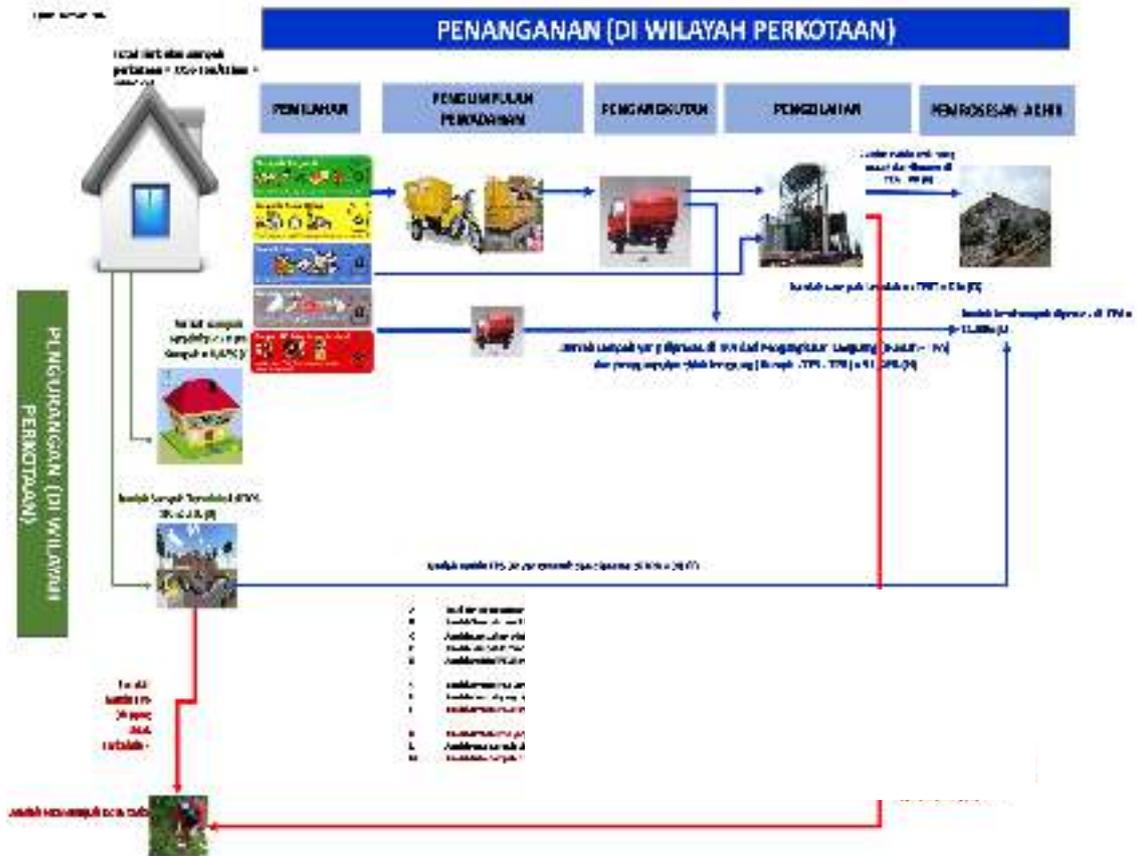
Infrastruktur	Persentase
<b>SPALD-S</b>	
Kapasitas Penggunaan IPLT	0,00%
Kapasitas penggunaan truk	0,00%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	0,00%
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	0,00%
Kapasitas IPLT terhadap total RT	0,00%
<b>SPALDT</b>	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	80%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	0,00%
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	0,00%

## Analisis Rantai Layanan Sanitasi



A	Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat	Dinas PU	0,70%
H	Persentase air limbah diolah di IPAL T skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran =0)	Dinas PU	0,70%
I	Persentase effluent terproses baik di IPAL	Dinas LH/UPT	0,00%
B	Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak	Dinas PU	22,20%
C	Persentase penduduk memiliki akses belum layak	STBM	12,80%
E	Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan	STBM	45,40%
F	Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut	Dinas LH	0,00%
G	Persentase debit lumpur tinja diangkat dan diolah di IPLT	Dinas LH	0,00%
J	Persentase effluent terproses baik di IPLT	Dinas LH/UPT	0,00%
D	Persentase BABS (di tempat terbuka)	STBM	15,30%

## Rantai Layanan Persampahan



		Ton/tahun	Persentase (%)
A	Total Timbulan sampah perkotaan	7568	100,00%
B	Jumlah Sampah Tereduksi di TPS 3R	7,2602568	0,10%
C	Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah	1,2387168	0,02%
D	Jumlah sampah terolah di TPST	0	0,00%
E	Jumlah residu TPS 3R yang masuk dan diproses di TPA	0	0,00%
G	Jumlah residu TPST yang masuk dan diproses di TPA	0	0,00%
H	Jumlah sampah yang diproses di TPA dari Pengangkutan Langsung (Rumah - TPA) dan pengumpul	2447,153856	32,34%
I	Jumlah residu TPS 3R yang tidak terkelola	65,3423112	0,86%
K	Jumlah residu TPST yang tidak terkelola	0	0,00%
L	Jumlah total sampah diproses di TPA	2447,153856	32,34%
M	Jumlah total sampah tidak terkelola (termasuk sampah yang tidak terangkut/terkumpul di ting	5112	67,55%

**Tabel Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah**

<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Tugas dan Fungsi</b>
<b>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<p><b>A. Bidang Air Minum dan PLP</b></p> <p><b>1. Tugas :</b> Tugas pokok Seksi Pelaksanaan PLP Dan Air minum pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur adalah penyiapan bahan untuk melaksanakan pengaturan air bersih, pengendalian, pembinaann penyusunan rencana pengembangan pemanfaatan air minum dan sanitasi.</p>
	<p><b>2. Fungsi :</b></p> <p>a. Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Seksi Pelaksanaan PLP Dan Air minum berdasarkan proritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;</p>
	<p>b. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pelaksanaan PLP Dan Air Minum dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;</p>
	<p>c. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pelaksanaan PLP Dan Air Minum berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;</p>
	<p>d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang pelaksanaan PLP dan air minum;</p>
	<p>e. Melaksanakan penyusunan pengembangan pemanfaatan air minum dan sanitasi;</p>
	<p>f. Mengolah data PLP dan Air Minum ;</p>
	<p>g. Menyiapkan bahan bahan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan dan pemukiman;</p>

	h. Menyusun rencana biaya di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
	i. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
	j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Seksi Pelaksanaan PLP Dan Air Minum baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
	k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya.
<b>2. Dinas Kesehatan</b>	<b>A. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga</b>
	1. Tugas :
	a. Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
	<b>2. Fungsi :</b>
	a. perencanaan kegiatan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
	b. pelaksanaan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
	c. pembagian pelaksanaan tugas Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
	d. pengawasan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

	e. pelaporan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
	f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Tabel Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah**

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
<b>3. Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>A. Seksi Pengelolaan, Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah</b> <b>1. Tugas dan Fungsi</b> a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Pengelolaan, Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah mengawasi dan melaporkan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
	b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Pengelolaan, Pengurangan dan pemanfaatan sampah;
	c. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan, Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
	d. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan, Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah; dan

	e. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan, Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Pertamanan.
	f. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Pengelolaan, Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah mengawasi dan melaporkan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

**Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah**

FUNGSI	PEMERINTAH DAERAH		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
<b>AIR LIMBAH DOMESTIK</b>			
<b>PERENCANAAN</b>			
Menyusun target pengelolaan air limbah Domestik skala Kabupaten/kota	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
<b>PENGADAAN SARANA</b>			
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Menyediakan sarana pengumpulan dan pengolahan awal (tangki septik)	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Membangun sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumur ke IPAL (pipa kolektor)	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
<b>PENGELOLAAN</b>			
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	-	-	-

Mengelola IPLT dan atau IPAL	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	-	-	-
Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestic	-	-	-
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB	Bidang Cipta Karya	-	-
<b>PENGATURAN DAN PEMBINAAN</b>			
Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	-	-	-
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	-	-	-
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik	-	-	-
<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestic	-	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	-	-	-

**Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan  
Kabupaten Barito Timur**

FUNGSI	PEMANGKU KEPENTINGAN		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLUD	PD dan sebagainya
<b>PERENCANAAN</b>			
· Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,	✓	-	DLH

· Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target	✓	-	DLH
· Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	✓	-	DLH
<b>PENGADAAN SARANA</b>			
· Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	✓	-	DLH dan PUPR
· Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	✓	-	DLH
· Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	✓	-	DLH dan PUPR
· Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	✓	-	DLH dan PUPR
· Membangun sarana TPA	✓	-	PUPR
· Menyediakan sarana composting	-	-	DLH
<b>PENGELOLAAN</b>			
· Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	-	-	DLH
· Mengelola sampah di TPS	✓	-	DLH/ PIHAK KETIGA/ PD
· Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	✓	-	DLH
· Mengelola TPA	✓	-	DLH
· Melakukan pemilahan sampah*	-	-	DLH
· Melakukan penarikan retribusi sampah	-	-	DLH, BAPENDA
· Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	-	-	DLH, DPMPSTP
<b>PENGATURAN DAN PEMBINAAN</b>			
· Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	✓	-	DLH

· Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	✓	-	DLH, SATPOL PP
· Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah		-	SATPOL PP
<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>			
· Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota	✓	-	DLH
· Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	✓	-	DLH
· Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan	✓	-	DLH

**Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air  
Limbah**

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	MCK Komunal	2010	KSM Tamiang Layang/ 600/90/DPU-BT/CK/VI/2010	8 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Tamiang Layang	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - Disperindag	Aktif
2	Tangki Septik Komunal	2018	KSM Desa Magantis/ 600/108/DPUPR-BT/CK/VI/2018	5 Orang	Perawatan dan Pemeliharaan	Magantis	Iuran warga	Sambungan Rumah (SR) dan Tangki Septik - DPUPRPerkim	Aktif
3	MCK Komunal	2018	KSM Tamiang layang/ 600/107/DPUPR-BT/CK/VI/2018	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Tamiang Layang	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
4	MCK Komunal	2015	KSM Desa Magantis/ 600/115/DPU-BT/CK/VI/2015	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Magantis	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
5	MCK Komunal	2013	KSM Tamiang Layang/ 600/97/DPU-BT/CK/VI/2013	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Tamiang Layang	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
6	Tangki Septik Komunal	2017	KSM Desa Tampu langit/ 600/121/DPUPR-BT/CK/VI/2017	5 Orang	Perawatan dan Pemeliharaan	Tampu Langit	Iuran warga	Sambungan Rumah (SR) dan Tangki Septik - DPUPRPerkim	Aktif

7	MCK Komunal	2013	KSM Desa Tangkan/ 600/98/DPU-BT/CK/VI/2013	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Tangkan	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
8	MCK Komunal	2014	KSM Desa Ramania/ 600/135/DPU-BT/CK/VI/2014	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Ramania	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
9	MCK Komunal	2014	KSM Desa Pulau Padang 600/136/DPU-BT/CK/VI/2014	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Pulau Padang	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
10	MCK Komunal	2015	KSM Desa Kambitin/ 600/114/DPU-BT/CK/VI/2015	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Kambitin	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
11	MCK Komunal	2010	KSM Ampah/ 600/89/DPU-BT/CK/VI/2010	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Ampah Kota	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
12	Tangki Septik Komunal	2018	KSM Desa Ampah Dua/ 600/101/DPUPR-BT/CK/VI/2018	5 Orang	Perawatan dan Pemeliharaan	Ampah Dua	Iuran warga	Sambungan Rumah (SR) dan Tangki Septik - DPUPRPerkim	Aktif
13	Tangki Septik Komunal	2018	KSM Desa Putai/ 600/101/DPUPR-BT/CK/VI/2018	5 Orang	Perawatan dan Pemeliharaan	Putai	Iuran warga	Sambungan Rumah (SR) dan Tangki Septik - DPUPRPerkim	Aktif
14	MCK Komunal	2012	KSM Desa Unsum/ 600/88/DPUPR-BT/CK/VI/2012	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Unsum	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
15	MCK Komunal	2012	KSM Desa Kalamus/ 600/87/DPUPR-BT/CK/VI/2012	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Kalamus	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
16	MCK Komunal, Tangki Septik Komunal	2019	KSM Desa Tampa/ 600/116/DPUPR-BT/CK/VI/2019	5 Orang	Perawatan dan Pemeliharaan	Tampa	Iuran warga	Sambungan Rumah (SR) dan Tangki Septik - DPUPRPerkim	Aktif
17	MCK Komunal	2012	KSM Desa Luaw Jawuk/ 600/89/DPUPR-BT/CK/VI/2012	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Luaw Jawuk	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif

**Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan  
Persampahan**

No	Fasilitas yang dikelola	Tahun Pembangunan Infrastruktur	Nama lembaga/kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/pengurus	Bidang yang dikelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/kegiatan
1	Bank sampah	2020	Bank Sampah Mentari	Swasta/SK Kepala Desa No. 517/644/KTL/X/2021	5 Orang	Pembangunan Bank Sampah	Desa Serapat	Iuran	Bangunan Bank Sampah – Kelola Masyarakat	Aktif

2	TPS 3R	2021	KSM Munsit	KSM/ SK. No 14 tahun 2021	5 Orang	Pembangunan TPS 3R	Tamiy ang Layan g	Iuran	Bangunan TPS 3R, Motor Sampah, mesin pencacah organik – Hibah APBN	Aktif
---	--------	------	------------	---------------------------	---------	--------------------	-------------------	-------	--	-------

**PEMETAAN REGULASI AIR LIMBAH**

No			
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
		-	✓
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	Perbup No.22 Tahun 2016 tentang Bebas Buang Air Besar sembarangan Nol (BASNO)	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	-	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah tentang Domestik	Ada	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	-	✓

b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	-	✓
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	-	✓
d	Substansi pembinaan dan pengawasan	-	✓
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan	Sudah ada	Belum ada
	Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	-	✓
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	1. 2. 3. 4.	- - - -
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	Ada	Belum Ada
		-	✓

**PEMETAAN REGULASI PERSAMPAHAN**

No		Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Sampah	✓	-
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.	-	-
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	PERDA NO.1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	Ada	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	✓	-
b	Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	✓	-
c	Substansi pengaturan : Pengurangan sampah ( <i>pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i> )	✓	-
d	Substansi pengaturan : Penanganan sampah ( <i>pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah</i> )	✓	-
e	Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	✓	-
f	Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	-	✓
g	Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	✓	

h	Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	✓	-
i	Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	✓	-
j	Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif	✓	-
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
		-	✓
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
		4.	4.

**Tabel Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygiene dan Sanitasi Air Limbah**

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Pemicuan STBM	2008 s/d 2022	Dinas Kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari-hari.	Masyarakat di 10.300 RT pada 103 Desa/Kelurahan	Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat itu menjijikan, memalukan dan membuat karenya sakit, perlu kita	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal.
2	Verifikasi dan Deklarasi Desa ODF	2014	Dinas Kesehatan	Verifikasi desa yang akan melakukan deklarasi ODF atau desa yang dinyatakan ODF	Telah dilakukan Verifikasi Desa 58 Desa dan jumlah desa yang deklarasi RT pada 14 Desa/Kelurahan	masih banyak desa yang belum memenuhi kriteria desa ODF karena masih ada rumah tangga yang masih Buang Air Besar sembarangan.	Belum seluruh rumah tangga memiliki jamban sendiri dan masih BABs .
3	Pertemuan Advokasi STBM TK Kabupaten	2017	Dinas Kesehatan	Penguatan Advokasi STBM LS/LP dalam pencapaian Program	8 Dinas / Badan yang bergerak dalam Pokja	Koordinasi LP/LS belum maksimal dalam	Perlunya dukungan LS/LP dan Pemangku Kepentingan untuk

				STBM TK Kabupaten.	Sanitasi Kabupaten .	percepatan desa STBM,	percepatan Desa ODF.
4	Study EHRA	2016, 2019	Dinas Kesehatan	Melakukan pendataan untuk mengetahui resiko kesehatan lingkungan tingkat Kabupaten Barito Timur	pada tahun 2016 jumlah desa 22 desa total sampel 880 KK, sedangkan tahun 2019 jumlah 104 desa 4.120 KK	Kurangnya data dukung khususnya faktor resiko kesehatan lingkungan di kabupaten Barito Timur	terbatasnya data base kesehatan lingkungan yang baik sebagai dasar untuk perencanaan program dan kegiatan Kinerja OPD di Kabupaten Barito Timur
5	Pemicuan Percepatan Desa berwawasan STBM dalam upaya penurunan Stunting	2019,2020, 2021, 2022	Dinas Kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari-hari dan penurunan angka stunting.	20 desa sasaran yang mengalami kategori stunting .	tingginya angka stunting Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat itu menjijikan, memalukan dan membuat karenanya sakit, perlu kita	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal dan medis komonikasi pendukung lainnya seperti sepanduk, baleho, dll, .

**Tabel Media Komunikasi dan Kerjasama terkait air limbah**

No	Jenis Media (a)	Khalayak (b)	Pendanaan (c )	Isu Yang diangkat (d)	Pesan Kunci (e)	Efektivitas ( f )
1	-	-	-	-	-	-

**Tabel Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygiene dan Sanitasi Persampahan**

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran

**Tabel Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Persampahan**

No	Jenis Media (a)	Khalayak (b)	Pendanaan (c )	Isu Yang diangkat (d)	Pesan Kunci (e)	Efektivitas ( f )
1	-	-	-	-	-	-

**Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah Air Limbah**

<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Kepentingan</b>	<b>Kekuatan/Sumberdaya</b>
<b>Anggota Legislatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislasi</li> <li>- Penganggaran</li> <li>- Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim anggaran terkait Alokasi APBD</li> <li>- Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah</li> </ul>
<b>Pengusaha / Swasta:</b> - PT. Adaro (Yayasan Bangun Negeri/YABN)	- Bantuan Penanganan sanitasi melalui program CSR	- Advokasi dalam peningkatan target akses layak dan aman dalam pemecuan STBM
<b>BUMDes</b>	-	-
<b>Organisasi Massa (Ormas):</b> - Tidak Ada	-	-
<b>Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):</b> - Tidak Ada	-	-
<b>Tokoh Masyarakat</b> - Tidak Ada	-	-

**Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah  
Persampahan**

<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Kepentingan</b>	<b>Kekuatan/Sumberdaya</b>
<b>Anggota Legislatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislasi</li> <li>- Penganggaran</li> <li>- Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim anggaran terkait Alokasi APBD</li> <li>- Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan</li> </ul>
<b>Pengusaha / Swasta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Bank Kalteng</li> <li>- PT. BUMA</li> <li>- PT. SIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana prasarana persampahan dalam rangka penuntasan akses persampahan</li> </ul>
<b>BUMDes</b> - Tidak Ada	-	-
<b>Organisasi Massa (Ormas):</b> - Tidak Ada	-	-
<b>Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):</b> - Tidak Ada	-	-
<b>Tokoh Masyarakat</b> - Tidak Ada	-	-

**Tabel Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Barito Timur untuk sanitasi**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan
		n-4	n-3	n-2	n-1	n	
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )	869.636.900	935.966.000	935.969.000	1.865.372.244	953.983.400	0,15
1.1	Air Limbah Domestik	200.000.000	200.000.000	200.000.000	110.286.000	110.286.000	-0,11
1.2	Sampah Domestik	669.636.900	735.966.000	735.969.000	1.755.086.244	843.697.400	0,24
2	Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2)	3.624.000.000	845.880.000	4.152.272.000	3.413.629.000	3.414.382.000	0,74
2.1	DAK Sanitasi	3.624.000.000	845.880.000	4.152.272.000	3.413.629.000	3.414.382.000	0,74
2.2	DAK Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	0	0	0	0	0	0
3	Pinjaman/Hibah Sanitasi	0	0	0	0	0	0
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		- 2.754.363.100	90.086.000	- 3.216.303.000	- 1.548.256.756	- 2.460.398.600	-9,42
Total Belanja Langsung		116.932.350.154	723.901.523.503	621.968.310.598	920.557.700.399	270.592.331.334	1,21
% APBD murni terhadap Belanja Langsung		-2,36%	0,01%	-0,52%	-0,17%	-0,91%	-9,96
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							

**Tabel Perkiraan besaran pendanaan sanitasi kedepan**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan Belanja Langsung	303.063.411.092	339.431.020.423	380.162.742.873	425.782.372.017	476.876.144.659	1.925.315.691.064
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi Perkiraan Komitmen Pendanaan	276.000.000	303.600.000	333.960.000	367.356.000	404.091.600	1.685.007.600
3	Sanitasi	1.049.381.740	1.153.319.914	1.268.651.905	1.395.517.094	1.535.068.803	6.401.939.457

**Tabel Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Barito Timur  
untuk operasional/pemeliharaan dan investasi sanitasi**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan Rata-Rata
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Belanja Sanitasi	200.000.000	210.000.000	212.000.000	122.286.000	123.286.000	-0,09
1.1	Air Limbah Domestik	200.000.000	200.000.000	200.000.000	110.286.000	110.286.000	-0,11
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	0	10.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	0,09
1.2	Sampah domestik	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	600.873.209	667.636.910	735.966.000	735.969.000	1.755.086.244	0,40

**Tabel Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Barito Timur  
untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2027**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Belanja Sanitasi	2.431.885.000	2.613.706.250	2.808.612.812	3.018.882.515	3.247.312.969	14.120.399.546
1.1	Air Limbah Domestik	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	2.000.000.000
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	75.000.000
1.2	Sampah domestik	1.987.000.000	2.086.350.000	2.190.667.500	2.300.200.875	2.415.210.919	10.979.429.294
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	129.885.000	162.356.250	202.945.312	253.681.640	317.102.050	1.065.970.252

**Tabel Kemampuan APBD Kabupaten Barito Timur dalam mendanai program/kegiatan SSK**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan	2.110.594.868	2.311.654.355	2.532.319.791	2.773.621.770	3.038.583.947	12.766.774.731
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	2.250.000.000	2.450.000.000	2.650.000.000	2.850.000.000	3.050.000.000	13.250.000.000
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	2.150.000.000	2.350.000.000	2.550.000.000	2.780.000.000	3.050.000.000	12.850.000.000
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	139.405.132	138.345.645	117.680.209	76.378.230	11.416.053	483.225.269
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	39.405.132	38.345.645	17.680.209	6.378.230	11.416.053	83.225.269

**ISU STRATEGIS AIR LIMBAH DOMESTIK**

**ISU STRATEGIS**

1. Masih terdapat GAP sanitasi terhadap target 2024 untuk Akses Aman sebesar 1,3%, Akses Layak Individu ( tidak termasuk aman) sebesar 42,8 %; GAP Akses layak khusus pedesaan sebesar 43,7 %; GAP Akses belum layak sebesar 12,5%, GAP BABS sebesar 15,3%
2. Belum adanya Regulasi terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik
3. Belum memiliki Kelembagaan yang menangani masalah air limbah domestik
4. Terbatasnya pembiayaan dibidang air limbah domestik, dari anggaran daerah
5. Masih rendahnya keterlibatan swasta atau pemangku kepentingan lainnya untuk pengelolaan air limbah domestik
6. Perlu penanganan air limbah domestik untuk kawasan pinggir sungai

**REKOMENDASI**

1. Pembangunan tangki septik Individual sebanyak 852 unit dan penambahan sambungan rumah IPAL sebanyak 50 unit sampai dengan tahun 2027 dan Pembangunan SPALDT skala permukiman untuk akses aman
2. Pembangunan IPLT dan Pengadaan Truk Tinja
3. Penyusunan Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik
4. Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (LIPTD)
5. Perlu keaktifan Pokja PPAS dalam melaksanakan Internalisasi dan Eksternalisasi Pendaanran sanitasi
6. Perlu dukungan Perda/Perbup untuk penggunaan Dana CSR dan dana Desa untuk percepatan akses sanitasi
7. Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kawasan Pinggiran Sungai

**ISU STRATEGIS PERSAMPAHAN**

**ISU STRATEGIS**

1. Masih memiliki GAP terhadap target 2024 untuk pengurangan sampah sebesar 27,9% dan GAP penanganan sampah sebesar 38,7%
2. Belum memiliki TPA dengan Sistem Sanitary Landfill/Controlled Landfill
3. Sarana dan Prasarana Persampahan belum memadai
4. Hanya memiliki 1 unit TPS 3R dan 1 unit Bank Sampah Aktif
5. Belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpusat (TPST)
6. Belum memiliki Kelembagaan yang menangani masalah Persampahan
7. Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Persampahan belum optimal
8. Rendahnya perilaku masyarakat akan pengelolaan persampahan rumah tangga
9. Terbatasnya pembiayaan di bidang Persampahan melalui penganggaran daerah (APBD)
10. Rendahnya keterlibatan pihak Swasta atau pemangku kepentingan lainnya untuk pengelolaan Persampahan

**REKOMENDASI**

1. Pembangunan TPA Sanitary Landfill/Controlled Landfill
2. Penambahan sarana pengangkutan 12 unit dan penambahan sarana pengumpulan 42 unit (analisa instrumen SSK – Kebutuhan Persampahan)
3. Penyiapan lahan dan Pembangunan TPS 3R dan Bank Sampah Baru
4. Penyiapan lahan dan Pembangunan TPST
5. Pembentukan Lambaga Pengelola Persampahan (LIPTD)
6. Sosialisasi dan Pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga dengan meningkatkan pengetahuan untuk mengelola sampah dengan 3R mengacu kepada PERDA Pengelolaan Persampahan Kabupaten Barito Timur
7. Perlu keaktifan Pokja PPAS dalam melaksanakan Internalisasi dan Eksternalisasi Pendaanran sanitasi
8. Perlu dukungan Perda/Perbup untuk penggunaan Dana CSR dan pemanfaatan Dana Desa/ Alokasi Dana Desa untuk percepatan akses layanan persampahan

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxxvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Metodologi Penyusunan .....	5
1.3. Dasar Hukum.....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI</b>	
2.1. Gambaran Wilayah .....	14
2.2. Profil Sanitasi Saat Ini.....	31
2.3. Permasalahan Sanitasi dan Area Beresiko Sanitasi.....	88
<b>BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI</b>	
3.1. Visi dan Misi Sanitasi .....	105
3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi .....	107
3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah.....	121
<b>BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI</b>	
4.1. Air Limbah Domestik .....	127
4.2. Pengelolaan Persampahan .....	128
<b>BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI</b>	
5.1. Ringkasan.....	132
5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah.....	133
5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah .....	134

**BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK ..... 136**

**LAMPIRAN**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Layanan sanitasi permukiman (Air limbah domestik, sampah rumah tangga dan drainase lingkungan) di Kabupaten Barito Timur belum maksimal, banyak hal yang menjadi penyebab rendahnya akses sanitasi ini, mulai dari belum maksimalnya perhatian akan pentingnya sanitasi yang sering mengakibatkan pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur. Rendahnya peran serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat, membawa dampak atau efek domino yang sangat luas, seperti penurunan kualitas lingkungan hidup termasuk pencemaran sumber air bersih, meningkatnya angka kejadian penyakit sebagai akibat sanitasi buruk, hingga menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah program untuk meningkatkan dan mempercepat perencanaan dan investasi sektor sanitasi yang dilaksanakan selama periode pertama (first cycle) 2010 – 2014 dan periode kedua (second cycle). Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah mengikuti PPSP pada periode Pertama yang telah menghasilkan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) pada tahun 2015, pada tahun 2016 Kabupaten Barito Timur penyusunan Dokumen MPS. Maka perlu untuk dilakukan Pemutakhiran SSK pada tahun 2022 untuk pencapaian target dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dalam RPJMN 2020-2024 dan SDGs tahun 2025.

Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Timur adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Barito Timur dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Guna menghasilkan Strategi Sanitasi Kabupaten sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kerangka Kerja Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Timur. Kerangka kerja

sanitasi ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kelompok kerja sanitasi.

Pengembangan layanan sanitasi Kabupaten harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahun) yang komprehensif dan bersifat strategis. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) itu memang dibutuhkan mengingat kabupaten /kota di Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan sanitasi menyeluruh. Strategi Sanitasi Kabupaten juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi Kabupatennya. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi Kabupaten yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.

Tahun 2021, Pemerintah Indonesia memasuki periode RPJMN baru 2020-2024 dan SDGs yang menetapkan target yaitu akses sanitasi Aman di akhir tahun 2025. Dalam upaya untuk mencapai target tersebut Kabupaten Barito Timur harus memutakhirkan Dokumen Strategi Sanitasi yang berkelanjutan. Untuk itu POKJA PPAS Kabupaten Barito Timur melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi melakukan Penyusunan Pemutakhiran SSK pada tahun 2022 ini.

Pemutakhiran SSK Kabupaten Barito Timur berisi tentang pemetaan sanitasi skala kabupaten, kerangka pengembangan dan pentahapan pembangunan sanitasi dan strategi, serta kebutuhan program/kegiatan pembangunan sanitasi di kabupaten Barito Timur hingga 5 (lima) tahun kedepan. Pemutakhiran SSK merupakan pemantapan dari perencanaan SSK yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Pemutakhiran SSK 2015 untuk mencapai Universal Access sesuai target RPJMN 2015-2019 yaitu 100 – 0 – 100 yang berupa 100% pemenuhan layanan air bersih/minum, 0% kawasan kumuh dan 100% layanan sanitasi. Ditambah target berdasarkan data exercise Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2024 untuk Akses Layak 72% dan Akses Aman 2%. Pemutakhiran SSK ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD terkait sektor sanitasi tiap tahunnya.

Pemutakhiran SSK ini perlu dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini:

- 1) Peningkatan kualitas dokumen dari SSK yang disusun sebelumnya sehingga diharapkan adanya kelengkapan data atau validitas data yang akurat.

- 2) Adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target RPJMN 2020-2024 dan SDGs yang menetapkan target yaitu akses sanitasi Aman di akhir tahun 2025.
- 3) Penyesuaian/perubahan RPJMD yang menjadi acuan dari SSK. Perubahan RPJMD terjadi akibat adanya penggantian Kepala Daerah. Dalam hal ini PPSP diharapkan akan menjadi payung pembangunan sanitasi dengan mengkonsolidasikan dan memfokuskan arah pembangunan dari seluruh program pembangunan sanitasi yang ada untuk mencapai target dan sasaran pembangunan sanitasi permukiman yang telah ditetapkan. Diharapkan juga melalui program ini, target pembangunan sanitasi permukiman hingga tahun 2025 dapat terpenuhi.

Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Barito Timur merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan

Pengembangan layanan sanitasi kota harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahunan) yang komprehensif dan bersifat strategis. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) itu memang dibutuhkan mengingat banyaknya kabupaten khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang memerlukan waktu bertahun-tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan Sanitasi secara menyeluruh dan tepat sasaran. Strategi Sanitasi juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasinya.

Pembangunan sanitasi masih banyak dilakukan secara parsial, masing-masing institusi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sendiri-sendiri sesuai dengan Renstra yang telah dibuat pada masing-masing SKPD. Untuk maksud tersebut maka dibentuklah POKJA PPAS diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek dan dapat mengintegrasikan semua program sanitasi yang terdapat pada SKPD dalam suatu Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Timur.

Pemutakhiran SSK adalah suatu rencana strategi berjangka waktu menengah 5 (lima) tahun yang dibuat khusus untuk memberikan arah atau pedoman

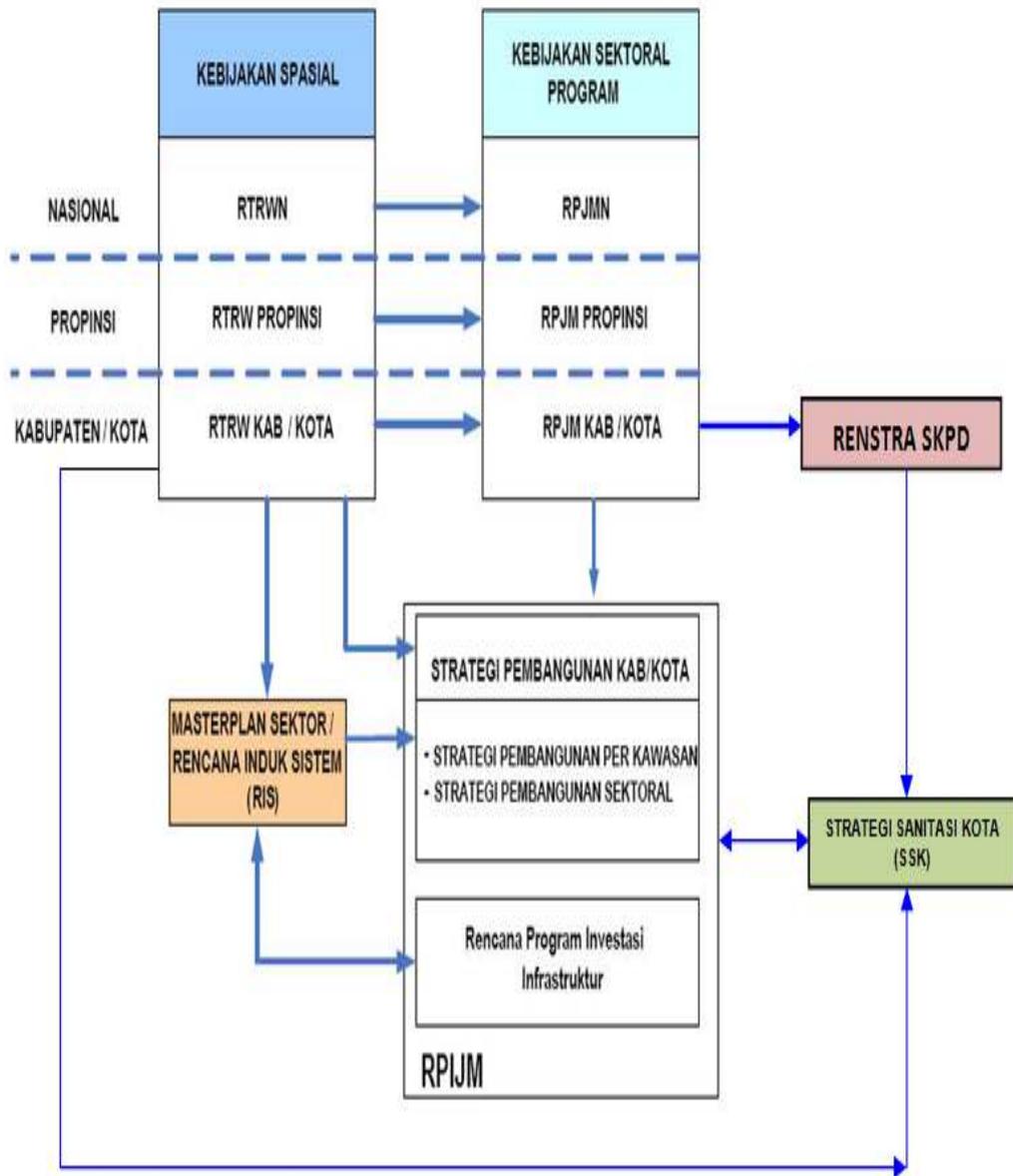
pembangunan sektor sanitasi dan memastikan satu program sanitasi akan bersinergi dengan program-program lainnya guna mencapai sasaran pembangunan yang disepakati, termasuk juga mensinergikan upaya-upaya yang akan dilakukan sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat atau kelompok masyarakat.

Pemutakhiran SSK yang disusun oleh Pokja Sanitasi ini mengacu kepada 4 karakteristik utama yang akan tercermin dalam prosesnya maupun produknya, yaitu:

- 1) Intersektor dan terintegrasi
- 2) Mensinkronkan pendekatan 'top down' dengan 'bottom up'
- 3) Skala Kabupaten
- 4) Berdasarkan data empiris (dari studi-studi pendukung Strategi Sanitasi Kabupaten)

Pemutakhiran SSK adalah rencana strategi dan rencana investasi jangka menengah yang merupakan kompilasi dari beberapa dokumen seperti RPJMD, Realisasi APBD, Renstra SKPD dan renja SKPD pada sektor sanitasi, setelah menjadi dokumen merupakan buku perencanaan strategis tersendiri untuk dijadikan rujukan. RPJMD menjadi dasar karena SSK disusun menurut alur rencana pembangunan berjangka 5 tahunan tersebut sehingga program/kegiatan dalam SSK harus selaras dengan RPJMD yang sedang disusun. Disamping itu Pemutakhiran SSK juga menjadi rencana investasi jangka menengah karena memuat indikasi program yang telah memiliki kemungkinan penganggaran yang kuat khusus sektor sanitasi sebagaimana dokumen RPIJM.

Keterkaitan dokumen Pemutakhiran SSK dengan RTRW dan RPJMD adalah bahwa dokumen SSK mendukung dan mengacu pada visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RTRW dan RPJMD sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. Pemutakhiran SSK menjadi dokumen yang mengacu pada dokumen perencanaan yang disusun sebelumnya seperti RTRW, RPJMD khusus sektor sanitasi serta bisa memberi masukan umpan balik (feed-back) dan melengkapi penyusunan RPJMD pada periode berikutnya. Dokumen Pemutakhiran SSK bisa menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lain seperti Renstra SKPD, Renja SKPD dan RPIJM untuk sektor sanitasi.



Gambar 1.1. Kedudukan Dokumen SSK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.2 Metodologi Penyusunan

Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Barito Timur disusun berdasarkan karakteristik daerah dan melibatkan sebanyak mungkin pelaku dari berbagai unsur dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan awal yang dilaksanakan dalam

tahapan penyusunan dokumen ini berupa rapat internalisasi Pokja PPAS, lokakarya, dialog dan pertemuan dengan lembaga yang terkait. Diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja, jadwal, data, dukungan politis dan pendanaan dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Barito Timur. Penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK terdapat 5 (lima) proses utama yang akan dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Timur yaitu memastikan bahwa Pemutakhiran SSK dapat diimplementasikan secara optimal sehingga visi dan misi pembangunan serta peningkatan layanan sanitasi sebagaimana dituangkan dalam Pemutakhiran SSK dapat tercapai. Proses kegiatan penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK dapat dilihat pada gambar 1.2 sebagai berikut :



Gambar 1.2. Proses Penyusunan Dokumen Pemutakhiran SSK

### ***Tahap Internalisasi dan Penyamaan Persepsi***

Tahapan ini untuk mendapatkan kesepahaman dan kesamaan persepsi anggota Pokja PPAS yang di bantu oleh Fasilitator Implementasi Provinsi Kalimantan Tengah mengenai pentingnya pembangunan sanitasi di Kabupaten Barito Timur serta perlunya merevisi SSK yang pernah disusun dengan hasil berupa jadwal dan rencana kerja Pokja Sanitasi dalam pelaksanaan Penyusunan Pemutakhiran SSK. Dituliskan sebagai **narasi Bab I**.

### ***Tahap Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi***

Proses kerja pada tahap ini meliputi penetapan wilayah kajian, penyepakatan profil wilayah dan profil sanitasi Kabupaten Barito Timur, pemetaan kondisi

sanitasi saat ini dan permasalahan yang dihadapi, penetapan area resiko sanitasi beserta indeks resiko sanitasi yang menyertainya. Hasil dari tahap ini adalah:

- a. Tersusunnya wilayah kajian SSK dan profil wilayah Kabupaten Barito Timur
- b. Tersedianya hasil study EHRA dan 6 kajian primer yang lain
- c. Tersusunnya profil sanitasi Kabupaten Barito Timur dengan terisinya data instrumen SSK profil sanitasi
- d. Disepakatinya permasalahan mendesak yang dihadapi pemerintah kabupaten untuk masing-masing sub sektor sanitasi
- e. Didapatnya peta area beresiko beserta indeks resiko sanitasi.

Hasil dari tahap ini dituliskan dalam bentuk **narasi Bab II**.

### ***Tahap Skenario Pembangunan Sanitasi***

Sasaran tahap ini adalah tersusunnya indikasi program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Barito Timur untuk waktu 5 tahun mendatang, sedang hasil dari kegiatan di tahap ini adalah

- a. Disepakatinya visi dan misi sanitasi
- b. Ditetapkannya zona dan sistem sanitasi serta cakupan layanannya
- c. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi
- d. Disusunnya strategi pengembangan sanitasi.
- e. Disepakatinya daftar Indikasi Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi.
- f. Disusunnya matriks monitoring dan evaluasi capaian SSK.

Hasil pembahasan tahap ini dituliskan dalam **Bab III, Bab IV, Bab V dan Bab VI**.

### ***Tahap Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi***

Tujuan tahap ini adalah untuk mendapatkan kesepahaman dan kesamaan persepsi tentang program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi kepada SKPD terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

Disamping itu juga membangun kesepahaman dan dukungan terhadap rencana penganggaran sanitasi yang diminta dari berbagai pemangku kepentingan baik swasta (CSR), kelompok masyarakat, lembaga donor, pemerintah (Kabupaten, Provinsi, Pusat).

Adapun hasil dari tahap ini adalah :

- a. Teridentifikasinya program, kegiatan dan besaran pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran.
- b. Terbangunnya komitmen program, kegiatan dan indikasi sumber pendanaan pembangunan sanitasi di tingkat Kab./ Kota.
- c. Dibahasnya daftar program, kegiatan dan indikasi sumber serta besaran pendanaan pembangunan sanitasi di tingkat Provinsi dan Pusat.
- d. Teridentifikasinya sumber pendanaan indikatif dari APBD, APBD Provinsi, APBN, DAK maupun sumber lainnya.
- e. Teridentifikasinya program, kegiatan dan indikasi besaran pendanaan yang belum ada sumber pendanaan (funding gap).

Tahap Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi dituliskan pada **Bab V dan Bab VI**

### ***Tahap Finalisasi***

Finalisasi adalah proses untuk menyempurnakan atau melengkapi penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK dan sekaligus untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah, hasil dari tahap ini adalah :

- a. Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Barito Timur.
- b. Terangarkannya program dan kegiatan di dalam dokumen penganggaran.
- c. Pengesahan Pemutakhiran SSK Kabupaten Barito Timur oleh Bupati

Dari kelima tahapan tersebut terdapat tahapan kritis dimana pada proses ini harus mengumpulkan data dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, yaitu pada tahapan kedua "Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi", dari data inilah dapat dikaji kondisi pengembangan sanitasi dan dari sini pula akan disusun rencana dan penganggaran sanitasi untuk 5 tahun kedepan. Untuk menyusun dokumen ini data-data yang diperlukan adalah :

- a. Study dan Kajian Primer

Study primer disini adalah proses pengumpulan data dari sumber/pelaku secara langsung untuk mengetahui kondisi sanitasi saat ini dari berbagai tinjauan (latar belakang) sektoral tertentu, metode yang digunakan ialah 'survey' dan 'observasi'.

Dalam hal ini study primer yang dilakukan adalah :

- Study EHRA (environment health risk assesment)
- Kajian peran swasta dalam penyediaan layanan sanitasi
- Konsolidasi kelembagaan terkait sanitasi
- Pemetaan keuangan dan perekonomian daerah

- Kajian komunikasi dan media
  - Kajian peran masyarakat
- b. Data Sekunder
- Untuk kebutuhan data tentang kondisi sanitasi saat ini selain data primer, maka dilengkapi dengan data-data sekunder dari SKPD terkait ataupun dokumen resmi yang dimiliki pemerintah kabupaten yang sesuai dengan kebutuhan untuk diolah menjadi fakta yang realistis. Bentuk dari data ini bisa file atau catatan dan data dari program/kegiatan atau proyek terkait sanitasi dari stakeholder yang berkompeten maupun dokumen lain.
- c. Persepsi SKPD
- Selain dua data diatas masih ditambahkan pula pendapat subjektif dari anggota POKJA PPAS Kabupaten Barito Timur yang mewakili SKPD terkait sanitasi yang dianggap mengetahui situasi dan kondisi kesehatan lingkungan permukiman di wilayah Kabupaten. Pendapat masing-masing anggota akan saling melengkapi dan membentuk gambaran kondisi sanitasi yang ada saat ini.

### 1.3 Dasar Hukum

Didalam penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK ini Kabupaten Barito Timur didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi :

#### **Undang-Undang :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

#### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :**

1. PP No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum
2. PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

**Peraturan Presiden Republik Indonesia :**

1. PERPRES NO. 18 TAHUN 2020 Tentang RPJMN 2020 – 2024
2. PERPRES NO 97 Tahun 2017 Tentang Jakstranas Pengelolaan Sampah
3. PERPRES NO 59 TAHUN 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)- SDGs
4. PERPRES NO 185 TAHUN 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

**Peraturan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup :**

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui bank sampah
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Air Limbah.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

**Keputusan Menteri Kesehatan :**

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 Tahun 2001 Tentang Pedoman Teknis ADKL ( Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan )
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 Tentang Penyehatan Sarana dan bangunan umum.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Strategi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

4. Surat Edaran Nomor Hk.03.03/Menkes/184/2015 Tentang Pendanaan Untuk Upaya Pelayanan Kesehatan Preventif Provinsi Dan Kabupaten/Kota

**Keputusan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 845/9287/SJ Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Daerah (untuk Provinsi)
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 845/9288/SJ Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Daerah (untuk Kota/Kabupaten)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan RKPD 2020

**Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :**

1. Surat Direktur Permukiman Dan Perumahan Bappenas Sebagai Ketua Pokja AMPL Nasional Nomor : 2842/Dt.6.3/05/2015, Tanggal : 7 Mei 2015 Perihal : Pemanfaatan Nawasis
2. Peraturan Menteri PU No. 10/PRT/M/2008 Tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang PU Wajib dilengkapi dengan UPL dan UKL
3. Peraturan Menteri PU No. 19 tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar TPA Sampah
4. Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
5. Peraturan Menteri PU No. 01/PRT/M/2014 Tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang
6. Peraturan Menteri PU No. 04 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

**Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah:**

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2022
2. Peraturan Gubernur No. 56 tahun 2014 Tentang Gerakan Buang air Besar Sembarangan Nol

**Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur:**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 3),
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2009 Nomor ),
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 4,)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.
5. Peraturan Bupati Barito Timur nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
6. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 180/230/HUK/2022 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan Pemutakhiran SSK Kabupaten Barito Timur terdiri dari 6 Bab, beserta lampiran-lampiran yang tidak terpisahkan sebagai berikut :

- Bab I : Berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang Latar Belakang, Metodologi Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Menjelaskan wilayah kajian SSK dan kondisi umum Kabupaten yang mencakup: administratif, kependudukan, jumlah penduduk miskin dan kebijakan penataan ruang. Profil sanitasi saat ini menjelaskan capaian akses sanitasi saat ini juga sistem pengelolaan air limbah domestik, persampahan perkotaan dan drainase perkotaan mencakup aspek teknis maupun aspek non

teknis dengan data yang berasal dari studi EHRA, non EHRA, dan dari data sekunder serta menyajikan area berisiko sanitasi dan permasalahan mendesak sanitas

- Bab III : Menguraikan Visi dan misi Sanitasi, rencana pengembangan sanitasi meliputi tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi, Tahapan Pengembangan Sanitasi, skenario pencapaian sasaran, dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah.
- Bab IV : Menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang menyeluruh baik sub sektor air limbah, sub sektor persampahan maupun drainase perkotaan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin)
- Bab V : Berisi Program, Kegiatan Dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Tentang Ringkasan, Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah, Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah, Dan Antisipasi Funding Gap.
- Bab VI : Berisi Tentang Monitoring Dan Evaluasi Capaian SSK.

## **BAB II**

### **PROFIL SANITASI SAAT INI**

#### **2.1. Gambaran Wilayah**

##### **Kondisi Administratif**

Wilayah Kabupaten Barito Timur terletak di bagian paling timur Provinsi Kalimantan Tengah dan berada pada posisi Timur terletak diantara 1°2' Lintang Utara dan 2°5' Lintang Selatan, 114° dan 115° Bujur Timur. Luas wilayah administrasi Kabupaten Barito Timur adalah 3.834 Km<sup>2</sup>. Wilayah kabupaten ini, seluruhnya merupakan wilayah daratan dan tidak memiliki kawasan pesisir dan laut.

Adapun batas-batas wilayah secara administratif, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Kalimantan Tengah), Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan)

Kabupaten ini memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan dan barang, sehingga menjadi kota transit, baik dari Kota Banjarmasin maupun Kota Palangka Raya.

Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur berada di bagian paling timur yang berdekatan dengan Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan letak dan posisi

demikian maka arah perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Timur.

Wilayah Kabupaten Barito Timur berada pada ketinggian 50 – 100 m di atas permukaan laut dengan kondisi bentang alam sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Awang dan Kecamatan Patangkep Tutui yang merupakan daerah perbukitan.

Berdasarkan kelerengan pada umumnya merupakan dataran rendah dengan kemiringan berkisar antara 0 – 2% lebih banyak dijumpai di sisi barat, 2 – 15% dan 15-40% masing-masing dapat dijumpai di sisi tengah yang membentang dari utara hingga Timur. Untuk kemiringan di atas 40 % dapat dijumpai di bagian sisi utara sebelah timur.

Kondisi hidrologi di Kabupaten Barito Timur cukup banyak, yaitu sungai antara lain : Sungai Karau, Sungai Tuyau, Sungai Sirau, dan Sungai Tabalong Kiwa, dan beberapa sungai kecil serta anak-anak sungai lainnya. Saat ini, sungai-sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sarana transportasi ke berbagai kawasan, sumber air bersih dan kebutuhan sehari-hari penduduk untuk mandi, cuci, dan untuk kegiatan lainnya.

Kabupaten Barito Timur terletak pada daerah beriklim tropis. Sebagai daerah beriklim tropis, wilayah Kabupaten Barito Timur rata-rata mendapat penyinaran matahari lebih dari 50% sepanjang tahun, udara relatif panas, yaitu mencapai 34 oC dan malam hari 21 o C. Untuk rata-rata curah hujan relatif tinggi yaitu mencapai 228,9 mm perbulan.

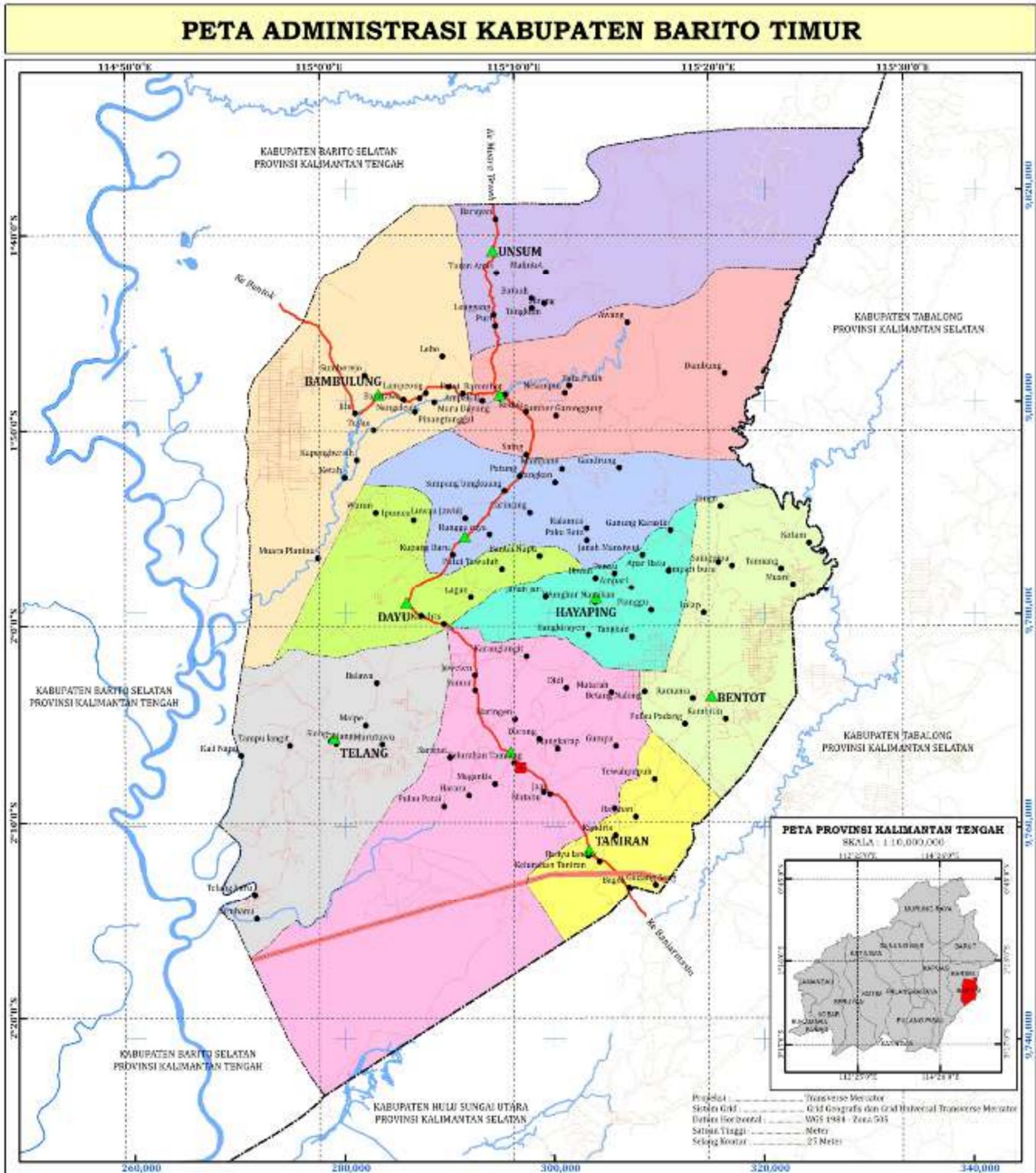
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180, Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah Kabupaten Barito Timur adalah 3.834 Km<sup>2</sup> atau 383.400 Ha dengan cakupan wilayah terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan terbagi menjadi 3 (tiga) Kelurahan, 100 (seratus) desa termasuk Unit Pemukiman Transmigrasi. Kecamatan - Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Benua Lima (6 Desa dan 1 Kelurahan), Kecamatan Dusun Timur (16 Desa dan 1 Kelurahan), Kecamatan Paju Epat (9 Desa ), Kecamatan Awang (11 Desa ), Kecamatan Patangkep Tutui (10 Desa), Kecamatan Dusun Tengah ( 7 Desa, 1 Kelurahan). Kecamatan Raren Batuah ( 9 Desa), Kecamatan Paku ( 12 Desa), Kecamatan Paku ( 12 Desa), Kecamatan Karusen Janang ( 7 Desa) dan Kecamatan Pematang Karau (13 Desa).

### **Wilayah Kajian SSK**

Wilayah kajian Implementasi SSK meliputi seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari 3 kelurahan dan 100 desa. Wilayah administrasi Kabupaten Barito Timur beserta batas administrasinya ditunjukkan pada berikut.

**Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Timur**



<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR</b></p> <p><b>SKALA : 1:350,000</b></p> <p>0 3,750 7,500 15,000 22,500 30,000 Meters</p> <p><b>SUMBER PETA :</b>                  Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000 Update tahun 2006 yang direvisi oleh BAKOSURTANAL ;                  Peta Citra Aerial Kabupaten Barito Timur Tahun 2012 ;                  Peta Fungsi Kawasan Hutan SK Mestri, Kalimantan Nomor SK. 529/Mestri-II/2012 Tanggal 25 September 2012 ;                  Peta Lingkungan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2003 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah ;                  Peta Lingkungan Perda Kabupaten Barito Timur Nomor 05 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034.</p> <p><b>CARAAN :</b>                  - Atribut output dari geoprocesor contour di daerah berbukit lebih adalah hasil penarikan.                  - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi kecamatan, kabupaten, dan provinsi.</p>	<p><b>KETERANGAN :</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Batas Administrasi :</b></td> <td><b>Perairan dan Permukiman :</b></td> <td><b>Kecamatan :</b></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ibukota Kabupaten</li> <li>▲ Ibukota Kecamatan</li> <li>• Desa</li> <li>--- Batas Provinsi</li> <li>----- Batas Kabupaten</li> <li>----- Batas Kecamatan</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sungai Musiman</li> <li>— Sungai Kecil</li> <li>— Sungai Besar</li> <li>○ Dam/Di/Waduk</li> <li>▲ Gunung</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kec. Awang</li> <li>■ Kec. Benua Lima</li> <li>■ Kec. Dusun Tengah</li> <li>■ Kec. Dusun Timur</li> <li>■ Kec. Karusen Janang</li> <li>■ Kec. Paju Epat</li> <li>■ Kec. Paku</li> <li>■ Kec. Patangkep Tutul</li> <li>■ Kec. Pematang Karau</li> <li>■ Kec. Reren Batuah</li> </ul> </td> </tr> </table> <p><b>Jaringan Jalan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Jalan Kolektor</li> <li>— Jalan Lokal</li> <li>— Jalan Lain</li> <li>— Jalan Eks. Pertamina</li> <li>— Jalan PT. Adaro Indonesia</li> </ul>	<b>Batas Administrasi :</b>	<b>Perairan dan Permukiman :</b>	<b>Kecamatan :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ibukota Kabupaten</li> <li>▲ Ibukota Kecamatan</li> <li>• Desa</li> <li>--- Batas Provinsi</li> <li>----- Batas Kabupaten</li> <li>----- Batas Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Sungai Musiman</li> <li>— Sungai Kecil</li> <li>— Sungai Besar</li> <li>○ Dam/Di/Waduk</li> <li>▲ Gunung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kec. Awang</li> <li>■ Kec. Benua Lima</li> <li>■ Kec. Dusun Tengah</li> <li>■ Kec. Dusun Timur</li> <li>■ Kec. Karusen Janang</li> <li>■ Kec. Paju Epat</li> <li>■ Kec. Paku</li> <li>■ Kec. Patangkep Tutul</li> <li>■ Kec. Pematang Karau</li> <li>■ Kec. Reren Batuah</li> </ul>
<b>Batas Administrasi :</b>	<b>Perairan dan Permukiman :</b>	<b>Kecamatan :</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ibukota Kabupaten</li> <li>▲ Ibukota Kecamatan</li> <li>• Desa</li> <li>--- Batas Provinsi</li> <li>----- Batas Kabupaten</li> <li>----- Batas Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Sungai Musiman</li> <li>— Sungai Kecil</li> <li>— Sungai Besar</li> <li>○ Dam/Di/Waduk</li> <li>▲ Gunung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kec. Awang</li> <li>■ Kec. Benua Lima</li> <li>■ Kec. Dusun Tengah</li> <li>■ Kec. Dusun Timur</li> <li>■ Kec. Karusen Janang</li> <li>■ Kec. Paju Epat</li> <li>■ Kec. Paku</li> <li>■ Kec. Patangkep Tutul</li> <li>■ Kec. Pematang Karau</li> <li>■ Kec. Reren Batuah</li> </ul>					

**Tabel Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah  
per-Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ desa		Luas terbangun (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah rumah tangga		Kepadatan terbangun (Jiwa/Ha)
		Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaa n	Perkotaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	BENUA LIMA	7	0	3.096	6.336	0	1.585	0	2,05
2	DUSUN TIMUR	16	1	11.141,36	18.121	10.747	4.536	2.687	2,59
3	PAJU EPAT	9	0	14.883,6	6.270	0	1.571	0	0,42
4	AWANG	11	0	2.436	6.101	0	1.529	0	2,50
5	PATANGKEP	10	0	3.060	7.117	0	1.783	0	2,33
6	DUSUN TENGAH	5	3	7.560,8	6.059	18.399	1.517	4.601	3,23
7	RAREN BATUAH	9	0	2.232	8.551	0	2.142	0	3,83
8	PAKU	12	0	3.264	8.686	0	2.177	0	2,66
9	KARUSEN	7	0	2.136	5.312	0	1.332	0	2,49
10	PEMATANG KARAU	13	0	6.948	13.358	0	3.345	0	1,92
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>56.757,7</b>	<b>85.911</b>	<b>29.146</b>	<b>21.517</b>	<b>7.288</b>	<b>24,03</b>

Sumber : Data BPS Kabupaten Barito Timur 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya terdapat 3 (tiga) daerah yang termasuk perkotaan di Kabupaten Barito Timur, yaitu Kelurahan Taniran, Kelurahan Dusun Timur, dan Kelurahan Ampah Kota. Sedangkan total area terbangun hanya sebesar 14,80 % dari total luas administrasi kabupaten, dengan Kecamatan Paju Epat adalah Kecamatan dengan area terbangun terbesar dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu 14.833,60 Ha atau 3,87% dari total luas administrasi Kabupaten Barito Timur.

### **Kependudukan**

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Timur tahun 2021 tercatat 115.057 Jiwa, yang terdiri dari 59.026 jiwa (51,30%) berjenis kelamin laki-laki dan 56.031 Jiwa (48,70%) perempuan.

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada pada tahun 2021 dapat diketahui, bahwa penyebaran penduduknya tidak merata ke setiap wilayah dimana Kecamatan Dusun Tengah memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni sebesar

24.458 jiwa dengan proporsi jumlah penduduk laki-laki lebih besar yakni 12.447 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yakni 12.011 jiwa. Jumlah penduduk terkecil dimiliki oleh Kecamatan Karusen Janang yakni sebesar 5.312 jiwa dengan proporsi jumlah penduduk laki-laki yakni 2.747 jiwa dan jumlah penduduk perempuan yakni 2.565 jiwa.

Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Barito Timur tahun 2021 di wilayah area terbangun adalah di wilayah Kecamatan Raren Batuah yaitu 3,83 jiwa/Ha. Kecamatan lain dengan kepadatan penduduk tinggi adalah kecamatan Dusun Tengah yaitu 3,23 jiwa/Ha, Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Paju Epat 0,42 jiwa/Ha.

### **Jumlah Penduduk Miskin**

Sumber data jumlah penduduk miskin diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mencakup data penduduk miskin per Kecamatan di Kabupaten Barito Timur

**Tabel Jumlah penduduk miskin per kecamatan**

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Keluarga miskin (Rumah Tangga)</b>
Banua Lima	243
Dusun Timur	1199
Paju Epat	231
Awang	587
Patangkep Tutui	597
Dusun Tengah	1569
Raren Batuah	770
Paku	729
Karusen Janang	372
Pematang Karau	1720
<b>JUMLAH</b>	<b>8015</b>

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DtkS) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

## **Kebijakan Penataan Ruang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 – 2034 bahwa tujuan dari penataan ruang Kabupaten Barito Timur yaitu bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten yang berkembang dan sejahtera serta berjati diri melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimum dengan berbasis agrobisnis serta berwawasan lingkungan.

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur, Meliputi:

1. pemerataan ekonomi Kabupaten;
2. pengembangan pusat-pusat pemukiman;
3. dan pengembangan infrastruktur;
4. peningkatan produksi pertanian;
5. peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agropolitan;
6. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
7. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

## **Strategi Penataan Ruang**

1. Strategi yang dilakukan untuk pemerataan ekonomi Kabupaten meliputi:
  - a. Membuat pola dan struktur ruang yang terpadu untuk pengembangan ekonomi;
  - b. Membangun dan meningkatkan sistem prasarana transportasi darat untuk membuka aksesibilitas antar kecamatan, kelurahan dan desa serta sentra-sentra produksi secara terencana dan terpadu;
  - c. Mengembangkan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi melalui pengembangan jaringan jalan, terminal, transportasi darat, dan transportasi udara sebagai simpul transportasi;
  - d. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air untuk menunjang kegiatan perkotaan;

- e. Mengembangkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan secara fungsional; dan
  - f. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kecamatan sebagai simpul produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
2. Strategi yang dilakukan dalam pengembangan pusat-pusat pemukiman meliputi:
- a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui
  - b. Pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
  - c. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan sebagai pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
  - d. Meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi dan sarana pendukungnya;
  - e. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama di kawasan pusat pertumbuhan di ampah sebagai pkp yang dipromosikan ke provinsi kalimantan tengah;
  - f. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pariwisata.
3. Strategi yang diperlukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan infrastruktur meliputi:
- a. Membangun sarana dan prasarana transportasi darat;
  - b. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi;

- c. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana jaringan air bersih;
  - d. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana energi; dan
  - e. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan.
4. Strategi yang diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian meliputi:
- a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
  - b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
  - d. Memperkuat strategi pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
5. Strategi yang diperlukan untuk peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agropolitan meliputi:
- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
  - b. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif;
  - c. Meningkatkan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya terutama peran jasa pengelolaan lingkungan dan pertanian secara umum untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah;

- d. Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
  - e. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan);
  - f. membangun sarana dan prasarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang.
6. Strategi yang diperlukan dalam rangka penguatan dan pemulihan kawasan lindung meliputi:
- a. Meningkatkan fungsi kawasan lindung di dalam dan di luar kawasan hutan;
  - b. Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
  - c. Membatasi pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi lahan kawasan lindung;
  - d. Mendayagunakan kawasan lindung dalam kawasan hutan dan non kawasan hutan secara optimum melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada kawasan lindung; dan
  - f. Mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan.
7. Strategi yang diperlukan dalam rangka peningkatan fungsi untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. Mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar Kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
  - b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan

- c. Memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

## **Rencana Struktur Ruang Wilayah**

### **I. Bagian Kesatu, tentang Gambaran Umum**

- Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
  - a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000.

### **II. Bagian Kedua, tentang Pusat-Pusat Kegiatan**

- Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Barito Timur, meliputi:
  - a. PKL, terdapat di Kota Tamiang Layang;
  - b. PKLp, yaitu terdapat di Kota Ampah.
  - c. PPK, Meliputi:
    - ✓ Hayaping di Kecamatan Awang;
    - ✓ Bentot di Kecamatan Patangkep Tutui;
    - ✓ Taniran di Kecamatan Benua Lima;
    - ✓ Unsum di Kecamatan Raren Batuah;
    - ✓ Tampa di Kecamatan Paku;
    - ✓ Dayu di Kecamatan Karusen Janang; dan h. Telang di Kecamatan Paju Epat.
  - d. PPL, meliputi:
    - ✓ PPL Bamban berada di Kecamatan Benua Lima;
    - ✓ PPL Ampari Bura berada di Kecamatan Patangkep Tutui;
    - ✓ PPL Simpang Didi berada di Kecamatan Dusun Timur;
    - ✓ PPL Patung berada di Kecamatan Paku;
    - ✓ PPL Tuyau berada di Kecamatan Pematang Karau; dan f. PPL Baruyan berada di Kecamatan Raren Batuah.

- e. Bagian wilayah Kabupaten yang akan disusun rencana detail tata ruangnya meliputi:
- ✓ bagian wilayah Kabupaten yang merupakan ibukota Kabupaten; dan
  - ✓ bagian wilayah Kabupaten yang merupakan pusat-pusat kecamatan.

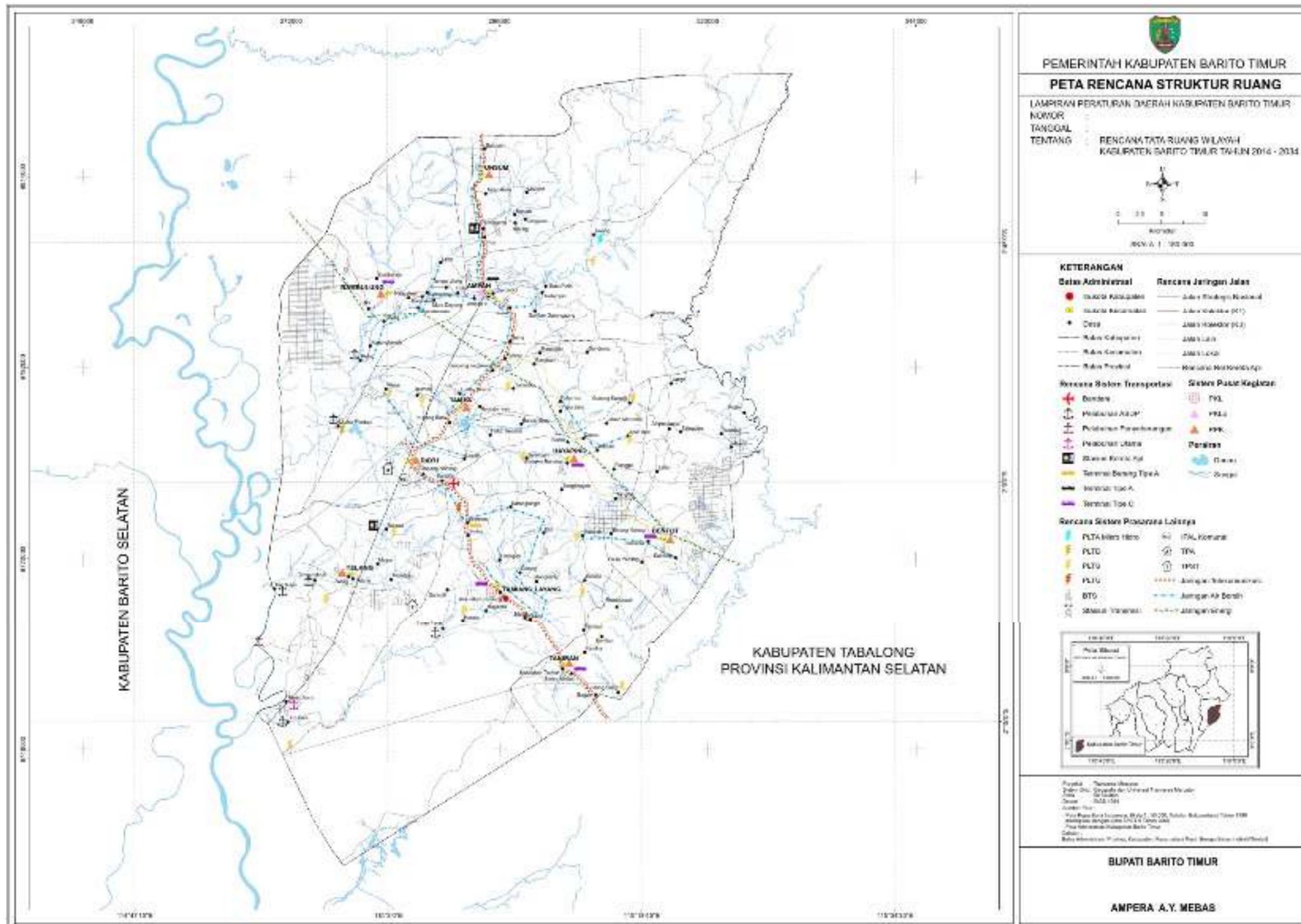
### III. Bagian Ketiga, Sistem Jaringan Prasarana Utama

- Pengembangan sistem jaringan prasarana utama meliputi:
  - ✓ sistem jaringan transportasi darat;
  - ✓ sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan
  - ✓ sistem jaringan transportasi udara.

### IV. Bagian Keempat, Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud meliputi :
  - ✓ sistem jaringan energi;
  - ✓ sistem jaringan telekomunikasi;
  - ✓ sistem jaringan sumber daya air; dan
  - ✓ sistem jaringan prasarana lingkungan.

**Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Barito Timur**



Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2014 RTRW Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 – 2034

## **Pola Ruang**

### **I. Bagian Kesatu, Gambaran Umum meliputi :**

- Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Barito Timur meliputi:
  - ✓ rencana kawasan lindung;
  - ✓ rencana kawasan budidaya; dan
  - ✓ rencana kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya (Holding Zone).
- Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000.

### **II. Bagian Kedua, tentang Kawasan Lindung**

- Kawasan lindung terdiri atas:
  - ✓ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - ✓ kawasan perlindungan setempat;
  - ✓ kawasan rawan bencana alam; dan
  - ✓ kawasan lindung lainnya.

### **III. Bagian Ketiga, Kawasan Budidaya**

- Kawasan budidaya terdiri atas:
  - ✓ kawasan peruntukan hutan produksi;
  - ✓ kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - ✓ kawasan peruntukan pertanian;
  - ✓ kawasan peruntukan perkebunan;
  - ✓ kawasan peruntukan perikanan;
  - ✓ kawasan peruntukan pertambangan;
  - ✓ kawasan peruntukan permukiman perkotaan h. kawasan peruntukan permukiman perdesaan i. kawasan peruntukan industri;
  - ✓ kawasan peruntukan pariwisata;
  - ✓ kawasan peruntukan lainnya.

### **IV. Bagian Keempat, Kawasan Yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (*Holding Zone*)**

- Kawasan *Holding Zone* sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- ✓ kawasan peruntukan permukiman perkotaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
- ✓ kawasan peruntukan permukiman perdesaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
- ✓ kawasan peruntukan perkebunan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan.
- ✓ Kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan luas 1.571,97 Hektar berada di wilayah Kecamatan Paju Epat dan Kecamatan Patangkep Tutui.
- ✓ Kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan luas 383,54 Hektar berada di wilayah Kecamatan Patangkep Tutui.
- ✓ Kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 826,02 Hektar berada di wilayah Kecamatan Paju Epat dan Kecamatan Patangkep Tutui.



## **2.2. Profil Sanitasi Saat ini**

### **2.2.1. Air Limbah Domestik**

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Barito Timur baik dari aspek teknis maupun aspek non teknis dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Sistem dan Infrastruktur**

Pengolahan air limbah permukiman secara umum di Kabupaten Barito Timur ditangani melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ataupun melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Air limbah domestik diolah melalui SPALD-S dengan menggunakan tangki septic individual maupun secara komunal. Sistem air limbah yang dikelola oleh masyarakat (rumah tangga) terbatas pada pelayanan pembuangan kotoran rumah tangga (black water) yang berasal dari jamban dengan cara ditampung dalam tangki septic dan cubluk. Sedangkan buangan air limbah rumah tangga (grey water) dialirkan ke saluran drainase jalan, kebun atau lahan kosong yang ada disekitar pemukiman. Pada permukiman yang berada di tepian sungai, air limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke badan air / sungai. Warga yang tidak memiliki jamban masih melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di kebun, sungai dan tanah lapang. Jamban yang dimiliki warga juga ada yang telah menggunakan tangki septic yang sehat tetapi masih ada juga yang menggunakan cubluk.

**Tabel Capaian Akses Air Limbah Domestik  
Kabupaten Barito Timur Tahun 2022**

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
<b>A</b>	<b>Akses Aman</b>	0,70%
<b>B</b>	<b>Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)</b>	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	5,50%
	Akses Layak Bersama	0,20%
<b>C</b>	<b>Akses Belum Layak* BABS Tertutup</b>	12,80%
<b>D</b>	<b>BABS di Tempat Terbuka</b>	6,30%
Wilayah Perdesaan		
<b>A</b>	<b>Akses Aman</b>	0,00%
<b>B</b>	<b>Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)</b>	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	16,70%
	Akses Layak Bersama	3,70%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	45,40%
<b>C</b>	<b>Belum Layak BABS Tertutup</b>	0,00%
<b>D</b>	<b>BABS di Tempat Terbuka</b>	9,10%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Dari tabel di atas pada wilayah perkotaan capaian akses aman sebesar 0,70%, akses belum layak (BABS tertutup) sebesar 12,80% dan BABS di tempat terbuka sebesar 6,30%. Sedangkan pada wilayah perdesaan capaian akses aman sebesar 0,00%, Belum layak (BABS tertutup) sebesar 0% dan BABS di tempat terbuka sebesar 9,10%. Pada tingkat Kabupaten Barito Timur, capaian akses aman sebesar 0,70%, akses layak sebesar 85%, akses belum layak BABS tertutup sebesar 12,8% dan BABS di tempat terbuka 15,4%.

**Tabel Subsistem Pengangkutan SPALD-Setempat**

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	<b>Pemerintah Daerah</b>		
2	Jumlah truk tinja	Unit	0
3	Status aset	Serah terima aset atau pembelian sendiri (UPTD)	
4	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	0
5	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
6	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0
	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0
1	<b>Swasta</b>		
2	Jumlah truk tinja	Unit	0
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	0
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0
	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

**SPALDS-Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja**

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
	<b>SPALD-S</b>		
1	Nama IPLT	Tidak Ada	
2	Status aset	Belum Proses	
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	0
4	Tahun Pembangunan	0	
5	Tahun Rehabilitasi	0	
6	Wilayah Ckupan Pelayanan	0	
7	Wilayah layanan terdekat	Km	0
8	Wilayah layanan terjauh	Km	0
	<b>Deskripsi IPLT</b>		
1	Sistem yang digunakan	Tidak ada – Tidak Ada – Tidak Ada – Tidak Ada	
2	Kondisi IPLT	Tidak Ada	
3	Kualitas Effluen	1	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses	Belum Memadai (Aspal dan tanah)	

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

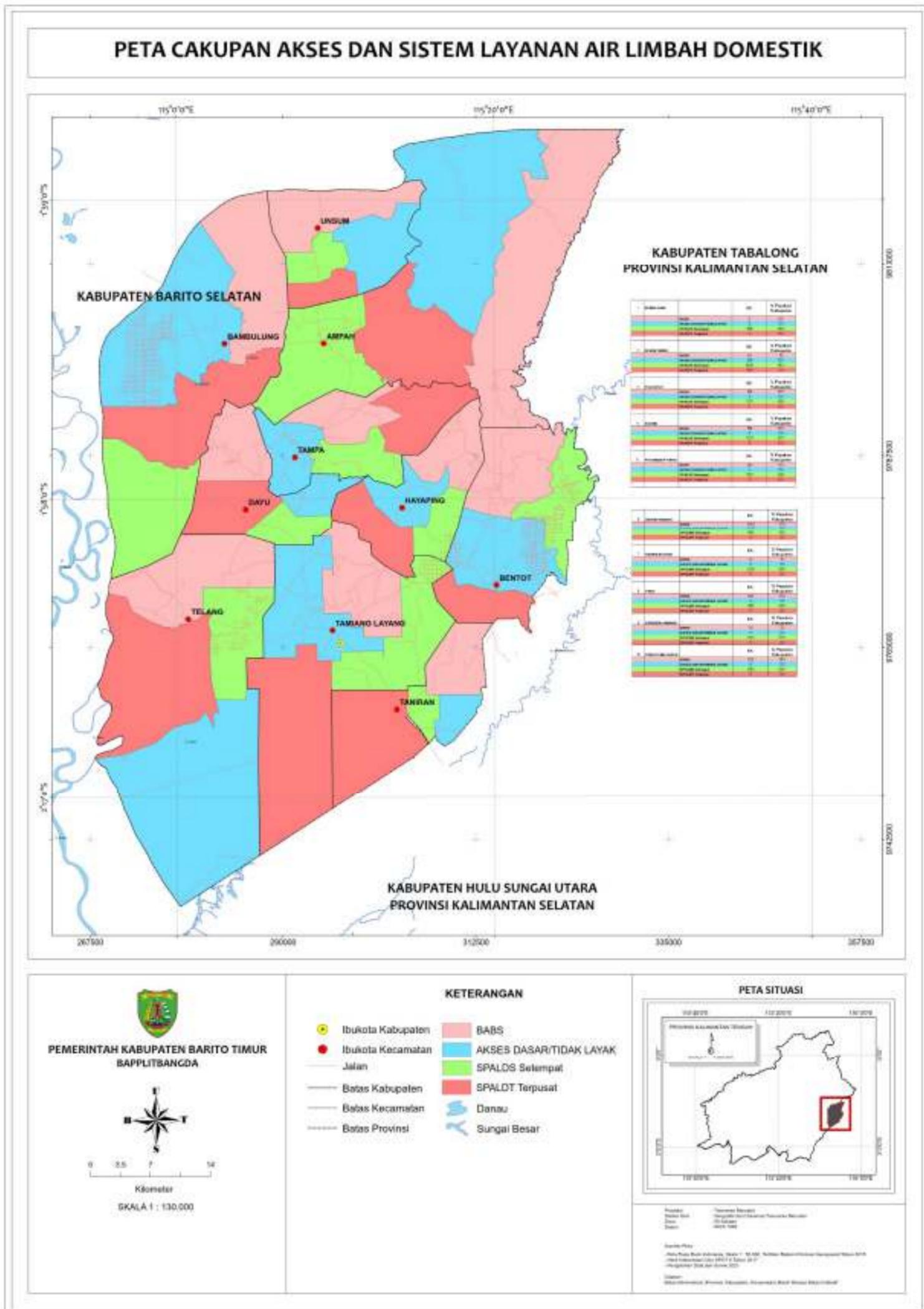
**Tabel sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat**

Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (baik/rusak)	Pengelola (Dinas/UPTD/Masyarakat)	Pengecekan Effluent (dilakukan/tidak dilakukan)	Status Aset
IPAL Pondok Karet	Tamiyang Layang	2017	-	250	200	Anaerobic baffled reactor- bak pengendapan kedua	Baik	Dinas	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset

**FOTO DOKUMENTASI SPALD-T**

	
<p>Foto 1 : (foto diambil 15 Juni 2022)</p>	<p>Foto 2 : (foto diambil 15 Juni 2022)</p>

**Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik**



Sumber : Pokja PKP Kabupaten Barito Timur

Keterangan:

- A : Praktik BABS dan Pembuangan Langsung (Direct Discharge)
- B : Wilayah Perdesaan → Akses Dasar  
Wilayah Perkotaan → Tidak terhitung sebagai akses (BABS)
- C : SPALD Setempat
- D : SPALD Terpusat

### Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah Domestik berdasarkan target RPJMN 2021-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2021	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan	Kabupaten BARITO TIMUR	Kabupaten BARITO TIMUR			
1	Akses Aman	15%	8,0%	2,0%	1,6%	0,7%	1,3%	0,9%
2	Akses Layak	98%	80,0%	72,0%	78,2%	72,2%	-8,2%	-2,0%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	65,0%	60,0%	22,2%	-42,8%	37,8%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	3,0%	3,0%	3,9%	-4,9%	-0,9%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	2,0%	5,6%	45,4%	-43,4%	-38,8%
3	Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,8%	-12,8%	-12,8%
4	BABS Tertutup	0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,4%	-15,4%	-15,4%
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,4%	-15,4%	-15,4%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa untuk capaian akses aman Tahun 2021 sebesar 0,70%. Gap akses aman terhadap target RPJMN Tahun 2024 yaitu sebesar 1,3%, sedangkan gap akses aman terhadap target jangka pendek sebesar 0,9%. Capaian akses layak Tahun 2021 sebesar 72,2%. Gap akses layak terhadap target RPJMN Tahun 2024 yaitu sebesar -0,2%, sedangkan gap akses layak terhadap target jangka pendek sebesar -2,0%. Belum layak BABS tertutup sebesar -12,8% dan masyarakat masih BABS di tempat terbuka sebesar -15,40%.

### Data Target Desa Stop BABS (SBS)

NO	KOMPONEN	TARGET RPJMN	TARGET - 2024 (%)		TARGET JANGKA PENDEK (2023)	CAPAIAN TAHUN 2021	GAP (%) TERHADAP TARGET 2024
			PROVINSI	BARITO TIMUR			
1	Akses Desa SBS	90	91	92	80	72	20

Sumber: Analisis POKJA

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa untuk capaian Akses Desa SBS tahun 2021 sebesar 72%. Gap Akses terhadap target 2024 (Barito Timur) yaitu sebesar 20% dimana data Target 2024 Barito Timur sebesar 92% , Gap terhadap target 2024 (Provinsi) sebesar 19% dimana target 2024 Provinsi sebesar 91% dan terhadap target RPJMN masih sebesar 18% dimana target RPJMN sebesar 90%.

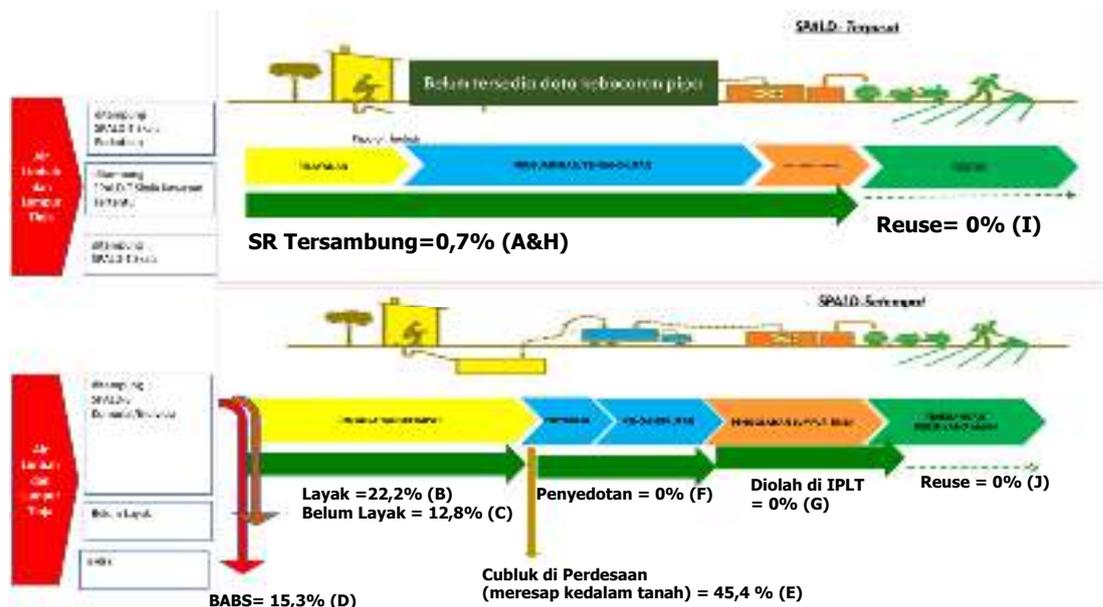
### Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

Infrastruktur	Persentase
<b>SPALD-S</b>	
Kapasitas Penggunaan IPLT	0,00%
Kapasitas penggunaan truk	0,00%

Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	0,00%
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	0,00%
Kapasitas IPLT terhadap total RT	0,00%
<b>SPALDT</b>	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	80%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	0,00%
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	0,00%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

### Analisis Rantai Layanan Sanitasi



A	Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat	Dinas PU	0,70%
H	Persentase air limbah diolah di IPAL T skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran =0)	Dinas PU	0,70%
I	Persentase effluent terproses baik di IPAL	Dinas LH/UPT	0,00%
B	Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak	Dinas PU	22,20%
C	Persentase penduduk memiliki akses belum layak	STBM	12,80%
E	Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan	STBM	45,40%
F	Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut	Dinas LH	0,00%
G	Persentase debit lumpur tinja diangkat dan diolah di IPLT	Dinas LH	0,00%
J	Persentase effluent terproses baik di IPLT	Dinas LH/UPT	0,00%
D	Persentase BABS (di tempat terbuka)	STBM	15,30%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

### Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Dari rantai layanan di atas, Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat 0,7%, Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak 22,20%. Persentase penduduk memiliki akses belum layak 12,80%, Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan 45,40%. Persentase penduduk yang tangki septiknya

pernah disedot dan diangkut 0%. Persentase BABS (di tempat terbuka) 15,30%.

## **2) Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan**

### **a. Kelembagaan Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah SKPD yang diberi kewenangan dan pengelolaan air limbah di Kabupaten Barito Timur. Dalam pengelolaan air limbah domestik ini, Bidang Air Minum dan PLP, Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) merupakan seksi yang diberi kewenangan dalam mengelola air limbah.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga berperan dalam pencapaian desa Open Defecation Free (ODF) atau bebas Buang Air Besar melalui program STBM yang merupakan salah satu target dalam Universal Akses. Dalam hal ini, Bidang Kesehatan Masyarakat melalui Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga yang memiliki tugas dan fungsi tersebut.

Guna mendukung penatalaksanaan ini dengan baik perlu adanya regulasi baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Namun Sejauh ini, belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur penatalaksanaan air limbah domestik di Kabupaten Barito Timur.

Berikut tabel pemetaan dinas terkait sanitasi sektor air limbah domestik di Kabupaten Barito Timur :

**Tabel Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah**

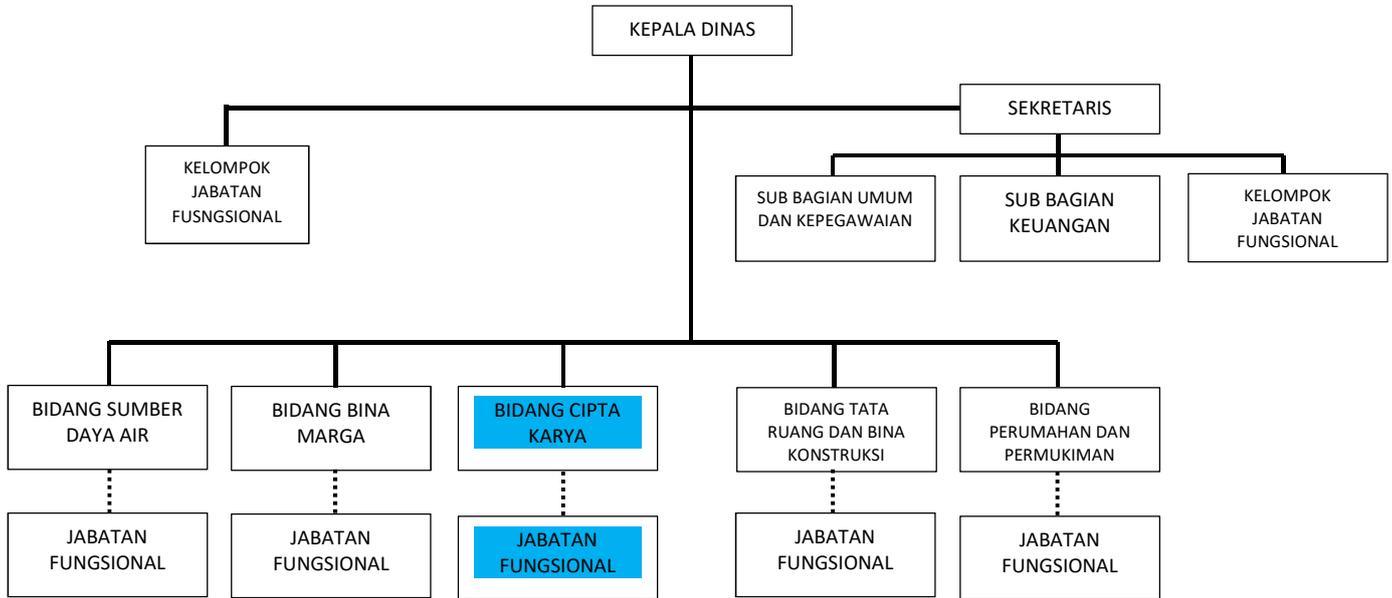
<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Tugas dan Fungsi</b>
<b>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<p><b>A. Bidang Air Minum dan PLP</b></p> <p><b>1. Tugas :</b> Tugas pokok Seksi Pelaksanaan PLP Dan Air minum pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur adalah penyiapan bahan untuk melaksanakan pengaturan air bersih, pengendalian, pembinaann penyusunan rencana pengembangan pemanfaatan air minum dan sanitasi.</p>
	<p><b>2. Fungsi :</b></p> <p>a. Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Seksi Pelaksanaan PLP Dan Air minum berdasarkan proritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;</p>
	<p>b. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pelaksanaan PLP Dan Air Minum dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;</p>
	<p>c. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pelaksanaan PLP Dan Air Minum berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;</p>
	<p>d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang pelaksanaan PLP dan air minum;</p>
	<p>e. Melaksanakan penyusunan pengembangan pemanfaatan air minum dan sanitasi;</p>
	<p>f. Mengolah data PLP dan Air Minum ;</p>
	<p>g. Menyiapkan bahan bahan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan dan pemukiman;</p>

	h. Menyusun rencana biaya di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
	i. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
	j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelaksanaan PLP Dan Air Minum baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
	k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya.
<b>2. Dinas Kesehatan</b>	<p><b>A. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga</b></p> <p>1. Tugas :</p> <p>a. Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.</p>
	<p><b>2. Fungsi :</b></p> <p>a. perencanaan kegiatan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;</p>
	b. pelaksanaan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
	c. pembagian pelaksanaan tugas Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
	d. pengawasan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

	e. pelaporan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
	f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

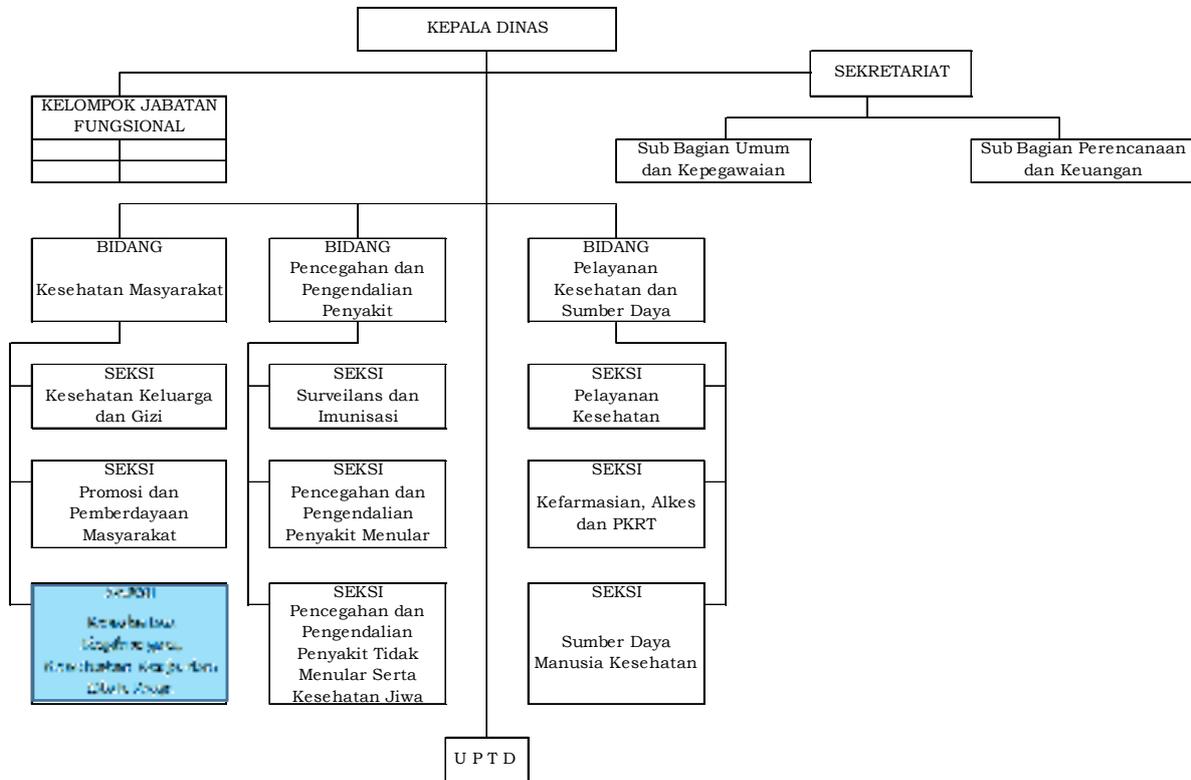
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang & Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kawasan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Barito Timur

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur

Dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Barito Timur, perencanaan, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Kesehatan. Sedangkan pengadaan sarana selain Pemerintah Kabupaten dapat juga dilakukan oleh pihak swasta maupun masyarakat. Sudah terdapat outline plan pengelolaan air limbah domestik yang disusun pada tahun 2016 sebagai dokumen induk pengembangan layanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Barito Timur. Namun Belum terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Barito Timur, termasuk peraturan daerah mengenai retribusi pengelolaan air limbah domestik.

### **Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah**

FUNGSI	PEMERINTAH DAERAH		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
<b>AIR LIMBAH DOMESTIK</b>			
<b>PERENCANAAN</b>			
Menyusun target pengelolaan air limbah Domestik skala Kabupaten/kota	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
<b>PENGADAAN SARANA</b>			
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Menyediakan sarana pengumpulan dan pengolahan awal (tangki septik)	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Membangun sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumur ke IPAL (pipa kolektor)	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya		

<b>PENGLOLAAN</b>			
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	-	-	-
Mengelola IPLT dan atau IPAL	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	-	-	-
Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestic	-	-	-
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB	Bidang Cipta Karya	-	-
<b>PENGATURAN DAN PEMBINAAN</b>			
Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	-	-	-
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	-	-	-
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik	-	-	-
<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum/Bidang Cipta Karya	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestic	-	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur

**b. Kelembagaan Masyarakat**

IPAL yang telah dibangun dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kabupaten Barito Timur berdasarkan data dari tahun 2015-2022 belum pernah ada dilaksanakan, namun masih berfokus ke arah SPALDS berupa tangki septik individual, tangki septik komunal dan MCK terdapat KSM yang tidak aktif dalam pengelolaannya terkendala dengan penerapan iuran perbulan sehingga sangat diperlukan pembinaan dari Instansi terkait, dalam hal ini Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Barito Timur.

**Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah**

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	MCK Komunal	2010	KSM Tamiang Layang/ 600/90/DPU-BT/CK/VI/2010	8 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Tamiang Layang	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - Disperindag	Aktif
2	Tangki Septik Komunal	2018	KSM Desa Magantis/ 600/108/DPUPR-BT/CK/VI/2018	5 Orang	Perawatan dan Pemeliharaan	Magantis	Iuran warga	Sambungan Rumah (SR) dan Tangki Septik - DPUPRPerkim	Aktif
3	MCK Komunal	2018	KSM Tamiang layang/ 600/107/DPUPR-BT/CK/VI/2018	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Tamiang Layang	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
4	MCK Komunal	2015	KSM Desa Magantis/ 600/115/DPU-BT/CK/VI/2015	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Magantis	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
5	MCK Komunal	2013	KSM Tamiang Layang/ 600/97/DPU-BT/CK/VI/2013	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Tamiang Layang	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
6	Tangki Septik Komunal	2017	KSM Desa Tampu langit/ 600/121/DPUPR-BT/CK/VI/2017	5 Orang	Perawatan dan Pemeliharaan	Tampu Langit	Iuran warga	Sambungan Rumah (SR) dan Tangki Septik - DPUPRPerkim	Aktif
7	MCK Komunal	2013	KSM Desa Tangkan/ 600/98/DPU-BT/CK/VI/2013	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Tangkan	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
8	MCK Komunal	2014	KSM Desa Rmania/ 600/135/DPU-BT/CK/VI/2014	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Rmania	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif

9	MCK Komunal	2014	KSM Desa Pulau Padang 600/136/DPU-BT/CK/VI/2014	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Pulau Padang	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
10	MCK Komunal	2015	KSM Desa Kambitin/ 600/114/DPU-BT/CK/VI/2015	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Kambitin	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
11	MCK Komunal	2010	KSM Ampah/ 600/89/DPU-BT/CK/VI/2010	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Ampah Kota	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
12	Tangki Septik Komunal	2018	KSM Desa Ampah Dua/ 600/101/DPUPR-BT/CK/VI/2018	5 Orang	Perawatan dan Pemeliharaan	Ampah Dua	Iuran warga	Sambungan Rumah (SR) dan Tangki Septik - DPUPRPerkim	Aktif
13	Tangki Septik Komunal	2018	KSM Desa Putai/ 600/101/DPUPR-BT/CK/VI/2018	5 Orang	Perawatan dan Pemeliharaan	Putai	Iuran warga	Sambungan Rumah (SR) dan Tangki Septik - DPUPRPerkim	Aktif
14	MCK Komunal	2012	KSM Desa Unsum/ 600/88/DPUPR-BT/CK/VI/2012	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Unsum	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
15	MCK Komunal	2012	KSM Desa Kalamus/ 600/87/DPUPR-BT/CK/VI/2012	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Kalamus	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif
16	MCK Komunal, Tangki Septik Komunal	2019	KSM Desa Tampa/ 600/116/DPUPR-BT/CK/VI/2019	5 Orang	Perawatan dan Pemeliharaan	Tampa	Iuran warga	Sambungan Rumah (SR) dan Tangki Septik - DPUPRPerkim	Aktif
17	MCK Komunal	2012	KSM Desa Luaw Jawuk/ 600/89/DPUPR-BT/CK/VI/2012	5 Orang	Kebutuhan Mandi, Cuci, kakus	Luaw Jawuk	Iuran warga	Infrastruktur Bangunan - DPUPRPerkim	Aktif

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Barito Timur

**c. Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah**

Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah perlu dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target akses air limbah domestik. Berikut tabel pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah berdasarkan kepentingan dan kekuatan/sumber daya yang dimiliki, pengaruh dan tingkat perlunya keterlibatan:

<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Kepentingan</b>	<b>Kekuatan/Sumberdaya</b>
<b>Anggota Legislatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislasi</li> <li>- Penganggaran</li> <li>- Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim anggaran terkait Alokasi APBD</li> <li>- Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah</li> </ul>
<b>Pengusaha / Swasta:</b> - PT. Adaro (Yayasan Bangun Negeri/YABN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan Penanganan sanitasi melalui program CSR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advokasi dalam peningkatan target akses layak dan aman dalam pemecuan STBM</li> </ul>
<b>BUMDes</b>	-	-
<b>Organisasi Massa (Ormas):</b> - Tidak Ada	-	-
<b>Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):</b> - Tidak Ada	-	-
<b>Tokoh Masyarakat</b> - Tidak Ada	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
<b>Anggota Legislatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi usulan terkait pengelolaan Air Limbah Domestik dalam APBD</li> <li>- Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan AirLimbah Domestik</li> </ul>	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
<b>Pengusaha / Swasta:</b> - PT. Adaro (Yayasan Bangun Negeri/YABN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan Penanganan sanitasi melalui program CSR</li> </ul>	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Tinggi	Ya
<b>Organisasi Massa (Ormas):</b> - Tidak Ada	-	-	-	-	-
<b>Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):</b> - Tidak Ada	-	-	-	-	-
<b>Tokoh Masyarakat</b> - Tidak Ada	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur

Sementara ini peran swasta dalam hal ini CSR masih sangat minim, PT. Adaro melalui Yayasan Bangun Negeri (YABN) telah berpartisipasi dalam Bantuan Penanganan sanitasi non teknis melalui program CSR yaitu Pemicuan STBM, Lomba desa STBM antar Desa, Lomba STBM antar Kabupaten ring 1 Adaro (Balangan, Barito Timur dan Tabalong), serta deklarasi ODF. Koordinasi Pemerintah Daerah dalam rangka merangkul Pihak Swasta untuk berpartisipasi menuntaskan permasalahan sanitasi harus ditingkatkan sehingga target capaian yang sudah ditetapkan dapat terwujud.

**d. Regulasi**

Hasil pemetaan regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Barito Timur dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

No			
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
		-	✓
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	Perbup No.22 Tahun 2016 tentang Bebas Buang Air Besar sembarangan Nol (BASNO)	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	-	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR Penyelenggaran Pengelolaan Air Limbah tentang Domestik	Ada	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	-	✓
b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	-	✓
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	-	✓

d	Substansi pembinaan dan pengawasan	-	✓
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
		-	✓
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	1. 2. 3. 4.	- - - -
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	Ada	Belum Ada
		-	✓

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur

### 3) Komunikasi dan Media

Pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan air limbah domestik sangat diperlukan agar peran serta masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana terbangun dapat berjalan dengan baik. Berikut Tabel Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygiene dan Sanitasi dan Tabel Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Air Limbah:

**Tabel Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygiene dan Sanitasi**

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Pemicuan STBM	2008 s/d 2022	Dinas Kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari-hari.	Masyarakat di 10.300 RT pada 103 Desa/Kelurahan	Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat itu menjijikan, memalukan dan membuat karenanya sakit, perlu kita	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal.
2	Verifikasi dan Deklarasi Desa ODF	2014	Dinas Kesehatan	Verifikasi desa yang akan melakukan deklarasi ODF atau desa yang dinyatakan ODF	Telah dilakukan Verifikasi Desa 58 Desa dan jumlah desa yang deklarasi RT pada 14 Desa/Kelurahan	masih banyak desa yang belum memenuhi kriteria desa ODF karena masih ada rumah tangga yang masih Buang Air Besar sembarangan.	Belum seluruh rumah tangga memiliki jamban sendiri dan masih BABs .
3	Pertemuan Advokasi STBM TK Kabupaten	2017	Dinas Kesehatan	Penguatan Advokasi STBM LS/LP dalam pencapaian Program STBM TK Kabupaten.	8 Dinas / Badan yang bergerak dalam Pokja Sanitasi Kabupaten .	Koordinasi LP/LS belum maksimal dalam percepatan desa STBM,	Perlunya dukungan LS/LP dan Pemangku Kepentingan untuk percepatan Desa ODF.
4	Study EHRA	2016, 2019	Dinas Kesehatan	Melakukan pendataan untuk mengetahui resiko kesehatan lingkungan tingkat Kabupaten Barito Timur	pada tahun 2016 jumlah desa 22 desa total sampel 880 KK, sedangkan tahun 2019 jumlah 104 desa 4.120 KK	Kurangnya data dukung khususnya faktor resiko kesehatan lingkungan di kabupaten Barito Timur	terbatasnya data base kesehatan lingkungan yang baik sebagai dasar untuk perencanaan program dan kegiatan Kinerja OPD di Kabupaten Barito Timur

5	Pemicuan Percepatan Desa berwawasan STBM dalam upaya penurunan Stunting	2019,2020, 2021, 2022	Dinas Kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari-hari dan penurunan angka stunting.	20 desa sasaran yang mengalami kategori stunting .	tingginya angka stunting Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat itu menjijikan, memalukan dan membuat karenanya sakit, perlu kita	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal dan medis komonikasi pendukung lainnya seperti sepanduk, baleho, dll, .
---	---	-----------------------	-----------------	--	--	---	--

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur

**Tabel Media Komunikasi dan Kerjasama terkait air limbah**

No	Jenis Media (a)	Khalayak (b)	Pendanaan (c)	Isu Yang diangkat (d)	Pesan Kunci (e)	Efektivitas ( f )
1	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur

### **2.2.2. Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Barito Timur baik dari aspek teknis maupun aspek non teknis dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Sistem dan Infrastruktur**

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan permasalahan yang akan terus menerus dihadapi baik oleh pemerintah Kabupaten maupun penduduknya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tidak akan terlepas dari bertambahnya jumlah volume sampah. Sementara tempat pembuangan akhir sampah semakin hari semakin penuh.

Pelayanan pengelolaan persampahan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Barito Timur saat ini masih terbatas pada daerah perkotaan saja, yaitu terbatas pada Kecamatan Dusun Timur. Wilayah pelayanan persampahan masih terpusat di wilayah Tamiyang Layang dan Ampah Kota dengan jumlah total 7.112 KK. Dari jumlah tersebut 2.447 KK atau 32,3% sampah rumah tangga ditangani dan dikelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping dan belum memiliki infrastruktur seperti sistem sanitary landfill/controlled landfill.

**Tabel Rekapitulasi Akses Pengelolaan Sampah Perkotaan**

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	0,10%
2	Penanganan Sampah	32,3%
3	Sampah Tidak Terkelola	67,6%
Total		100,0%

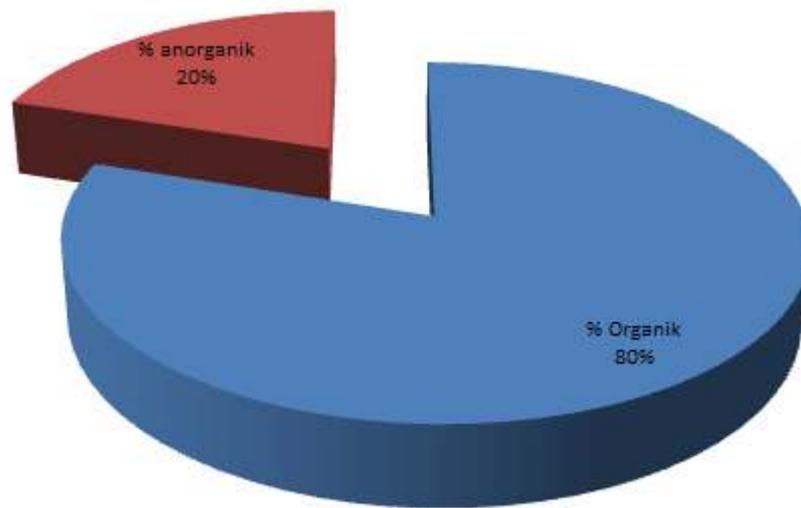
Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Kondisi pengelolaan sampah sebagian besar berada pada kategori cukup, karena layanan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup selaku pengelola layanan persampahan di Kabupaten Barito Timur hanya melayani wilayah perkotaan dan desa penopangnya, sehingga cakupannya masih sangat kecil dan belum menjangkau desa/kelurahan yang jauh dari perkotaan. Oleh karena itu sekolah yang berada di desa/kelurahan yang tidak terlayani pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri yaitu menimbun atau membakar sampah yang ada.

### **Timbulan Sampah**

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	83,88
	Perkotaan	ton/hari	20,74
	Perdesaan	ton/hari	63,15
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% anorganik	80,00
		% organik	20,00

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK



Di Kabupaten Barito Timur terdapat timbulan sampah rumah tangga sebanyak 83,88 ton/hari, meliputi : perkotaan sebanyak 20,74 ton/hari dan perdesaan sebanyak 63,15 ton/hari.

### Pengumpulan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	0
	Gerobak Motor	unit	1
	Pick Up	unit	0
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	0
	Gerobak Motor	m3	1,5
	Pick Up	m3	0
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	1

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Sarana prasarana pengumpulan yang dimiliki Kabupaten Barito Timur saat ini dalam menangani timbulan sampah adalah berupa Gerobak motor 1 unit. Rata-rata ritasi perhari untuk pengumpulan sebanyak 1 rit/hari.

Sistem pengumpulan sampah, meliputi :

1. Sistem pengumpulan sampah permukiman

Sistem pengumpulan sampah permukiman di bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama sampah domestik masyarakat langsung di buang ke TPS atau kontainer milik pemerintah kabupaten barito Timur dan yang kedua masyarakat mengumpulkan sampah di tempat/wadah yang diletakkan di depan rumah kemudian di angkut oleh petugas kontrak yang ditugaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur kemudian sampah tersebut di angkut ke TPS atau kontainer milik pemerintah kabupaten barito Timur. Alat angkut yang digunakan adalah gerobak motor dengan kapasitas  $\pm 1,5$  m<sup>3</sup>. Periodisasi pengumpulan sampah di permukiman wilayah perkotaan adalah setiap hari sekali. Sistem pengangkutan sampah di lakukan secara langsung dari sumber sampah menggunakan dumptruck dan melalui TPS selanjutnya diangkut ketempat Pemrosesan Akhir(TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping dan belum memiliki infrastruktur seperti sistem sanitary landfill/controlled landfill.

2. Sistem pengumpulan sampah pasar

Pewadahan sampah yang digunakan di areal pasar antara lain dibawah meja lapak-lapak oleh perdagangan kemudian petugas kebersihan memindahkan sampah tersebut ke keranjang sampah di bagian luar kumpulan lapak kemudian sampah tersebut diangkut untuk dibawa ke TPS yang biasanya dilakukan pada malam hari kemudian besok harinya sampah yang ada di TPS diangkut oleh dump truck langsung dibawa ke TPA yang masih menggunakan sistem open dumping dan belum memiliki infrastruktur seperti sistem sanitary landfill/controlled landfill. Kapasitas dump truck sekitar 4 meter kubik.

3. Sistem pengumpulan sampah pertokoan/ perdagangan/ jasa

Pewadahan sampah di areal ini berupa tempat sampah plastik dan tong sampah di sepanjang areal dimana belum terdapat pemilihan sampah organik maupun nonorganik. Sampah-sampah dihasilkan diangkut oleh

petugas kebersihan dengan menggunakan dump truck kemudian langsung dibuang ke TPA yang masih menggunakan sistem open dumping dan belum memiliki infrastruktur seperti sistem sanitary landfill/controlled landfill.

4. Sistem pengumpulan sampah fasilitas kesehatan

Pewadahan sampah yang digunakan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya menggunakan kantong plastik dimana sudah terdapat pemilihan antara sampah medis dan non medis. Pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas rumah sakit dengan menggunakan gerobak. Untuk sampah medis dikumpulkan dan diambil/diangkut oleh pihak ketiga, sedangkan sampah non medis akan diangkut menuju TPS.

5. Sampah perkantoran dan sekolah

Pewadahan sampah diareal lingkungan perkantoran dan sekolah berupa tempat sampah plastik dan tong sampah plastik dan tong sampah. Sampah-sampah yang dihasilkan diangkut oleh petugas kebersihan ke TPS, yang kemudian dengan menggunakan dump truck langsung dibuang di TPA yang masih menggunakan sistem open dumping dan belum memiliki infrastruktur seperti sistem sanitary landfill/controlled landfill.

Secara umum jumlah kendaraan yang digunakan sekarang masih belum maksimal melayani kebutuhan pengangkutan sampah. Perlu adanya penambahan sarana dan tenaga untuk memudahkan pengaturan frekuensi pengangkutan agar sampah yang menginap di TPS tidak terlalu lama dan menimbulkan gangguan bau yang tidak nyaman.

### Sarana Pengumpulan



### Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	Unit	0
	TPS	Unit	19
	Kontainer	Unit	6
	Tong Sampah Pejalan Kaki	Unit	0
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	0
	TPS	m3	2
	Kontainer	m3	4,5
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	0
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	Unit	0
	Arm roll truck	Unit	2
	Dump Truk	Unit	4
	Pick Up	Unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	0
	Arm roll truck	m3	8
	Dump Truk	m3	16
	Pick Up	m3	0
5	RitasI Pengangkutan	rit/hari	1

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Tempat penampungan sementara (TPS) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu berupa kontainer kecil yang berkapasitas 4,5 m<sup>3</sup> yang di distribusikan pada tempat tertentu. Sarana tempat penampungan sampah sementara terdapat sebanyak 6 buah yang kondisinya baik. Sedangkan alat angkut meliputi 2 buah truck armroll dan 4 buah dump truck. Pengangkutan sehari sebanyak 1 rit/hari.

**Sarana Penampungan Sementara**



## Pengolahan

No	Jenis Pengolahan	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Wilayah Cakupan Layanan	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	Tidak ada	Tidak ada	0	Tidak ada	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

**Pemrosesan Akhir**

No	Deskripsi	Satuan	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nama dan Lokasi TPA	0	Desa Lenggang Kec Raren Batuah
	Wilayah Pelayanan	0	Kecamatan Dusun Tengah dan Raren Batuah
2	Tahun pembangunan	0	2010
	Tahun Optimalisasi	0	0
	Usia Pakai TPA (tahun)	0	0
3	Status aset (pilih salah satu)	0	
		0	
		0	
4	Luas lahan efektif tersedia	Ha	1,2
5	Luas lahan efektif terpakai	Ha	1,2
6	Sistem TPA yang digunakan	Pilih	Open Dumping
7	Kondisi TPA	Pilih	Beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	0
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	0
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Perkerasan
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	3,82
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya: ....)	Ton/hari	0,3
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	0
14	Listrik	Gwh/hari	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)	0	Tidak Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	Km	3,1

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Kabupaten Barito Timur memiliki satu TPA didirikan pada tahun 2010 dengan area luas lahan TPA  $\pm$  1,2 Ha Berjarak 9,6 km dari kota Ampah dan merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.

**Tempat Pemrosesan Akhir**

	
<p>Keterangan Foto (diambil 06 Februari tahun 2022)</p>	<p>Keterangan Foto (diambil 06 Februari tahun 2022)</p>

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

### Pengurangan Sampah

No	Jenis Pengolahan (TPS 3R/Bank Sampah)	Lokasi	Kondisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (Jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/Daur Ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Terolah menjadi bahan baku/kompos	Jumlah sampah Residu yang dibawa ke TPA	Pengelola(KSM/Dinas/UPTD)	Status Aset
1	Bank Sampah	Tamiang Layang; (-2.0846744430697077, 115.14341566262998)	Beroperasi	2020	0	Daur ulang	0,1	0	0,02	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah Serah terima
2	TPS 3R	Desa Sarapat; (-2.093708180468479, 115.13065971514227)	Beroperasi	2021	0	Pengomposan dan Daur Ulang	0,7	0,08	0,63	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses
3	Bank Sampah	Desa Sarapat; (-2.09367, 115.1308)	Tidak beroperasi	2018	0	Daur ulang	0	0	0	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah Serah terima

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

**TPS 3R**

	
<p>Keterangan Foto (diambil tanggal 09 Juni tahun 2022)</p>	<p>Keterangan Foto (diambil tanggal 09 Juni tahun 2022)</p>

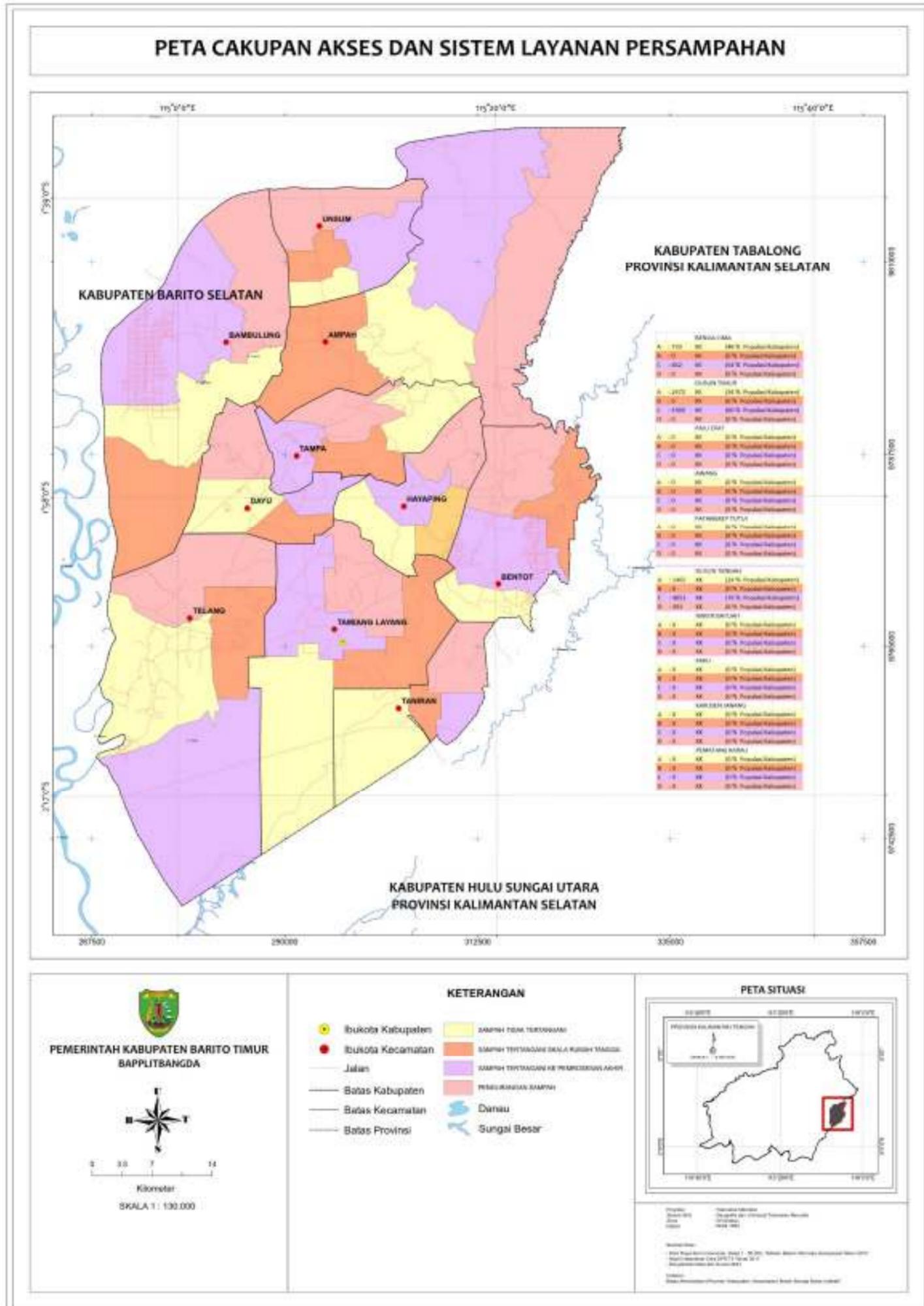
Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

**BANK SAMPAH**

	
<p>Keterangan Foto (tanggal 27 April tahun 2022)</p>	<p>Keterangan Foto (tanggal 27 April tahun 2022)</p>

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

**Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan**



Sumber : Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

**Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan target  
RPJMN 2021-2024**

No	Komponen	Target RPJMN 2020- 2024	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek Kabupaten BARITO TIMUR	Capaian (%) Tahun:202 1	GAP (%) Terhada p Target 2024	GAP (%) Terhada p Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimanta n Tengah	Kabupate n BARITO TIMUR				
1	Penangan an Sampah Perkotaan	80%	83,0%	71,0%	72,0%	32,3%	38,7%	39,7%
2	Penguranga n Sampah Perkotaan	20%	17,0%	28,0%	27,0%	0,1%	27,9%	26,9%

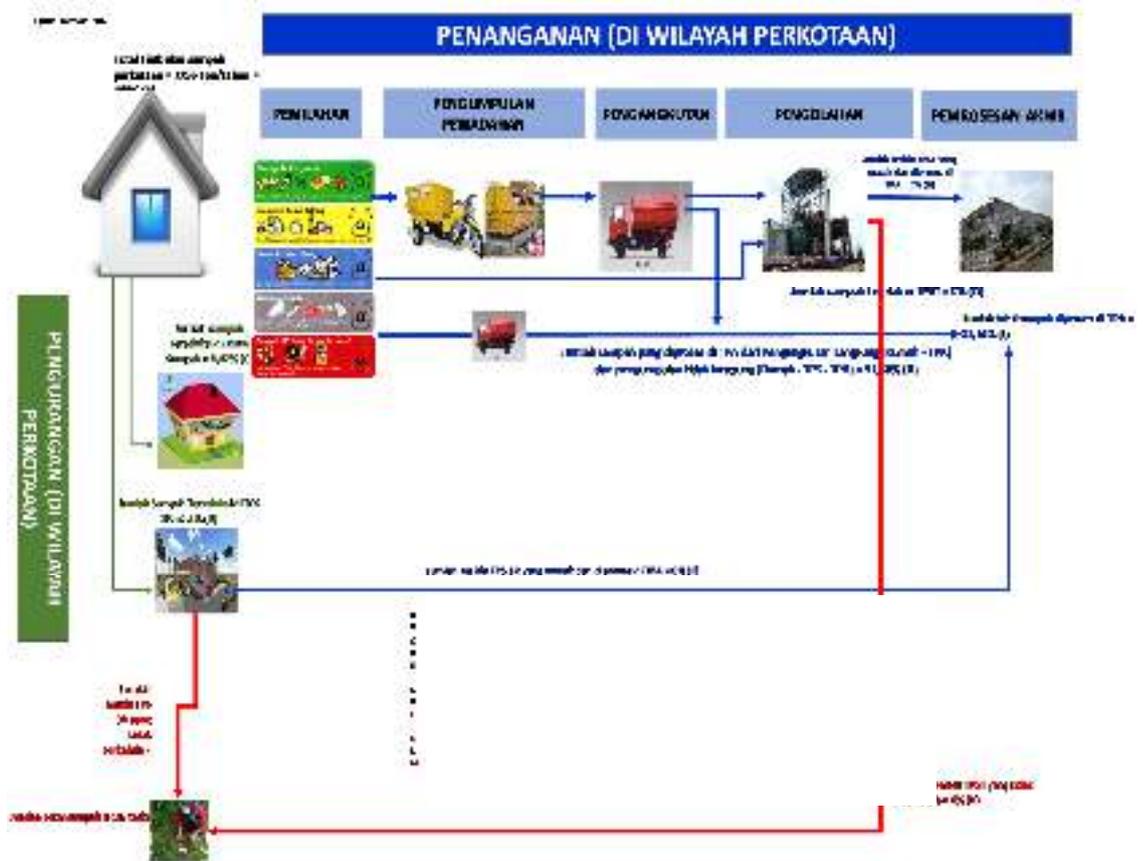
Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Dari tabel diatas, bahwa capaian akses persampahan Tahun 2021 yaitu sebesar 32,4% meliputi 32,3% penanganan dan 0,10% pengurangan. Sedangkan untuk gap capaian terhadap target RPJMN 2024 yaitu penanganan sebesar 38,7% dan pengurangan sebesar 27,9%. Terlihat bahwa gap pengurangan masih tinggi, sehingga perlu kerja keras untuk memenuhi target tersebut. Diperlukannya pemahaman kepada masyarakat luas bahwa kesadaran akan konsep Reduce, Reuse dan Recycle (3R) harus dimulai dari lingkungan keluarga.

**Analisis Rantai Layanan Sanitasi**

Kondisi pengelolaan sampah wilayah perkotaan saat ini di Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada gambar Rantai Layanan Persampahan berikut :

**Rantai Layanan Persampahan**



		Ton/tahun	Persentase (%)
A	Total Timbulan sampah perkotaan	7568	100,00%
B	Jumlah Sampah Tereduksi di TPS 3R	7,2602568	0,10%
C	Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah	1,2387168	0,02%
D	Jumlah sampah terolah di TPST	0	0,00%
E	Jumlah residu TPS 3R yang masuk dan diproses di TPA	0	0,00%
G	Jumlah residu TPST yang masuk dan diproses di TPA	0	0,00%
H	Jumlah sampah yang diproses di TPA dari Pengangkutan Langsung (Rumah - TPA) dan pengumpul	2447,153856	32,34%
I	Jumlah residu TPS 3R yang tidak terkelola	65,3423112	0,86%
K	Jumlah residu TPST yang tidak terkelola	0	0,00%
L	Jumlah total sampah diproses di TPA	2447,153856	32,34%
M	Jumlah total sampah tidak terkelola (termasuk sampah yang tidak terangkut/terkumpul di ting	5112	67,55%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

## 2) Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

### a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, Dinas Lingkungan Hidup adalah SKPD yang diberi kewenangan sebagai pengelola, pelaksana dan pemantau persampahan di Kabupaten Barito Timur, dimana Bidang yang bertanggung jawab menangani sampah ialah Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3, Kebersihan dan pertamanan yang secara garis besar mempunyai tugas menyusun rencana teknis dan program persampahan, serta mengendalikan, menanggulangi dan memelihara kebersihan dan keindahan untuk mengatasi dampak lingkungan terutama perkotaan di Kabupaten Barito Timur.

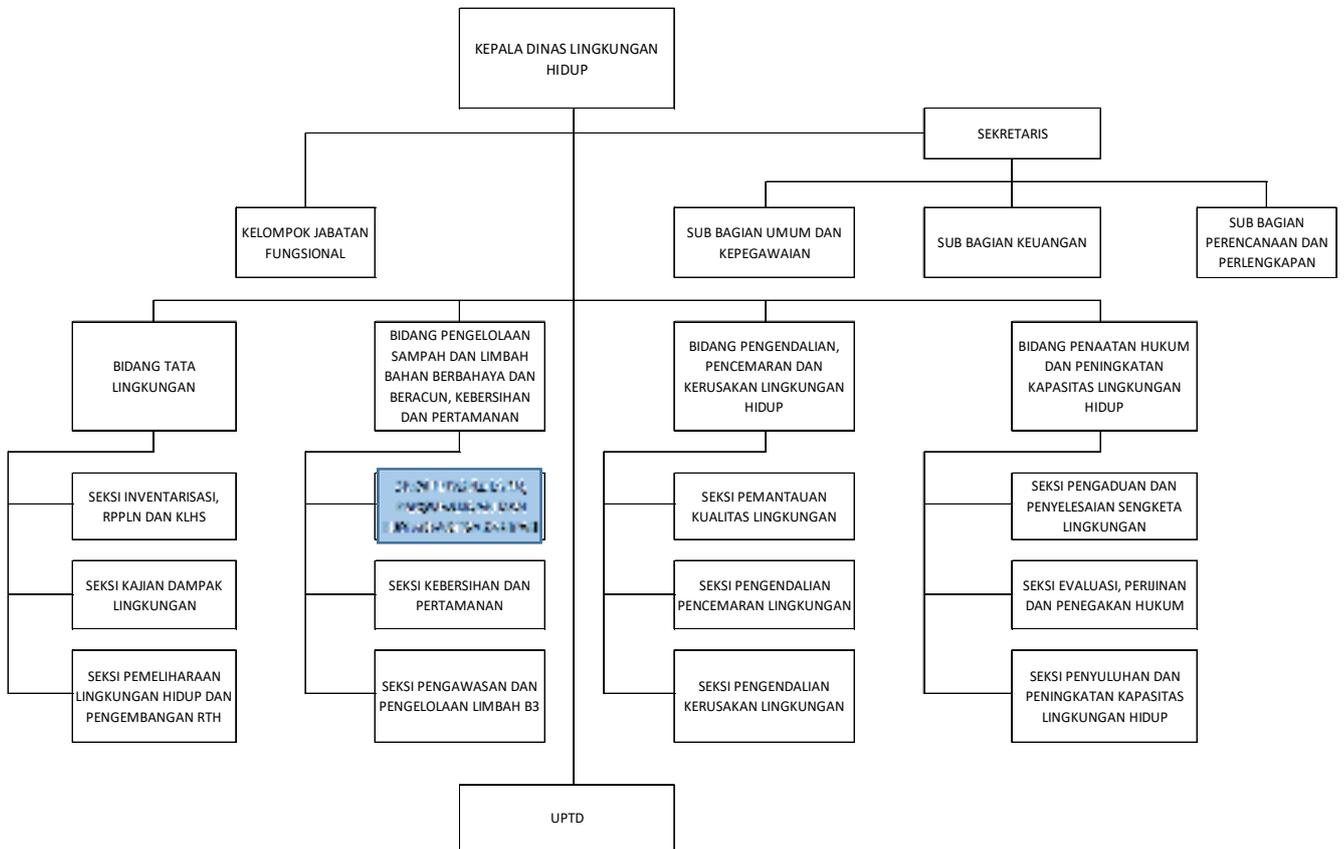
**Tabel Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah**

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
<b>3. Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>A. Seksi Pengelolaan, Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah</b> <b>1. Tugas dan Fungsi</b> a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Pengelolaan, Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah mengawasi dan melaporkan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
	b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Pengelolaan, Pengurangan dan pemanfaatan sampah;
	c. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan, Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;

	d. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan, Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah; dan
	e. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan, Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Pertamanan.
	f. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Pengelolaan, Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah mengawasi dan melaporkan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur

**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Barito Timur**



Dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Barito Timur, perencanaan, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan pengadaan sarana selain Pemerintah Kabupaten dapat juga dilakukan oleh pihak swasta maupun masyarakat. Dinas lingkungan hidup sudah memiliki Peraturan Daerah terkait pengelolaan persampahan, untuk Peraturan yang membahas terkait retribusi persampahan masih belum ada.

**Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan  
Kabupaten Barito Timur**

FUNGSI	PEMANGKU KEPENTINGAN		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLUD	PD dan sebagainya
<b>PERENCANAAN</b>			
· Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,	✓	-	DLH
· Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target	✓	-	DLH
· Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	✓	-	DLH
<b>PENGADAAN SARANA</b>			
· Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	✓	-	DLH dan PUPR
· Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	✓	-	DLH
· Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	✓	-	DLH dan PUPR
· Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	✓	-	DLH dan PUPR
· Membangun sarana TPA	✓	-	PUPR

· Menyediakan sarana composting	-	-	DLH
<b>PENGELOLAAN</b>			
· Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	-	-	DLH
· Mengelola sampah di TPS	✓	-	DLH/ PIHAK KETIGA/ PD
· Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	✓	-	DLH
· Mengelola TPA	✓	-	DLH
· Melakukan pemilahan sampah*	-	-	DLH
· Melakukan penarikan retribusi sampah	-	-	DLH, BAPENDA
· Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	-	-	DLH, DPMPTSP
<b>PENGATURAN DAN PEMBINAAN</b>			
· Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	✓	-	DLH
· Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	✓	-	DLH, SATPOL PP
· Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah		-	SATPOL PP
<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>			
· Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota	✓	-	DLH
· Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	✓	-	DLH
· Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan	✓	-	DLH

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur

**b. Kelembagaan Masyarakat**

Peran masyarakat melakukan 3R yang dikelola oleh KSM pada tahun 2020 dan 2021 berupa TPS 3R dan Bank Sampah berada di Desa Serapat dan Tamiyang Layang. Berikut Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan :

**Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan**

No	Fasilitas yang dikelola	Tahun Pembangunan Infrastruktur	Nama lembaga/kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/keterangan
1	Bank sampah	2020	Bank Sampah Mentari	Swasta/SK Kepala Desa No. 517/644/KTL/X/2021	5 Orang	Pembangunan Bank Sampah	Desa Serapat	Iuran	Bangunan Bank Sampah – Kelola Masyarakat	Aktif
2	TPS 3R	2021	KSM Munsit	KSM/ SK. No 14 tahun 2021	5 Orang	Pembangunan TPS 3R	Tamiyang Layang	Iuran	Bangunan TPS 3R, Motor Sampah, mesin pencacah organik – Hibah APBN	Aktif

Sumber : Dinas PUPRPerkim Barito Timur

**c. Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah**

<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Kepentingan</b>	<b>Kekuatan/Sumberdaya</b>
<b>Anggota Legislatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislasi</li> <li>- Penganggaran</li> <li>- Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim anggaran terkait Alokasi APBD</li> <li>- Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan</li> </ul>
<b>Pengusaha / Swasta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Bank Kalteng</li> <li>- PT. BUMA</li> <li>- PT. SIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana prasarana persampahan dalam rangka penuntasan akses persampahan</li> </ul>
<b>BUM Des</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak Ada</li> </ul>	-	-
<b>Organisasi Massa (Ormas):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak Ada</li> </ul>	-	-
<b>Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak Ada</li> </ul>	-	-
<b>Tokoh Masyarakat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak Ada</li> </ul>	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
<b>Anggota Legislatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi usulan terkait pengelolaan persampahan dalam APBD</li> <li>- Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan</li> </ul>	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
<b>Pengusaha / Swasta:</b> - PT. Bank Kalteng - PT. BUMA - PT. SIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan Penanganan Sarana/Prasarana persampahan</li> </ul>	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Tinggi	Tinggi	Ya
<b>Organisasi Massa (Ormas):</b> - Tidak Ada	-	-	-	-	-
<b>Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):</b> - Tidak Ada	-	-	-	-	-
<b>Tokoh Masyarakat</b> - Tidak Ada	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur

Sementara ini peran swasta dalam hal ini CSR masih sangat minim, PT. Bank Kalteng, PT. Buma dan PT. SIS telah berpartisipasi dalam penyediaan sarana prasarana persampahan yaitu berupa Tempat Penampungan Sampah (TPS), Pengadaan truk armroll dan pickup dump sampah. Koordinasi Pemerintah Daerah dalam rangka merangkul Pihak Swasta untuk berpartisipasi menuntaskan permasalahan sanitasi harus ditingkatkan sehingga target capaian yang sudah ditetapkan dapat terwujud.

**d. Regulasi**

Hasil pemetaan regulasi terkait persampahan di Kabupaten Barito Timur dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel . Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan**

No		Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Sampah	✓	-
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.	-	-
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	PERDA NO.1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	Ada	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	✓	-
b	Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	✓	-
c	Substansi pengaturan : Pengurangan sampah ( <i>pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i> )	✓	-
d	Substansi pengaturan : Penanganan sampah ( <i>pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah</i> )	✓	-
e	Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	✓	-
f	Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	-	✓

g	Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	✓	
h	Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	✓	-
i	Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	✓	-
j	Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif	✓	-
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
		-	✓
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
		4.	4.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur

### 3) Komunikasi dan Media

Pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah sangat diperlukan agar peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Berikut Tabel Kegiatan Komunikasi Promosi Hygiene dan Sanitasi dan Tabel Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Persampahan :

**Tabel Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygiene dan Sanitasi**

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur

**Tabel Media Komunikasi dan Kerjasama terkait air limbah**

No.	Jenis Media (a)	Khalayak (b)	Pendanaan (c)	Isu Yang diangkat (d)	Pesan Kunci (e)	Efektivitas ( f )
-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur

### 2.2.3. Drainase Lingkungan

Pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Barito Timur saat ini serta cakupan pelayanannya dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan

Pada dokumen pemutakhiran SSK Tahun 2022 berdasarkan hasil survey lapangan Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman tahun 2022 bahwa total luas wilayah perkotaan adalah 0,31 Ha. Lokasi genangan di Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel Lokasi Genangan**

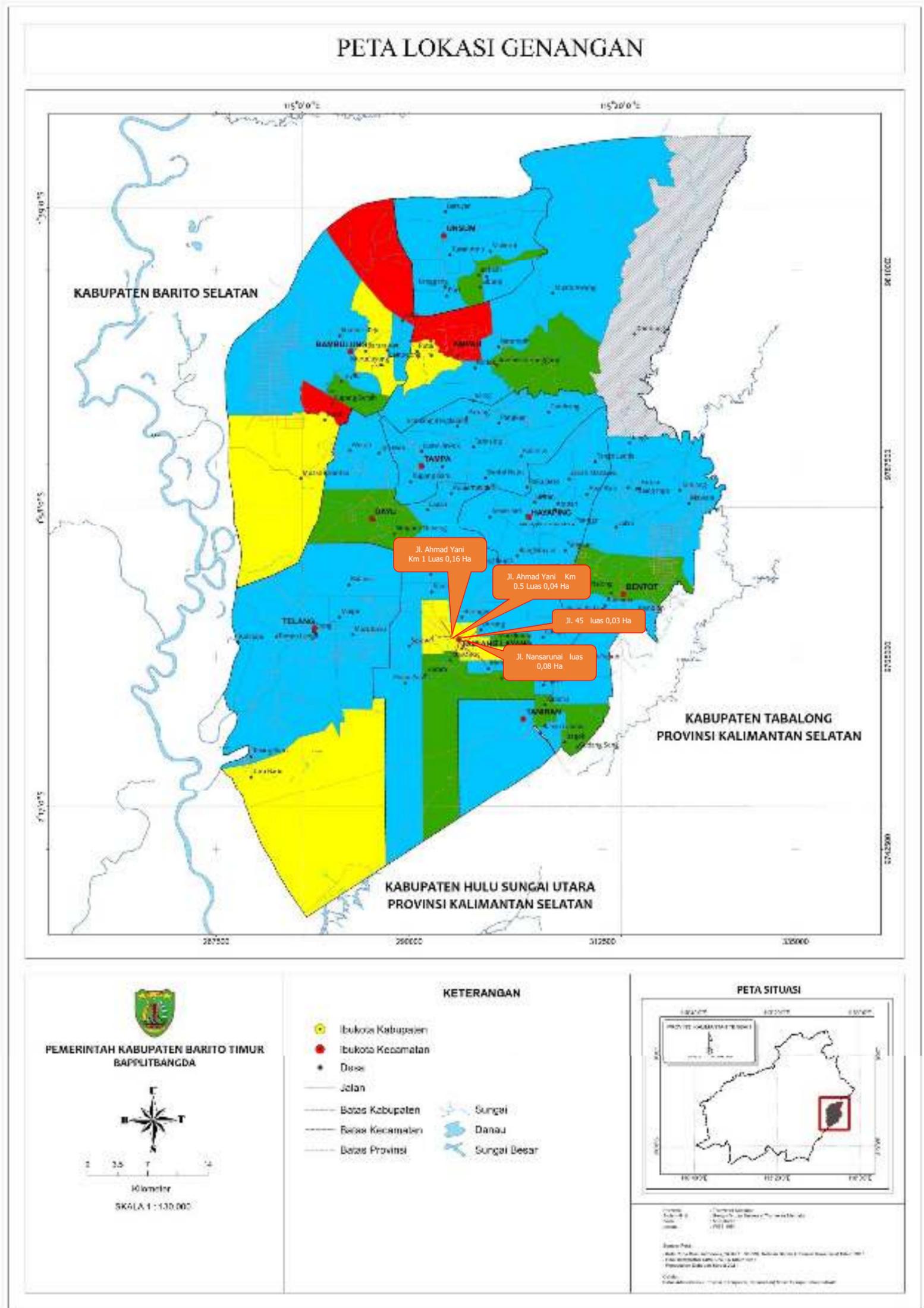
No	Lokasi Genangan	Wilayah				Penyebab
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi	
		(Ha)	(m)	(Jam/hari)	(Kali/tahun)	
1	Jl. Ahmad Yani Km 0.5	0,04	0,5	>2 jam	2	saluran drainase jalan tidak berfungsi maksimal
2	Jl. Ahmad Yani Km 1	0,16	0,3	>2 jam	2	saluran drainase jalan tidak berfungsi maksimal
3	Jl 45	0,03	0,3	>2 jam	2	saluran drainase jalan tidak berfungsi maksimal
4	Jl . Nansarunai	0,08	0,3	>2 jam	2	saluran drainase jalan tidak berfungsi maksimal
Total		0,31				

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur

#### 2) Peta Lokasi Genangan

Sistem cakupan layanan drainase di Kabupaten Barito Timur saat ini masih terfokus pada Kecamatan Dusun Tengah dan Dusun Timur yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar dari semua Kecamatan di Kabupaten Barito Timur meliputi Kelurahan Ampah dan Kelurahan Tamiang merupakan. Sedangkan wilayah lain seperti ibukota Kecamatan lainnya, hanya Sebagian drainasenya tertangani.

**PETA GENANGAN**



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur

### **3) Sistem dan Infrastruktur**

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

Adanya suatu sistem drainase di perkotaan maka akan diperoleh banyak manfaat pada kawasan perkotaan yang bersangkutan, yaitu akan semakin meningkatnya kesehatan, kenyamanan dan keasrian daerah pemukiman khususnya dan daerah perkotaan pada umumnya, dan dengan tidak adanya genangan air, banjir dan pembuangan limbah yang tidak teratur, maka kualitas hidup penduduk di wilayah bersangkutan akan menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman seluruh masyarakat.

Jaringan drainase di Kabupaten Barito Timur sebagian besar terdapat di pusat-pusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama. Sedangkan di luar pusat kota sebagian besar menggunakan sistem jaringan drainase alami dimana kondisi fisiknya masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal (tertutup tanah). Secara umum, kondisi drainase di kabupaten masih belum memadai karena beberapa hal misalnya sistem jaringan yang ada belum terpadu dan terpola dengan baik, sebagian besar salurannya terputus dan terdapat fisik saluran masih tanah. Oleh Karena itulah sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Barito Timur sering mengalami banjir (ada genangan air).

Sistem pengaliran pada umumnya masih mengandalkan sistem gravitasi. Kondisi permukaan yang relatif datar menyebabkan aliran lambat sehingga tingkat sedimentasi tinggi. Terdapatnya daerah cekungan di beberapa tempat dengan tidak dilengkapi saluran drainase yang memadai menyebabkan timbulnya genangan-genangan pada saat hujan. Sistem jaringan drainase di Kabupaten Barito Timur bermuara di Sungai Barito.

Berikut tabel kondisi sarana dan prasarana drainase Lingkungan Barito Timur :

**Tabel Kondisi sarana dan prasarana drainase Lingkungan di Kab. Barito Timur**

No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran*	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (Kali/Tahun)
				B**)	H***)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(II)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)
1	Saluran Primer							
2	Saluran Sekunder A1							
	- JL. Perumnas Ampah	M	Trapesium	1,5	0,8	√		Tidak Tentu
	- JL. Veteran Ampah	M	Trapesium	1,5	0,8	√		Tidak Tentu
	- JL. Kirab Remaja RT 2b Kelurahan Tamiang	M	Trapesium	1,5	0,8	√		Tidak Tentu
	- Jl. Patianom Kelurahan Tamiang	M	Trapesium	1,5	0,8	√		Tidak Tentu
	- RT 42 Ke+B7:B20lurahan	M	Trapesium	1,5	0,8	√		Tidak Tentu
	- Perumahan Ampah Kelurahan Ampah	M	Trapesium	1,5	0,8	√		Tidak Tentu
	- Perumahan Patianom Kelurahan Tamiang Layang	M	Trapesium	1,2	0,8	√		Tidak Tentu
	- Komplek DPRD Barito Timur Tamiang Layang	M	Trapesium	1,2	0,7	√		Tidak Tentu
	- JL. Dambung Purui Samping Kantor Camat Dusun Timur)	M	Trapesium	1,2	0,7	√		Tidak Tentu
	- JL. Sarapat RT.11	M	Trapesium	1,2	0,7	√		Tidak Tentu
	- JL. Jaweten - Epung Wewai RT.02	M	Trapesium	1,2	0,7	√		Tidak Tentu
	- JL. Serapat RT.2	M	Trapesium	1,2	0,7	√		Tidak Tentu
	- JL. 45 Tamiang	M	Trapesium	1,2	0,7	√		Tidak Tentu
	- RT.01 Desa Didi	M	Trapesium	1,2	0,7	√		Tidak Tentu
	-Jl. Poros Kabupaten desa Malintut	M	Trapesium	1,2	0,7	√		Tidak Tentu
	- Desa Tampa	M	Trapesium	1,2	0,7	√		Tidak Tentu
	- Jalan Patianom RT.03 Kec. Dusun Timur	M	Trapesium	1,2	0,7	√		Tidak Tentu
	- JL. Teluk Dalam Tamiang Layang	M	Trapesium	1,2	0,7	√		Tidak Tentu
	- JL. Polres Kabupaten Barito Timur	M	Trapesium	1,2	0,7	√		Tidak Tentu
	- JL. Lingkungan Kantor Kejaksaan Kab. Barito Timur							Tidak Tentu
	- JL. Dambung Kurui							Tidak Tentu
	- JL. RT.01 Desa Didi							Tidak Tentu
	- JL. Desa Sarapat RT.18 Tamiang Layang							Tidak Tentu
	- JL. 45 Tamiang							Tidak Tentu

- JL. Depan Pustu di Desa Turan Amis							
- JL. Desa Malintut							
- JL. Putai Bantau							
- JL. RT.19 Ampah Kota							

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur

Keterangan :

\*) Bentuk penampang saluran: segi empat atau trapesium

\*\*\*) B: lebar dasarsaluran

\*\*\*) H: tinggi salur

Drainase yang terbangun merupakan program/kegiatan dari Pemerintah Kabupaten melalui dinas teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur, serta berasal dari pendanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

### 2.3. Permasalahan Sanitasi dan Area Berisiko

Penentuan area berisiko berdasarkan tingkat resiko sanitasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer berdasarkan hasil penilaian oleh SKPD dan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko sebuah area (kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD mengenai ketersediaan layanan sanitasi dan data umum geografis dan demografis.

Penentuan area berisiko berdasarkan penilaian SKPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota POKJA PPAS Kabupaten Barito Timur. Adapun penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko berdasarkan dari nilai IRS (Indek Resiko Sanitasi), yaitu : Kondisi Sumber Air, Pencemaran karena air Limbah Domestik, Pengelolaan Persampahan ditingkat rumah tangga, Kondisi Drainase, aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Hygiene Jamban, Penanganan Air Minum, Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Data sekunder, data primer yang bersumber dari studi EHRA, persepsi SKPD dan studi pendukung yang lain di masukan dalam Instrumen SSK sebagai data dasar pengolahan untuk 100 Desa yang ada di Kabupaten Barito Timur dan nantinya

otomatis akan mengeluarkan nilai area beresiko tiap kelurahan atau desa. Kriteria angka seperti yang di sajikan pada Peta sebagai berikut :

Nilai 4 : Sangat Tinggi	
Nilai 3 : Tinggi	
Nilai 2 : Rendah	
Nilai 1 : Sangat Rendah	

**a. Area berisiko dan permasalahan air limbah domestik**

Area berisiko yang merupakan hasil dari instrument SSK dan Penyesuaian dapat dilihat dalam tabel (untuk desa/kelurahan resiko 3 dan 4) dan peta berikut :

**Tabel Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik**

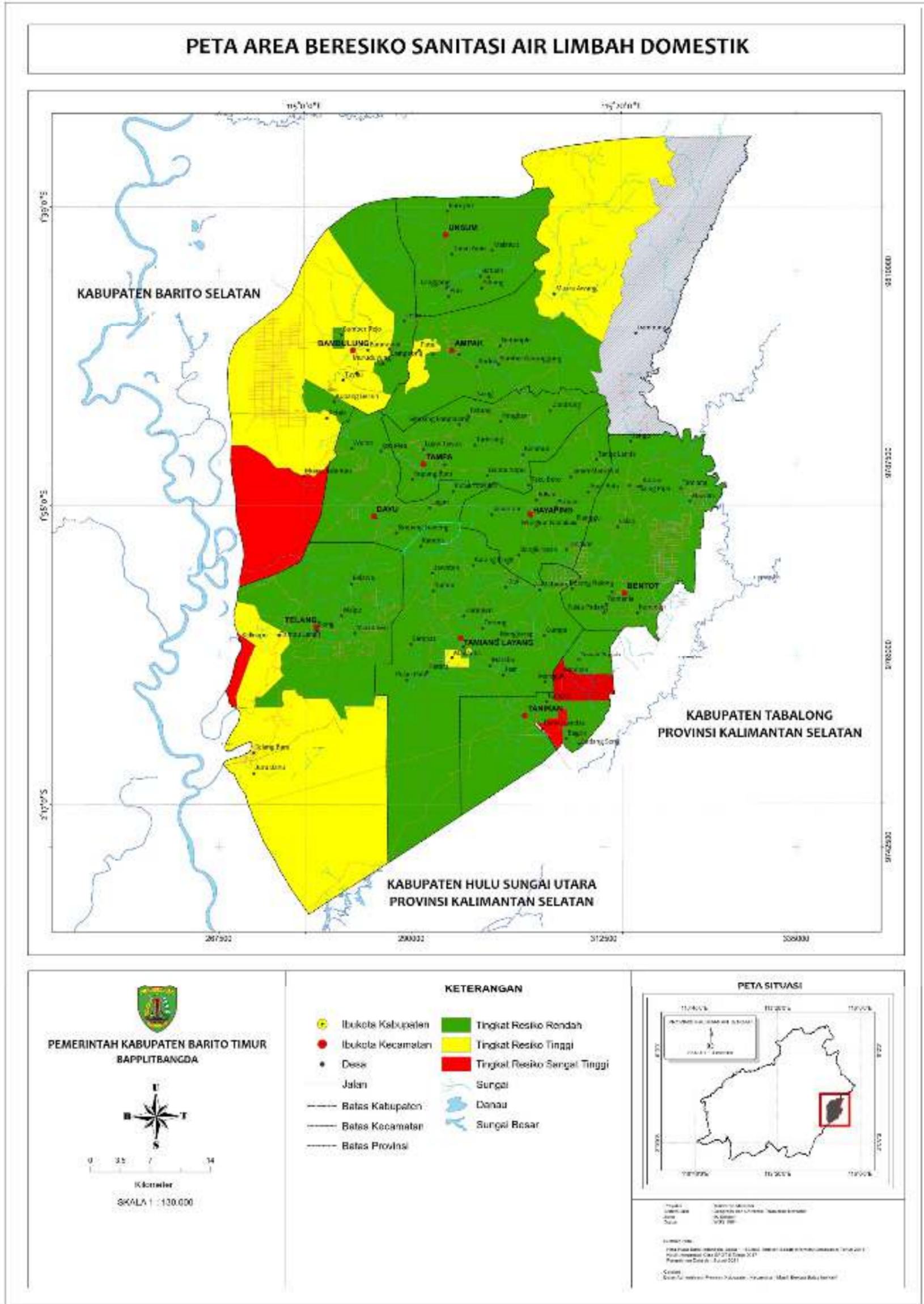
*Sumber : Area Berisiko Sanitasi Air Limbah dalam Instrumen SSK*

NO	AREA BERISIKO	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
1	RESIKO 4	PAJU EPAT	KALINAPU
		PEMATANG KARAU	MUARA PALANTAU
2	RESIKO 3	DUSUN TIMUR	MAGANTIS
		PAJU EPAT	TELANG BARU
		PAJU EPAT	JURU BANU
		PAJU EPAT	TAMPU LANGIT
		DUSUN TENGAH	PUTAI
		DUSUN TENGAH	AMPAH KOTA
		DUSUN TENGAH	MUARA AWANG
		PEMATANG KARAU	KETAB
		PEMATANG KARAU	KUPANG BERSIH
		PEMATANG KARAU	TUYAU
		PEMATANG KARAU	BARARAWA
3	RESIKO 2	PEMATANG KARAU	BAMBULUNG
		BENUA LIMA	TANIRAN
		BENUA LIMA	KANDRIS
		BENUA LIMA	BAGOK
		BENUA LIMA	TEWAH PUPUH
		BENUA LIMA	GUDANG SENG
		DUSUN TIMUR	PULAU PATAI
		DUSUN TIMUR	SARAPAT (EX HARARA)
DUSUN TIMUR	JAAR		

		DUSUN TIMUR	MATABU
		DUSUN TIMUR	TAMIANG LAYANG
		DUSUN TIMUR	JAWETEN
		DUSUN TIMUR	HARINGEN
		DUSUN TIMUR	DORONG
		DUSUN TIMUR	DIDI
		DUSUN TIMUR	KARANG LANGIT
		DUSUN TIMUR	HARARA
		DUSUN TIMUR	MANGKARAP
		DUSUN TIMUR	MATARAH
		DUSUN TIMUR	GUMPA
		DUSUN TIMUR	MARAGUT
		DUSUN TIMUR	SUMUR
		PAJU EPAT	TELANG
		PAJU EPAT	MURUTUWU
		PAJU EPAT	BALAWA
		PAJU EPAT	MAIPE
		PAJU EPAT	SIONG
		AWANG	JANAH JARI
		AWANG	BANGKIRAYEN
		AWANG	TANGKAN
		AWANG	AMPARI
		AWANG	WUNGKUR NANAKAN
		AWANG	HAYAPING
		AWANG	BIWAN
		AWANG	APAR BATU
		AWANG	PIANGGU
		AWANG	DANAU
		AWANG	JANAH MANSIWUI
		PATANGKEP TUTUI	PULAU PADANG
		PATANGKEP TUTUI	RAMANIA
		PATANGKEP TUTUI	KAMBITIN
		PATANGKEP TUTUI	BENTOT
		PATANGKEP TUTUI	AMPARI BORA
		PATANGKEP TUTUI	KOTAM
		PATANGKEP TUTUI	BETANG NALONG
		PATANGKEP TUTUI	MAWANI
		PATANGKEP TUTUI	JANGO
		PATANGKEP TUTUI	LALAP
		DUSUN TENGAH	SAING
		DUSUN TENGAH	RODOK
		DUSUN TENGAH	AMPAH DUA

		DUSUN TENGAH	NETAMPIN
		DUSUN TENGAH	SUMBER GARUNGGUNG
		RAREN BATUAH	UNSUM
		RAREN BATUAH	BARUYAN
		RAREN BATUAH	LENGGANG
		RAREN BATUAH	PURI
		RAREN BATUAH	BATUAH
		RAREN BATUAH	TURAN AMIS
		RAREN BATUAH	TANGKUM
		RAREN BATUAH	SIBUNG
		RAREN BATUAH	MALINTUT
		PAKU	TAMPA
		PAKU	RUNGGU RAYA
		PAKU	PATUNG
		PAKU	KALAMUS
		PAKU	SIMPANG BINGKUANG
		PAKU	KUPANG BARU
		PAKU	LUAU JAWUK
		PAKU	TARINSING
		PAKU	BANTAI NAPU
		PAKU	PANGKAN
		PAKU	GANDRUNG
		PAKU	PAKU BETO
		KARUSEN JANANG	DAYU
		KARUSEN JANANG	WURAN
		KARUSEN JANANG	IPU MEA
		KARUSEN JANANG	SIMPANG NANENG
		KARUSEN JANANG	LAGAN
		KARUSEN JANANG	PUTUT TAWULUH
		KARUSEN JANANG	KANDRIS
		PEMATANG KARAU	PINANG TUNGGAL
		PEMATANG KARAU	NAGALEAH
		PEMATANG KARAU	LAMPEONG
		PEMATANG KARAU	LEBO
		PEMATANG KARAU	TUMPUNG ULUNG
		PEMATANG KARAU	MURUDUYUNG
4	RESIKO 1	BENUA LIMA	BANYU LANDAS
		BENUA LIMA	BAMBAN
		PEMATANG KARAU	SUMBEREJO

**Peta Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik**



Permasalahan yang ada dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel Permasalahan Air Limbah Domestik**

No	Permasalahan
<b>1.</b>	<b>Aspek Teknis:</b> Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan Air Limbah Domestik, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis
1	Gap (%) untuk BABS sebesar 15,3%, Gap (%) Akses Aman sebesar 1,3%, Gap (%) Akses Layak Individu (tidak termasuk aman) sebesar 42,8%, GAP Akses belum layak sebesar 12,5%
2	Belum memiliki Infrastruktur IPLT dan truk sedot tinja
3	Perlu adanya teknologi tepat guna untuk kawasan pinggir sungai
<b>2.</b>	<b>Aspek Non Teknis:</b> Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
1	Belum memiliki Regulasi terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik
2	Belum memiliki Kelembagaan yang menangani masalah air limbah domestik
3	Rendahnya keterlibatan pihak Swasta atau pemangku kepentingan lainnya untuk pengelolaan air limbah domestik
4	Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
5	Terbatasnya pembiayaan di bidang air limbah domestik melalui penganggaran daerah (APBD)

Sumber : Analisa Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

**b. Area berisiko dan permasalahan persampahan**

Area berisiko yang merupakan hasil dari instrument SSK dapat dilihat dalam tabel (untuk desa/kelurahan resiko 3 dan 4) dan peta berikut :

**Tabel Area Berisiko Sanitasi Persampahan**

NO	AREA BERISIKO	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
1	RESIKO 4	-	-
2	RESIKO 3	BANUA LIMA	BANYU LANDAS
		PATANGKEP TUTUI	RAMANIA
		DUSUN TIMUR	JAAR

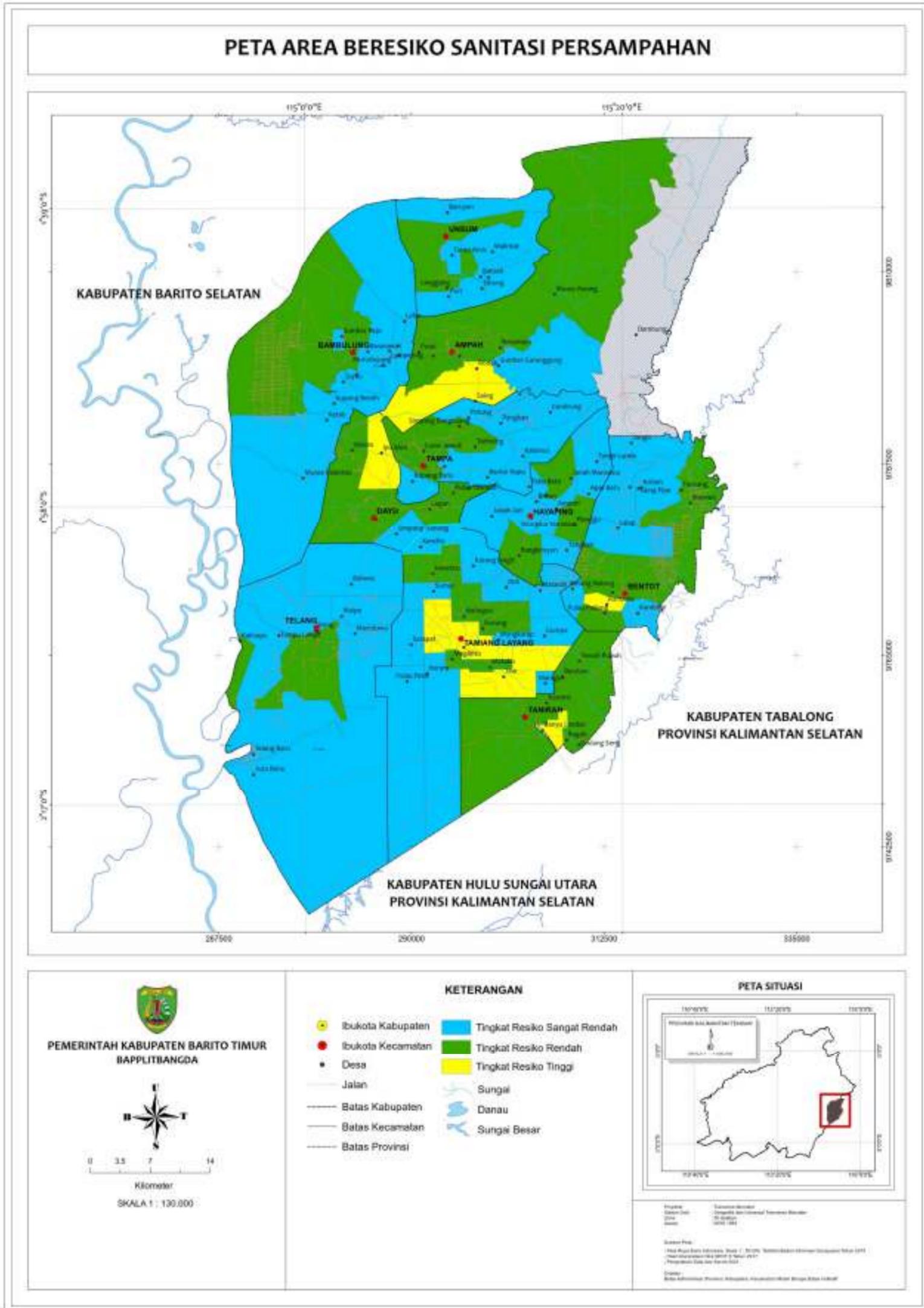
		DUSUN TIMUR	TAMIANG LAYANG
		DUSUN TENGAH	SAING
		DUSUN TENGAH	RODOK
		KARUSEN JANANG	IPU MEA
3	RESIKO 2	BANUA LIMA	TANIRAN
		BANUA LIMA	KANDRIS
		BANUA LIMA	BAGOK
		BANUA LIMA	BAMBAN
		BANUA LIMA	TEWAH PUPUH
		BANUA LIMA	GUDANG SENG
		PAJU EPAT	TELANG
		PAJU EPAT	KALINAPU
		AWANG	BANGKIRAYEN
		AWANG	PIANGGU
		AWANG	DANAU
		AWANG	JANAH MANSIWUI
		PATANGKEP TUTUI	PULAU PADANG
		PATANGKEP TUTUI	BENTOT
		PATANGKEP TUTUI	MAWANI
		DUSUN TENGAH	AMPAH DUA
		DUSUN TENGAH	PUTAI
		DUSUN TENGAH	NETAMPIN
		DUSUN TENGAH	MUARA AWANG
		RAREN BATUAH	UNSUM
		PAKU	LUAU JAWUK
		PAKU	TARINSING
		KARUSEN JANANG	WURAN
		KARUSEN JANANG	LAGAN
		KARUSEN JANANG	PUTUT TAWULUH
		DUSUN TIMUR	MAGANTIS
		DUSUN TIMUR	MATABU
		DUSUN TIMUR	JAWETEN
		DUSUN TIMUR	HARINGEN
		DUSUN TIMUR	DORONG
		DUSUN TENGAH	AMPAH KOTA
		RAREN BATUAH	LENGGANG
PAKU	TAMPA		
PAKU	SIMPANG BINGKUANG		
PAKU	PAKU BETO		
PEMATANG KARAU	BARARAWA		
KARUSEN JANANG	DAYU		

4	RESIKO 1	DUSUN TIMUR	PULAU PATAI
		DUSUN TIMUR	SARAPAT (EX HARARA)
		DUSUN TIMUR	DIDI
		DUSUN TIMUR	KARANG LANGIT
		DUSUN TIMUR	HARARA
		DUSUN TIMUR	MANGKARAP
		DUSUN TIMUR	MATARAH
		DUSUN TIMUR	GUMPA
		DUSUN TIMUR	MARAGUT
		DUSUN TIMUR	SUMUR
		PAJU EPAT	MURUTUWU
		PAJU EPAT	BALAWA
		PAJU EPAT	MAIPE
		PAJU EPAT	TELANG BARU
		PAJU EPAT	JURU BANU
		PAJU EPAT	TAMPU LANGIT
		PAJU EPAT	SIONG
		AWANG	JANAH JARI
		AWANG	TANGKAN
		AWANG	AMPARI
		AWANG	WUNGKUR NANAKAN
		AWANG	HAYAPING
		AWANG	BIWAN
		AWANG	APAR BATU
		PATANGKEP TUTUI	KAMBITIN
		PATANGKEP TUTUI	AMPARI BORA
		PATANGKEP TUTUI	KOTAM
		PATANGKEP TUTUI	BETANG NALONG
		PATANGKEP TUTUI	JANGO
		PATANGKEP TUTUI	LALAP
		DUSUN TENGAH	SUMBER GARUNGGUNG
		RAREN BATUAH	BARUYAN
		RAREN BATUAH	PURI
		RAREN BATUAH	BATUAH
		RAREN BATUAH	TURAN AMIS
		RAREN BATUAH	TANGKUM
		RAREN BATUAH	SIBUNG
		RAREN BATUAH	MALINTUT
		PAKU	RUNGGU RAYA
		PAKU	PATUNG
PAKU	KALAMUS		

	PAKU	KUPANG BARU
	PAKU	BANTAI NAPU
	PAKU	PANGKAN
	PAKU	GANDRUNG
	KARUSEN JANANG	DAYU
	KARUSEN JANANG	SIMPANG NANENG
	PEMATANG KARAU	KANDRIS
	PEMATANG KARAU	MUARA PALANTAU
	PEMATANG KARAU	KETAB
	PEMATANG KARAU	KUPANG BERSIH
	PEMATANG KARAU	TUYAU
	PEMATANG KARAU	PINANG TUNGGAL
	PEMATANG KARAU	NAGALEAH
	PEMATANG KARAU	LAMPEONG
	PEMATANG KARAU	BAMBULUNG
	PEMATANG KARAU	LEBO
	PEMATANG KARAU	TUMPUNG ULUNG
	PEMATANG KARAU	MURUDUYUNG
	PEMATANG KARAU	SUMBEREJO

*Sumber : Analisa Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur*

**Peta Area Berisiko Sanitasi Persampahan**



Permasalahan yang ada dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel Permasalahan Persampahan**

No	Permasalahan
<b>1.</b>	<b>Aspek Teknis:</b> Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan Persampahan, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis
1	GAP penanganan sampah Perkotaan sebesar 38,7% dan GAP Pengurangan sampah perkotaan sebesar 27,9%
2	Belum memiliki TPA dengan Sistem Sanitary Landfill/Controlled Landfill
3	Sarana dan prasarana persampahan belum memadai
4	Belum memiliki infrastruktur TPST
5	Hanya memiliki 1 unit TPS 3R dan Hanya memiliki 1 unit Bank Sampah Aktif
<b>2.</b>	<b>Aspek Non Teknis:</b> Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
1	Belum memiliki Kelembagaan yang menangani masalah Persampahan
2	Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Persampahan belum optimal
3	Rendahnya keterlibatan pihak Swasta atau pemangku kepentingan lainnya untuk pengelolaan Persampahan
4	Rendahnya perilaku masyarakat akan pengelolaan persampahan rumah tangga
5	Terbatasnya pembiayaan di bidang Persampahan melalui penganggaran daerah (APBD)

Sumber : Analisa Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

**c. Area berisiko dan permasalahan Drainase Lingkungan**

Area berisiko yang merupakan hasil dari instrument SSK dapat dilihat dalam tabel (untuk desa/kelurahan resiko 3 dan 4) dan peta berikut :

**Tabel Area Berisiko Sanitasi Drainase**

NO	AREA BERISIKO	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
1	RESIKO 4	DUSUN TENGAH	AMPAH KOTA

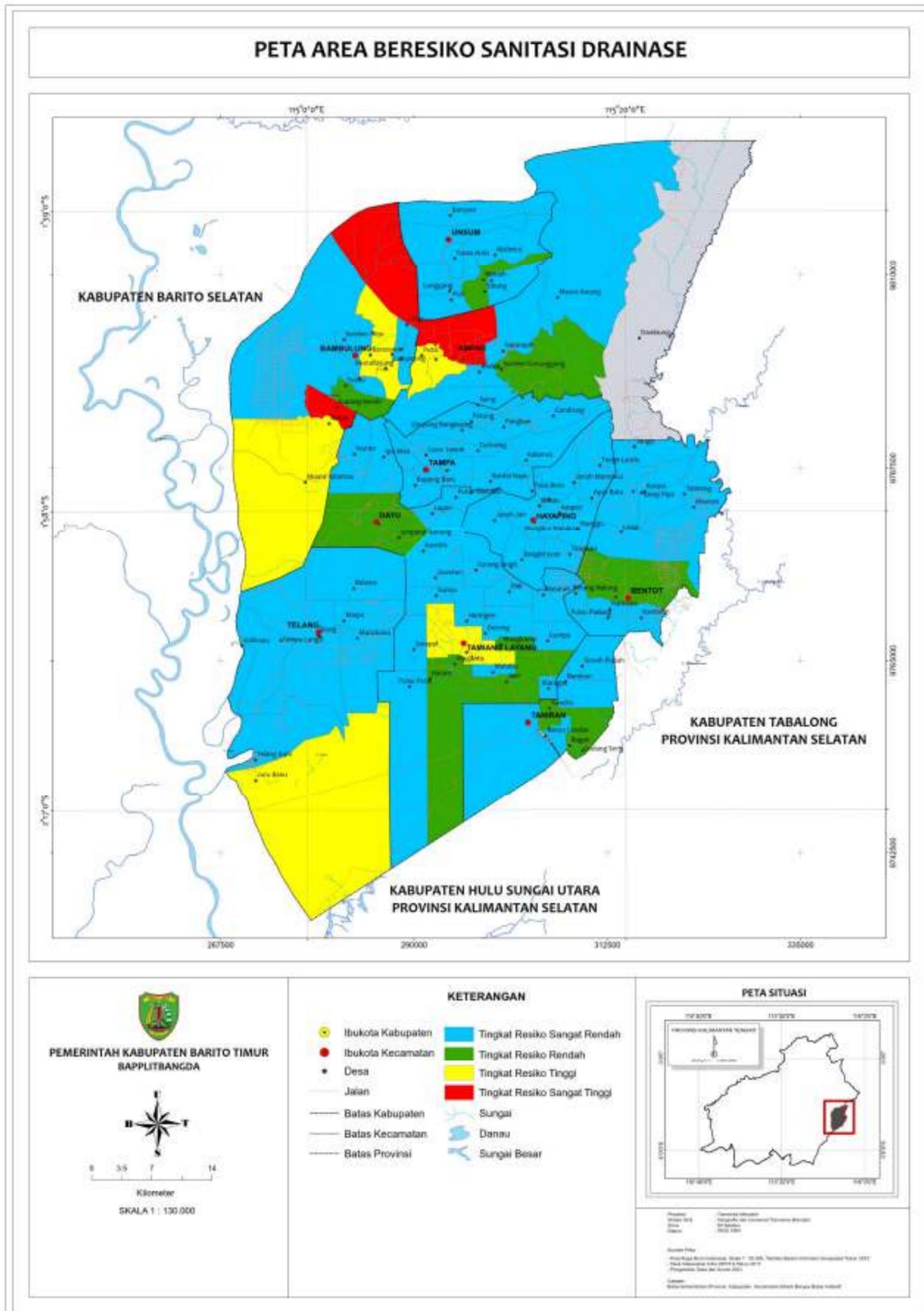
		PEMATANG KARAU	KUPANG BERSIH
		PEMATANG KARAU	LEBO
2	RESIKO 3	DUSUN TIMUR	TAMIANG LAYANG
		PAJU EPAT	JURU BANU
		DUSUN TENGAH	AMPAH DUA
		DUSUN TENGAH	PUTAI
		PEMATANG KARAU	MUARA PALANTAU
		PEMATANG KARAU	KETAB
		PEMATANG KARAU	BARARAWA
		PEMATANG KARAU	MURUDUYUNG
3	RESIKO 2	BANUA LIMA	KANDRIS
		BANUA LIMA	BAGOK
		BANUA LIMA	GUDANG SENG
		DUSUN TIMUR	MAGANTIS
		DUSUN TIMUR	JAAR
		DUSUN TIMUR	HARARA
		DUSUN TIMUR	MANGKARAP
		PATANGKEP TUTUI	BENTOT
		DUSUN TENGAH	SUMBER GARUNGGUNG
		RAREN BATUAH	BATUAH
		RAREN BATUAH	SIBUNG
		KARUSEN JANANG	DAYU
		PEMATANG KARAU	SIMPANG NANENG
		PEMATANG KARAU	TUYAU
4	RESIKO 1	BANUA LIMA	TANIRAN
		BANUA LIMA	BANYU LANDAS
		BANUA LIMA	BAMBAN
		BANUA LIMA	TEWAH PUPUH
		DUSUN TIMUR	PULAU PATAI
		DUSUN TIMUR	SARAPAT (EX HARARA)
		DUSUN TIMUR	MATABU
		DUSUN TIMUR	JAWETEN
		DUSUN TIMUR	HARINGEN
		DUSUN TIMUR	DORONG
		DUSUN TIMUR	DIDI
		DUSUN TIMUR	KARANG LANGIT
		DUSUN TIMUR	MATARAH
		DUSUN TIMUR	GUMPA
		DUSUN TIMUR	MARAGUT
DUSUN TIMUR	SUMUR		
PAJU EPAT	TELANG		

	PAJU EPAT	MURUTUWU
	PAJU EPAT	BALAWA
	PAJU EPAT	MAIPE
	PAJU EPAT	TELANG BARU
	PAJU EPAT	TAMPU LANGIT
	PAJU EPAT	SIONG
	PAJU EPAT	KALINAPU
	AWANG	JANAH JARI
	AWANG	BANGKIRAYEN
	AWANG	TANGKAN
	AWANG	AMPARI
	AWANG	WUNGKUR NANAKAN
	AWANG	HAYAPING
	AWANG	BIWAN
	AWANG	APAR BATU
	AWANG	PIANGGU
	AWANG	DANAU
	AWANG	JANAH MANSIWUI
	PATANGKEP TUTUI	PULAU PADANG
	PATANGKEP TUTUI	RAMANIA
	PATANGKEP TUTUI	KAMBITIN
	PATANGKEP TUTUI	AMPARI BORA
	PATANGKEP TUTUI	KOTAM
	PATANGKEP TUTUI	BETANG NALONG
	PATANGKEP TUTUI	MAWANI
	PATANGKEP TUTUI	JANGO
	PATANGKEP TUTUI	LALAP
	DUSUN TENGAH	SAING
	DUSUN TENGAH	RODOK
	DUSUN TENGAH	NETAMPIN
	RAREN BATUAH	MUARA AWANG
	RAREN BATUAH	UNSUM
	RAREN BATUAH	BARUYAN
	RAREN BATUAH	LENGGANG
	RAREN BATUAH	PURI
	RAREN BATUAH	TURAN AMIS
	RAREN BATUAH	TANGKUM
	RAREN BATUAH	MALINTUT
	PAKU	TAMPA
	PAKU	RUNGGU RAYA
	PAKU	PATUNG

	PAKU	KALAMUS
	PAKU	SIMPANG BINGKUANG
	PAKU	KUPANG BARU
	PAKU	LUAU JAWUK
	PAKU	TARINSING
	PAKU	BANTAI NAPU
	PAKU	PANGKAN
	PAKU	GANDRUNG
	PAKU	PAKU BETO
	KARUSEN JANANG	WURAN
	KARUSEN JANANG	IPU MEA
	KARUSEN JANANG	SIMPANG NANENG
	KARUSEN JANANG	PUTUT TAWULUH
	KARUSEN JANANG	KANDRIS
	PEMATANG KARAU	PINANG TUNGGAL
	PEMATANG KARAU	NAGALEAH
	PEMATANG KARAU	LAMPEONG
	PEMATANG KARAU	BAMBULUNG
	PEMATANG KARAU	TUMPUNG ULUNG
	PEMATANG KARAU	SUMBEREJO

*Sumber : Analisa Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur*

**Peta Area Berisiko Sanitasi Drainase**



Permasalahan yang ada dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel Permasalahan Drainase Lingkungan**

No	Permasalahan
<b>1. Aspek Teknis:</b> Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	Masih terdapat luas genangan 0,31 Ha
2	Dimensi saluran eksisting pedestrian tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
3	Terdapat beberapa titik lokasi yang belum memiliki saluran drainase
<b>2. Aspek Non Teknis:</b> Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase

Sumber : Analisa Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

## **BAB III**

# **KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI**

Kerangka pengembangan sanitasi merupakan system sanitasi di masa depan yang akan menjadi tolak ukur pengembangan sanitasi dalam kerangka perencanaan jangka pendek (1-2 tahun) dan jangka menengah (5 tahun). Agar ada jaminan bahwa system sanitasi, zonasi dan tahapan pengembangan sanitasi sektor air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan yang dipilih adalah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi saat ini, maka digunakan instrument SSK yang merupakan pengolahan input data sekunder, data primer serta persepsi SKPD, dan selanjutnya disinkronkan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang menjadi acuan antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Dalam bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten yang akan memberikan arahan tentang pembangunan dan kebijakan umum sanitasi kabupaten saat ini dan arah kedepan, pentahapan pengembangan sanitasi dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

### 3.1. Visi dan Misi Sanitasi

**Tabel Visi Misi Sanitasi Kabupaten Barito Timur**

<b>VISI KABUPATEN</b>	<b>MISI KABUPATEN</b>	<b>VISI SANITASI KABUPATEN</b>	<b>MISI SANITASI KABUPATEN</b>
<p><b>TERWUJUDNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial yang dapat Memungkinkan seseorang untuk melakukan aktifitas secara produktif baik ekonomi maupun sosial.</li> <li>2. Cerdas adalah kemampuan untuk belajar dengan keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya.</li> <li>3. Sejahtera adalah keadaan atau kondisi masyarakat yang baik, dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dapat diartikan juga terpenuhinya segala sesuatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat.</li> <li>4. Pemerintahan Yang Amanah adalah pemerintah yang mampu memberikan pelayanan dengan maksimal dan sebesar-besarnya prioritas pembangunan untuk kemakmuran dan/atau kesejahteraan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan perluasan lapangan pekerjaan;</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia;</li> <li>3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;</li> <li>4. Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga; dan</li> <li>5. Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Kabupaten Barito Timur yang bersih sehat ,indah dan teduh melalui pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi yang ramah lingkungan tahun 2021</li> </ol>	<p><b>Misi Air Limbah Domestik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan</li> <li>1. Meningkatkan kan pengetahuan dan merubah perilaku masyarakat tentang air limbah domestik yang baik dan sesuai standar teknis dan kesehatan</li> </ol> <p><b>Misi Persampahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan</li> <li>3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan</li> </ol>

## Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

			<p><b>Misi Drainase Perkotaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas drainase perkotaan</li><li>2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menjaga dan mengelola drainase perkotaan</li></ol>
--	--	--	--

### **3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi**

Pengembangan sanitasi bertujuan untuk mewujudkan pembangunan sanitasi di Kabupaten Barito Timur secara berkelanjutan melalui peningkatan layanan sanitasi. Dalam mencapai Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Barito Timur perlu dirumuskan strategi layanan sanitasi didasarkan pada isu-isu strategis yang dihadapi saat ini.

Kabupaten Barito Timur yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi 2 (dua) yaitu wilayah sungai dan wilayah darat, tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganan sanitasi baik secara sosial budaya maupun secara fisik (pembangunan sarana dan prasarana sanitasi). Indikator yang digunakan dalam tahap pengembangan ini adalah presentase penduduk yang terlayani, dengan harapan semua penduduk akan dapat terlayani melalui program dan kegiatan sanitasi yang berkelanjutan.

Dalam rencana pengembangan sanitasi ke depannya perlu memperhatikan perubahan iklim yang setiap tahun terjadi di wilayah di Indonesia seperti Banjir, longsor, angin dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut maka konsep pembangunan kedepan diarahkan perlu pertimbangan infrastruktur yang berketahanan iklim secara khusus penanganan air limbah domestik yang didesain dan direncanakan sesuai potensi perubahan iklim ekstrim di Kabupaten.

Selain konsep pembangunan yang berketahanan iklim perlu juga direncanakan konsep *Circular Economy* untuk pengelolaan persampahan sesuai dengan tahapan rantai layanan persampahan dimana sampah yang dapat diproses dengan tahapan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dimana sampah dapat digunakan kembali, dikurangi dan di daur ulang dimana residunya di angkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), konsep *Circular Economy* yang dimaksud yaitu sebuah sistem ramah lingkungan yang mempertahankan nilai material agar dapat digunakan berulang-ulang. Sistem *Circular Economy* bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan material secara sirkular untuk meminimalkan produksi limbah dengan memulihkan dan menggunakan kembali produk dan bahan sebanyak mungkin, secara sistemik, dan berulang-ulang.

Konsep *Circular Economy* berpedoman pada prinsip utama mengurangi sampah dan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Salah satu cara yang diterapkan untuk mengatasi sampah plastik dalam konsep *Circular Economy* melakukan daur ulang plastik dalam bank sampah. Sampah yang telah dipilah akan didaur ulang menjadi material baru berbagai macam produk seperti BBM, penguat aspal berbahan dasar plastik, pupuk, pakan organik dan media tanam. Dan diharapkan juga dalam penerapan konsep *Circular Economy* nantinya dapat memberikan manfaat serta profit kepada pemerintah daerah maupun Kelompok Swadaya Masyarakat untuk TPST/TPS 3R/Bank Sampah.

Konsep Infrastruktur berketahanan iklim dan konsep *Circular Economy* persampahan diharapkan dapat diimplementasikan ke dalam rencana pengembangan sanitasi di Kabupaten Barito Timur 5 tahun ke depan.

### 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sanitasi

#### a. Air Limbah Domestik

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan komponen air limbah domestik sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi sektor air limbah**

TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
Tercapainya target RPJMN Tahun 2024 akses Kabupaten Barito Timur yaitu 72,00% Akses layak, 2% Akses Aman, dan 0% BABS	Tercapainya Akses aman dan akses layak serta menurunkan angka BABS dari 15,30 % menjadi 0% di tahun 2024	Akses layak individu (tidak termasuk aman) sebesar 42,8% dan 15,30% penduduk melakukan BABS
Tersedianya Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik regulasi retribusi air limbah domestik	Tersedianya landasan hukum dalam pengelolaan air limbah domestik dan penetapan retribusi pengelolaan air limbah domestik 5 tahun ke depan	Belum Tersedianya landasan hukum dalam pengelolaan air limbah domestik dan penetapan retribusi pengelolaan air limbah domestik
Tersedianya sarana prasarana serta optimalnya pengelolaan	Terbangunnya IPLT dan tersedianya sarana pendukung IPLT serta	Belum adanya kelembagaan

sarana prasarana air limbah domestik	optimalnya pengelolaan sarana prasarana air limbah terbangun lainnya	pengelola Air Limbah dan belum adanya IPLT serta truk tinja dan sarana prasarana pendukung lainnya serta belum maksimalnya pengelolaan SPALD
Terlaksananya advokasi kepada pengambil kebijakan bahwa sektor sanitasi adalah urusan wajib yang merupakan prioritas nasional	Meningkatnya anggaran Sektor sanitasi dan menjadikan sektor sanitasi sebagai prioritas pembangunan daerah mulai Tahun 2023	Anggaran sektor sanitasi belum menjadi prioritas APBD Kabupaten

**b. Sampah Perkotaan**

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan komponen persampahan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi sektor persampahan**

TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Berkurangnya sampah tidak terkelola dari 67,6% menjadi 0% pada periode 5 tahun ke depan	67,6% sampah tidak terkelola
Meningkatnya sistem operasional TPA menjadi Sanitary Landfill	Terbangunnya TPA dengan Sistem Sanitary Landfill pada periode 5 tahun ke depan	TPA masih Open Dumping
Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memadai	Berkurangnya sampah tidak terkelola dari 67,6% menjadi 0% pada periode 5 tahun ke depan	Kurangnya sarana dan prasarana persampahan
Tersedia Regulasi terkait tarif retribusi persampahan yang sesuai dengan Permendagri nomor 07 tahun 2021	Tersedianya landasan hukum dalam pengelolaan Persampahan pada periode 5 tahun ke depan	Regulasi terkait tarif retribusi persampahan belum dijalankan dan belum sesuai dengan Permendagri nomor 07 tahun 2021

### c. Drainase Perkotaan

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan komponen drainase perkotaan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi sektor drainase**

TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk Sarana dan Prasarana Drainase Tahun 2023	Berkurangnya genangan air disekitar pemukiman perumahan penduduk di jalan lingkungan di kota Tamiang Layang 0,31 Ha menjadi 0 Ha tahun 2024	Masih terdapat genangan di Kota Tamiang Layang (Jalan J.A Yani Km. 0,5 dan Km 1, Jalan Nansarunai dan Jalan 45 ) seluas ± 0,31 Ha

#### 3.2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi

Tahapan pengembangan sanitasi merupakan rencana pentahapan pembangunan sanitasi di suatu Kabupaten/Kota mulai dari pelaksanaan sistem skala rumah tangga sampai ke skala komunal dan kota. Tahapan pengembangan dituangkan dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi. Tabel tahapan pengembangan sanitasi memberikan gambaran mengenai rencana pengelolaan air limbah domestik/persampahan/drainase hingga 10 tahun mendatang beserta pentahapannya yang dituangkan dalam bentuk persentase target per tahapan jangka waktu pengembangan. Tahapan pengembangan sanitasi dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

##### 1) Tahapan jangka pendek

Tahapan jangka pendek dihitung 2 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+2).

##### a. Air Limbah Domestik

Target jangka pendek untuk penganganan masalah air limbah domestik tahun 2023 – 2024 yaitu:

No	Zona Penanganan	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	SPALD-S (tangki septik individual)	Dusun Timur	Magantis
		Paju Epat	Telang Baru Juru Banu
		Dusun Tengah	Ampah Kota Putai Muara Awang Nentampin
		Pematang Karau	Muara Plantau Ketaab Kupang Bersih Tuyau Bararawa Bambulung Lebo Nagaleah
		Karusen Janang	Dayu
2	SPALD-T (IPAL skala permukiman)	Dusun Timur	Tamiang Layang
		Dusun Tengah	Ampah Kota
3	SPALD Komunal(tangki septik komunal 5-10 KK)	Dusun Tengah	Ampah Kota
		Dusun Timur	Tamiang Layang Haringen

Sumber : Data Kesepakatan POKJA PPAS Kabupaten

b. Persampahan

No	Zona Penanganan	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Layanan TPA	Benua Lima	Taniran
		Dusun Timur	Tamiang Layang
		Dusun Tengah	Rodok
			Kelurahan Ampah Kota
2	Layanan TPS 3R	Dusun Tengah	Kelurahan Ampah Kota
3	Layanan Bank Sampah	Dusun Tengah	Kelurahan Ampah Kota
4	Layanan TPST	-	-

Sumber : Data Kesepakatan POKJA PPAS Kabupaten

2) Tahapan jangka menengah

Tahapan jangka menengah dihitung 5 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+5). Tahapan jangka menengah dirumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasil analisis zonasi pada Instrumen SSK.

a. Air Limbah Domestik

Target jangka pendek untuk penanganan masalah air limbah domestik tahun 2025 – 2027 yaitu:

No	Zona Penanganan	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	SPALD-S (tangki septik individual)	Dusun Timur	Haringen Didi
		Paju Epat	Tampu Langit Kalinapu

		Dusun Tengah	Ampah Kota Putai Muara Awang
		Pematang Karau	Muara Plantau Ketab Kupang Bersih Tuyau Bararawa Bambulung Lebo Nagaleah
		Karusen Janang	Dayu
		Paku	Tampa
		Awang	Hayaping Biwan Apar batu Pianggu Danau Janah mansiwui Tangkan Ampari
		Patangkep Tutui	Ampari bora Kotam Betang nalong Mawani Jango Lalap

2	SPALD-T (IPAL skala permukiman)	Dusun Timur	Tamiang Layang
		Dusun Tengah	Ampah Kota
3	SPALD Komunal(tangki septik komunal 5-10 KK)	Dusun Tengah	Ampah Kota
		Dusun Timur	Tamiang Layang Haringen

Sumber : Data Kesepakatan POKJA PPAS Kabupaten

b. Persampahan

No	Zona Penanganan	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Layanan TPA	Benua Lima	Taniran
		Dusun Timur	Tamiang Layang
		Dusun Tengah	Rodok
			Kelurahan Ampah Kota
2	Layanan TPS 3R	Dusun Tengah	Kelurahan Ampah Kota
3	Layanan Bank Sampah	Dusun Tengah	Kelurahan Ampah Kota
4	Layanan TPST	Dusun Timur	Tamiang Layang

Sumber : Data Kesepakatan POKJA PPAS Kabupaten

Dalam penentuan target tahapan pengembangan sanitasi tersebut dapat mengacu kepada target yang sudah ditetapkan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota seperti: RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk air limbah domestik dan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Di dalam target RPJMN, Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi (air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan) menjadi 90% akses sanitasi Layak dan 15% akses sanitasi aman pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2024.

Di sektor persampahan, mengacu pada Perpres Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, arah dan kebijakan pengelolaan persampahan terdiri atas pengurangan dan penanganan.

- Kegiatan pengurangan sampah merupakan upaya pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah
- Kegiatan penanganan sampah meliputi aktivitas pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui Jakstranas ini dicanangkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penanganan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah sebelum adanya kebijakan dan strategi Nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

**a. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Barito Timur**

Tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten Barito Timur diisikan ke dalam tabel Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten. Tabel tersebut menunjukkan persentase eksisting air limbah domestik serta target jangka pendek dan jangka menengah dari sistem pengelolaan air limbah yang direncanakan. Sistem pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada Permen. PUPR No. 04/PRT/M/2017 terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dan SPALD Terpusat. Perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pembangunan air limbah diperoleh berdasarkan hasil instrument SSK kabupaten sebagaimana tabel berikut :

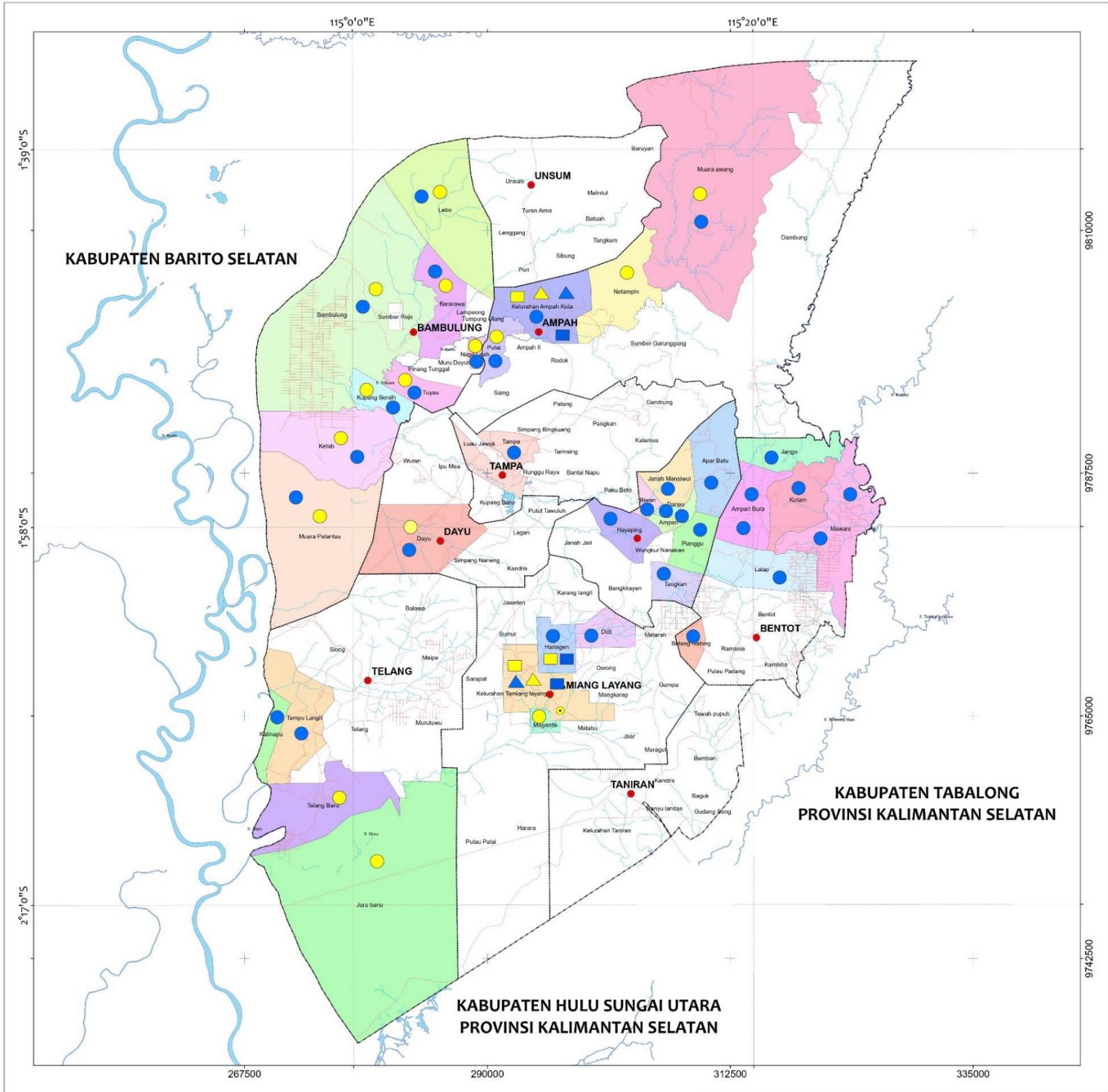
**Tabel Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Barito Timur**

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
<b>WILAYAH PERKOTAAN</b>				
1	Akses Aman	0,7	1,6	2,0
2	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	72,2	70,2	72,0
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	22,2	60,0	65,0
	Akses Layak Bersama	3,9	3,0	3,0
3	Akses Belum Layak*	12,5	0,0	0,0
4	BABS Tertutup	0,0	0,0	0,0
5	BABS Terbuka	15,3	0,0	0,0

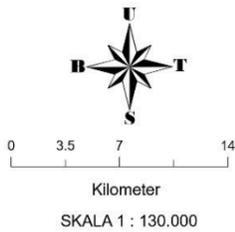
Sumber: Instrumen SSK

Sedangkan zonasi penanganan air limbah dapat digambarkan sebagaimana pada peta berikut :

**PETA ZONASI AIR LIMBAH**



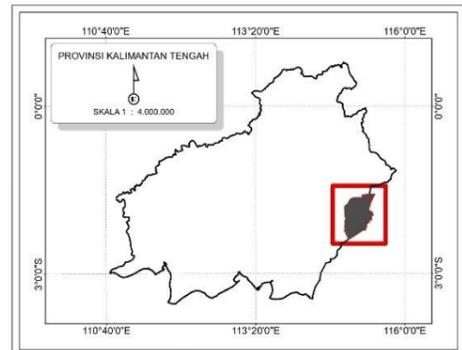
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
BAPPLITBANGDA



**KETERANGAN**

- Ibukota Kabupaten
  - Ibukota Kecamatan
  - Desa
  - Jalan
  - Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Provinsi
  - Sungai
  - Danau
  - Sungai Besar
- 
- Target Jangka Pendek (Tahun 2023 - 2024)
  - SPALD
  - ▲ SPALD-T
  - SPALD-S
  - Target Jangka Panjang (Tahun 2025 - 2027)
  - SPALD
  - ▲ SPALD-T
  - SPALD-S

**PETA SITUASI**



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Geografis dan Universal Transverse Mercator  
Zona : 50 Selatan  
Datum : WGS 1984

Sumber Peta :  
- Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50.000, Terbitan Badan Informasi Geospasial Tahun 2015  
- Hasil Interpretasi Citra SPOT 6 Tahun 2017  
- Pengolahan Data dan Survei 2021

Catatan :  
Batas Administrasi (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan) Masih Berupa Batas Indikatif

**b. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Barito Timur**

Tahapan pengembangan persampahan berdasarkan hasil instrument SSK didapatkan tahapan prioritas penanganan persampahan di Kabupaten Barito Timur sebagaimana tabel berikut :

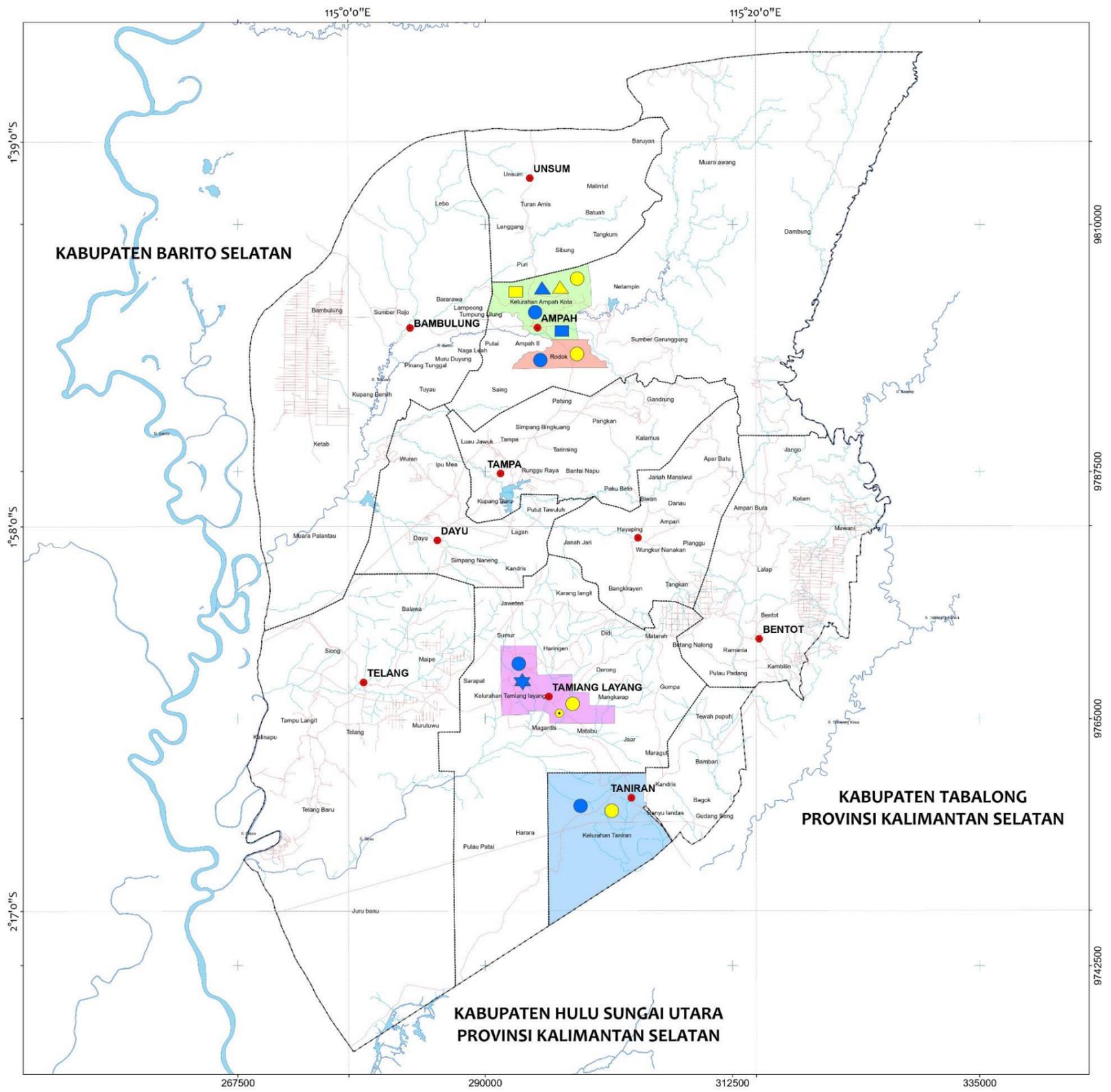
**Tabel Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan**

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
1	Pengurangan sampah	32,3	72,0	71,0
2	Penanganan Sampah	0,10	27,0	28,0
3	Sampah Tidak Terkelola	67,55	52,55	37,55

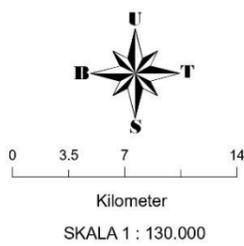
Sumber: Instrumen SSK dan Kesepakatan Pokja PPAS Kabupaten

Sedangkan zonasi penanganan persampahan dapat digambarkan sebagaimana pada peta berikut :

**PETA ZONASI PERSAMPAHAN**



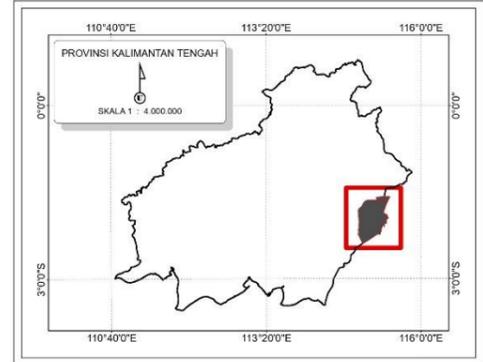
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**BAPPLITBANGDA**



**KETERANGAN**

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Jalan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Provinsi
- Sungai
- Danau
- Sungai Besar
- Target Jangka Pendek (Tahun 2023 - 2024)
- Layanan Bank Sampah
- Layanan TPS 3R
- Layanan TPA
- Target Jangka Panjang (Tahun 2025 - 2027)
- Layanan Bank Sampah
- Layanan TPS 3R
- Layanan TPA
- ★ Layanan TPST

**PETA SITUASI**



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Geografis dan Universal Transverse Mercator  
Zona : 50 Selatan  
Datum : WGS 1984

Sumber Peta :  
- Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50.000, Terbitan Badan Informasi Geospasial Tahun 2015  
- Hasil Interpretasi Citra SPOT 6 Tahun 2017  
- Pengolahan Data dan Survei 2021

Catatan :  
Batas Administrasi (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan) Masih Berupa Batas Indikatif

### 3.2.3. Skenario Pencapaian Sasaran

**Tabel Skenario pencapaian sasaran**

KOMPONEN	TAHUN					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>AIR LIMBAH DOMESTIK</b>						
Akses Aman	0,7	1,2	1,6	3,5	6,0	8,0
Akses Layak	72,2	75,0	76,0	77,0	78,0	80,0
Akses Layak Perdesaan	45,7	34,0	25,6	5,6	4,6	2,0
Akses Belum Layak	12,5	10,5	8,0	5,0	3,0	2,0
BABS Tertutup	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BABS Terbuka	15,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PERSAMPAHAN</b>						
Penanganan Sampah	32,3	53,0	62,0	65,0	67,0	70,0
Pengurangan Sampah	0,10	5	27	27,5	27,8	28
Sampah Tidak Terkelola	67,55	57,55	52,55	47,55	42,55	37,55
<b>DRAINASE</b>						
Luas Genangan	0,31	0,28	0,25	0,15	0,10	0,0

Sumber : Hasil Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

### 3.3. Kemampuan pendanaan sanitasi daerah

**Tabel Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Barito Timur untuk sanitasi**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan
		n-4	n-3	n-2	n-1	n	
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )	869.636.900	935.966.000	935.969.000	1.865.372.244	953.983.400	0,15
1.1	Air Limbah Domestik	200.000.000	200.000.000	200.000.000	110.286.000	110.286.000	-0,11
1.2	Sampah Domestik	669.636.900	735.966.000	735.969.000	1.755.086.244	843.697.400	0,24
2	Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2)	3.624.000.000	845.880.000	4.152.272.000	3.413.629.000	3.414.382.000	0,74
2.1	DAK Sanitasi	3.624.000.000	845.880.000	4.152.272.000	3.413.629.000	3.414.382.000	0,74
2.2	DAK Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0
2.3	DAKPerumahan dan Permukiman	0	0	0	0	0	0
3	Pinjaman/Hibah Sanitasi	0	0	0	0	0	0
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		- 2.754.363.100	90.086.000	- 3.216.303.000	- 1.548.256.756	- 2.460.398.600	-9,42
Total Belanja Langsung		116.932.350.154	723.901.523.503	621.968.310.598	920.557.700.399	270.592.331.334	1,21
% APBD murni terhadap Belanja Langsung		-2,36%	0,01%	-0,52%	-0,17%	-0,91%	-9,96
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							

Sumber: Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

**Tabel Perkiraan besaran pendanaan sanitasi kedepan**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan Belanja Langsung	303.063.411.092	339.431.020.423	380.162.742.873	425.782.372.017	476.876.144.659	1.925.315.691.064
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi Perkiraan Komitmen Pendanaan	276.000.000	303.600.000	333.960.000	367.356.000	404.091.600	1.685.007.600
3	Sanitasi	1.049.381.740	1.153.319.914	1.268.651.905	1.395.517.094	1.535.068.803	6.401.939.457

Sumber: Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

**Tabel Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Barito Timur  
untuk operasional/pemeliharaan dan investasi sanitasi**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan Rata-Rata
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Belanja Sanitasi	200.000.000	210.000.000	212.000.000	122.286.000	123.286.000	-0,09
1.1	Air Limbah Domestik	200.000.000	200.000.000	200.000.000	110.286.000	110.286.000	-0,11
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	0	10.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	0,09
1.2	Sampah domestik	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	600.873.209	667.636.910	735.966.000	735.969.000	1.755.086.244	0,40

Sumber: Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

**Tabel Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Barito Timur  
untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2027**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Belanja Sanitasi	2.431.885.000	2.613.706.250	2.808.612.812	3.018.882.515	3.247.312.969	14.120.399.546
1.1	Air Limbah Domestik	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	2.000.000.000
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	75.000.000
1.2	Sampah domestik	1.987.000.000	2.086.350.000	2.190.667.500	2.300.200.875	2.415.210.919	10.979.429.294
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	129.885.000	162.356.250	202.945.312	253.681.640	317.102.050	1.065.970.252

Sumber: Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

**Tabel Kemampuan APBD Kabupaten Barito Timur dalam mendanai program/kegiatan SSK**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan	2.110.594.868	2.311.654.355	2.532.319.791	2.773.621.770	3.038.583.947	12.766.774.731
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	2.250.000.000	2.450.000.000	2.650.000.000	2.850.000.000	3.050.000.000	13.250.000.000
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	2.150.000.000	2.350.000.000	2.550.000.000	2.780.000.000	3.050.000.000	12.850.000.000
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	139.405.132	138.345.645	117.680.209	76.378.230	11.416.053	483.225.269
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	39.405.132	38.345.645	17.680.209	6.378.230	11.416.053	83.225.269

Sumber: Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur



## **BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI**

Dalam memastikan keberhasilan perencanaan yang telah disusun, pengembangan strategi sanitasi yang menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek teknis maupun aspek non teknis yaitu kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin.

Untuk itu digunakanlah analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*) agar bisa melihat korelasi dan kombinasi antara faktor internal dan eksternal yang ada. Analisis faktor internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi. Sedangkan analisis faktor eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threat*).

Hasil dari analisis SWOT akan menunjukkan keterpaduan antara :

1. Kekuatan dengan peluang (Strategi S-O), yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Kekuatan dengan ancaman (strategi S-T), yaitu menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
3. Kelemahan dengan peluang (strategi W-O), yaitu mengatasi kelemahan untuk meraih peluang
4. Kelemahan dengan ancaman (strategi W-T), yaitu mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman

Strategi pengelolaan Air Limbah Domestik, persampahan dan drainase di Kabupaten Barito Timur melalui isu-isu strategis dan analisis SWOT telah ditelaah dan menghasilkan strategi penanganan. Selanjutnya, penyesuaian dengan permasalahan mendesak yang



diketahui dari instrumentasi profil menuju tujuan dan sasaran pada bab sebelumnya dihasilkanlah sejumlah strategi sebagai berikut :

#### **4.1. Air Limbah Domestik**

Hasil analisa SWOT yang dilakukan, pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Barito Timur berada pada kuadran III (W-O) dimana strategi yang digunakan adalah “Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang”. Sehingga strategi yang diperlukan untuk pengembangan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang di Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut:

**Strategi 1 : Menyusun Regulasi pengelolaan air limbah domestik dan Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan menggunakan dana APBD dan memanfaatkan pendampingan menggunakan APBN.**

Kabupaten Barito Timur belum memiliki regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik, sehingga tidak ada payung hukum yang mengatur kewajiban dan sanksi termasuk retribusi baik kepada pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik. Oleh karena itu pemda akan memanfaatkan potensi pendanaan dari APBD dan APBN untuk melakukan pendampingan dalam menyusun regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik sebagai landasan hukum dan penetapan retribusi pengelolaan air limbah domestik.

**Strategi 2 : Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah dengan memanfaatkan DAK Sanitasi, APBN, APBD Kabupaten Dana Desa dan CSR.**

Sebagai upaya menghilangkan perilaku BABS di Kabupaten Barito Timur yaitu sebesar 15,30%, pemda akan memanfaatkan potensi pendanaan



dari DAK Sanitasi, APBN, APBD Kabupaten, Dana Desa dan CSR untuk menambah maupun meningkatkan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik berupa SPALDS individual maupun komunal, dan SPALD-T.

**Strategi 3 : Membentuk UPTD Pengelola Air Limbah Domestik dengan memanfaatkan pendampingan menggunakan APBN.**

Pemda Kabupaten Barito Timur belum memiliki IPLT dan direncanakan pada tahun 2024 akan dibangun dan pada tahun selanjutnya akan dianggarkan untuk pengadaan mobil sedot tinja sebagai sarana penyedotan dimasyarakat. Pembentukan UPTD Pengelola Air Limbah Domestik sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mengelola IPLT, diperlukan dalam memfungsikan dan mengoptimalkan IPLT yang ada.

**Strategi 4 : Memaksimalkan advokasi kepada para pengambil kebijakan untuk menjadikan sanitasi sebagai prioritas kegiatan daerah.**

Dalam rangka pencapaian target SDGs Tahun 2030, maka advokasi akan dilakukan oleh Pokja PKP Kabupaten kepada pengambil kebijakan bahwa sektor sanitasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang merupakan prioritas kegiatan pembangunan yang perlu didukung penganggaran pada APBD Kabupaten.

**4.2. Sampah Perkotaan**

Hasil analisa SWOT yang dilakukan, pengelolaan persampahan Kabupaten Barito Timur berada pada kuadran IV (W-T) dimana strategi yang digunakan adalah “Strategi Defensif”. Sehingga strategi yang diperlukan untuk pengembangan persampahan selama 5 (lima) tahun mendatang di Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut:



**Strategi 1 : Mendorong penyediaan fasilitas pengangkutan sampah serta melakukan optimalisasi pengangkutan sampah langsung dan tidak langsung.**

Strategi ini bertujuan untuk menambah cakupan wilayah dan meningkatkan persentase sampah yang terangkut atau tertangani di perkotaan, serta dilakukan secara kontinyu.

**Strategi 2 : Memperluas penyediaan sarana TPS3R dan advokasi serta sosialisasi pengurangan sampah serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga terkait pengelolaan sampah TPS3R.**

Dengan bertambahnya sarana dan prasarana TPS3R yang semula berjumlah 1 unit menjadi 3 unit maka pengurangan volume sampah terangkut ke TPA akan berkurang menjadi sebesar 1%/tahun dari data pengurangan sebelumnya yang hanya sebesar 0,1%/tahun.

**Strategi 3: Optimalisasi pendanaan DAU untuk subsektor persampahan serta melakukan optimalisasi retribusi persampahan**

Strategi ini bertujuan meningkatkan komitmen pendanaan dari belanja langsung melalui APBD subsektor Pengelolaan Sampah naik menjadi >10%/tahun.

**Strategi 4 : Membangun TPA Sanitary Landfill**

Meningkatkan sistem operasional TPA menjadi Sanitary Landfill dengan mengoptimalkan pembiayaan dari APBN untuk percepatan pembangunan fisik TPA Sanitary Landfill di Kabupaten Barito Timur.

**Strategi 5: Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga kota terkait pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan**

SKPD terkait melakukan sosialisasi dan pemicuan terkait pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan baik masyarakat perkotaan



maupun perdesaan dengan tujuan meminimalkan perilaku buang sampah sembarangan ke selokan/parit, sungai dan tanah kosong.

#### **4.3. Drainase Perkotaan**

Hasil analisa SWOT yang dilakukan, pengelolaan persampahan Kabupaten Barito Timur berada pada kuadran I (S-0) dimana strategi yang digunakan adalah “Menggunakan Kekuatan Untuk Memanfaatkan Peluang”. Sehingga strategi yang diperlukan untuk pengembangan persampahan selama 5 (lima) tahun mendatang di Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut:

**Strategi 1 : Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem yang komprehensif dengan memperhatikan aspek aspek rencana tata ruang kota, kondisi DAS/sub DAS, perubahan iklim global, kondisi lingkungan social ekonomi serta kearifan lokal.**

Kabupaten Barito Timur memiliki pengelolaan sistem drainase yang terpadu oleh karena itu dinas terkait akan membuat perencanaan drainase perkotaan yang sesuai dengan situasi kondisi geografis kabupaten barito timur .

**Strategi 2 : Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase.**

Sebagai upaya mengurangi potensi banjir di Kabupaten Barito Timur, pemda akan memanfaatkan potensi pendanaan dari DAK Sanitasi, APBN, APBD Kabupaten, Dana Desa dan CSR untuk menambah maupun meningkatkan sarana prasarana drainase perkotaan.



**Strategi 3 : Mendorong peningkatan kemauan politik (Political will) para pemangku kepentingan dalam memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan drainase perkotaan.**

Pemda Kabupaten Barito Timur akan menyusun regulasi dimana kegiatan pengelolaan drainase perkotaan menjadi program kegiatan prioritas yang didukung oleh pihak terkait dan penganggaran dari berbagai sumber dana.

**Strategi 4 : Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan drainase.**

SKPD terkait akan melakukan sosialisasi dan pemicuan terkait pengelolaan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan kepada seluruh kalangan baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan.



## **BAB V**

# **PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI**

Program dan kegiatan disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran masing-masing sektor sanitasi yaitu sektor air limbah domestik, sektor persampahan dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Ringkasan Program dan Kegiatan sanitasi Kabupaten Barito Timur disajikan dalam bentuk ringkasan indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaan/pembiayaan pengembangan sanitasi untuk 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan sumber pendanaan baik dari APBD Kabupaten, Provinsi, APBN, Swasta/CSR, Dana desa atau dari masyarakat serta Funding Gap.

### **5.1. Ringkasan**

Kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun kedepan dibutuhkan biaya sebesar Rp. 116.197.000.000,- yang dibagi menjadi 3 sektor yaitu sektor air limbah sejumlah Rp. 38.005.000,- sektor persampahan sejumlah Rp. 75.942.000.000,- dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sejumlah Rp. 2.250.000.000,-. Rekapitulasi indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaan/pembiayaan pengembangan sanitasi untuk 5 tahun ke depan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi  
untuk 5 tahun**

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	3.375	7.425	7.125	14.625	5.455	38.005
2	Persampahan	3.760	53.427	5.948	5.998	6.809	75.942
3	STBM	440	925	410	370	105	2.250
Jumlah (a)		7.575	61.777	13.483	20.993	12.369	116.197



Sumber : Hasil Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

**Tabel Hasil Perhitungan Funding GAP Untuk 5 Tahun**

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Kebutuhan Pendanaan	5.326	11.977	6.376	5.512	3.997	33.188
2	Kemampuan Pendanaan	39	38	18	6	11	113
3	Selisih (Rp)	5.287	11.939	6.358	5.506	3.986	33.074
4	Selisih (%)	99,26%	99,68%	99,72%	99,88%	99,71%	99,66%

Sumber : Hasil Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

**Tabel Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi  
untuk 5 tahun per Sumber Anggaran**

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
<b>A. Pemerintah</b>							
1	APBD Kabupaten	5.326	11.977	6.376	5.512	3.997	33.407
2	APBD Provinsi	0	0	0	1.750	3.500	5.250
3	APBN	1.200	47.200	2.000	11.500	2.305	64.205
4	DAK	800	2.550	4.300	800	800	9.250
Jumlah A		<b>7.326</b>	<b>61.727</b>	<b>12.676</b>	<b>19.562</b>	<b>10.602</b>	<b>112.112</b>
<b>B. Non-Pemerintah</b>							
1	CSR Swasta	0	0	752	1.351	1.702	3.805
2	Masyarakat	50	50	55	80	65	300
Jumlah B		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>807</b>	<b>1431</b>	<b>1767</b>	<b>4105</b>
Total (A+B)		<b>7.376</b>	<b>61.777</b>	<b>13.483</b>	<b>20.993</b>	<b>12.369</b>	<b>116.217</b>

Sumber : Hasil Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

## 5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

**Tabel Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota**

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	2.125	4.425	2.375	2.125	470	11.520
2	Persampahan	2.761	6.627	3.846	3.347	3.497	20.297
3	STBM	440	925	155	40	30	1.590
Jumlah		<b>5.326</b>	<b>11.977</b>	<b>6.376</b>	<b>5.512</b>	<b>3.997</b>	<b>33.407</b>

Sumber : Hasil Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur



**Tabel Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi**

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	0	0	0	1.750	3.500	5.250
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	STBM	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	1.750	3.500	5.250

Sumber : Hasil Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

**Tabel Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN**

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	1.200	1.200	1.200	10.700	705	15.005
2	Persampahan	0	46.000	800	800	1.600	49.200
3	STBM	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1.200	47.200	2.000	11.500	2.305	64.205

Sumber : Hasil Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

**Tabel Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK**

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	0	1.750	3.500	0	0	5.250
2	Persampahan	800	800	800	800	800	4.000
3	STBM	0	0	0	0	0	0
Jumlah		800	2.550	4.300	800	800	9.250

Sumber : Hasil Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

### 5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

**Tabel Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR**

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	0	0	0	0	715	715
2	Persampahan	0	0	502	1.051	912	2.465
3	STBM	0	0	250	300	75	625
Jumlah		0	0	752	1.351	1.702	3.805

Sumber : Hasil Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur



Percepatan  
Pembangunan  
Sanitasi  
Perumahan

## Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

**Tabel Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat**

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	50	50	50	50	65	265
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	STBM	0	0	5	30	0	35
Jumlah		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>80</b>	<b>65</b>	<b>300</b>

*Sumber : Hasil Analisis Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur*

## **BAB VI**

# **MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK**

Tujuan pembangunan sanitasi tingkat kabupaten yang telah dinyatakan dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK). Dokumen SSK juga mencantumkan target-target pembangunan sanitasi subsektor (Air Limbah, Persampahan dan Drainase) serta target aspek Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat. Strategi, kebijakan, program dan kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya nanti, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian subsektor sanitasi dan aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pemantauan atau juga dikenal sebagai Monitoring bertujuan untuk:

1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan;
2. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya;
3. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian.

Sedangkan Evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi.

Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan :

1. Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati;
2. Bentuk usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunansanitasi;
3. Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi.

### Pemantauan Strategi Sanitasi Kota

1. Pemantauan Capaian Pelaksanaan kegiatan adalah untuk menilai tingkat investasi dan keluaran dari pelaksanaan kegiatan berkaitan sanitasi oleh pemerintah kabupaten. Kegiatan-kegiatan ini mengacu kepada usulan kegiatan (rencana tindak) SSK maupun kegiatan-kegiatan diluar usulan SSK yang dilaksanakan oleh SKPD. Jumlah kegiatan usulan SSK menurut tahun dan sub sektornya;
2. Pemantauan Capaian Strategis adalah untuk menilai tingkat capaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor sanitasi dengan melihat indikator-indikator yang telah ditetapkan Tujuan, Sasaran, serta Tahapan Pencapaian Subsektor Sanitasi.

Di samping itu, monitoring juga dilakukan terhadap kemajuan pencapaian pendampingan implementasi SSK, yaitu sejauh mana kabupaten/kota memenuhi tahapan pencapaian/milestone di tahun pertama pendampingan (M1-M3) dan di tahun ke dua pencapaian (M4).

Jadi monitoring pembangunan sanitasi mencakup dua hal:

1. Pemantauan kemajuan pembangunan sanitasi permukiman
2. Pemantauan pencapaian Milestone M1-M3 dan M4 pendampingan implementasi SSK.

Kedua pemantauan tersebut dilaksanakan melalui sistem berbasis web [www.nawasis.org](http://www.nawasis.org).

Pelaporan pemantauan ini mencakup 3 (tiga) modul yaitu:

1. Modul Data Teknis yang memuat informasi capaian akses air limbah domestik dan capaian akses sampah perkotaan;
2. Modul Program dan Pendanaan yang memuat informasi rencana dan pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam SSK dan nilai investasinya serta output dan outcome masing-masing program/kegiatan;
3. Modul Sarana dan Prasarana yang memuat informasi tentang sistem, jenis dan jumlah infrastruktur eksisting termasuk informasi mengenai keberfungsian.

Sistem berbasis web [www.nawasis.org](http://www.nawasis.org) ini cukup lengkap sebagai sistem sekaligus mekanisme pelaporan pembangunan sanitasi dan PPSPP khususnya. Sistem ini dapat

merekam kemajuan pembangunan sanitasi permukiman, baik pengelolaan air limbah domestik maupun persampahan. Di samping itu sistem ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan (dan memantau) kemajuan pendampingan implementasi SSK. Untuk memahami Nawasis, Pokja dapat membaca “Manual Aplikasi PPSP – Nawasis” yang menjelaskan sisi input dan output yang dapat dimanfaatkan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat untuk mekanisme monitoring dan evaluasi. Nawasis merupakan platform kolaboratif, termasuk untuk konsolidasi data sanitasi.

Nawasis memiliki dua modul, yaitu modul input/isian dan modul output atau menu data yang sudah terkonsolidasi. Penjelasananya adalah sebagai berikut.

1. Modul Input (isian) terdiri dari:
  - a. Modul kemajuan implementasi SSK (Program dan Pendanaan; Sarana dan Prasarana; Data Teknis/profil sanitasi)
  - b. Modul SSK (Penyusunan/Pemutakhiran dan Pendampingan Implementasi SSK)
2. Modul Output terdiri dari:
  - a. Data Infrastruktur
  - b. Data Investasi dan Pendanaan
  - c. Data Akses
  - d. Data Status (Profil) Sanitasi
  - e. Modul SSK (kemajuan penyusunan, pemutakhiran, dan pendampingan implementasi)

### Modul Input

Berikut adalah penjelasan ringkas tentang modul-modul input (isian) yang perinciannya dapat dipelajari pada “Manual Aplikasi PPSP – Nawasis” sebagai formulir-formulir yang harus diisi Pokja kabupaten/kota.

- Modul Program dan Pendanaan  
Modul ini merupakan modul utama dalam platform pemantauan/monitoring pembangunan sanitasi. Modul ini memuat antara lain: Program/Kegiatan dalam SSK (termasuk kegiatan dari masyarakat) dan dokumen perencanaan lain, Nilai Investasi (kebutuhan dana) berdasarkan sumber pendanaan, subsektor, penerima manfaat, serta output dan outcome masing-masing program/kegiatan.

Dengan mengisi modul ini, kabupaten/kota dan stakeholder sanitasi selanjutnya dapat mengetahui jumlah dan proporsi anggaran pembangunan sanitasi, peningkatan anggaran sanitasi, kemajuan implementasi SSK (terlasana/tidaknya suatu kegiatan) baik yang dilakukan pemerinrah daerah maupun masyarakat, dan sebagainya.

- Modul Sarana/Prasarana

Modul ini memuat informasi tentang sistem pengelolaan sanitasi, jenis dan jumlah infrastruktur sanitasi eksisting, baik air limbah domestik maupun persampahan. Selain itu, kabupaten/kota juga dapat mengisi formulir-formulir pada modul ini untuk memutakhirkan data sarana dan prasarana.

Dengan melakukan update secara berkala, seluruh jajaran pemerintahan dan stakeholder sanitasi di daerah dapat memperoleh informasi mengenai keberfungsian dan tingkat pemanfaatan (utilisasi) infrastruktur sanitasi yang telah dibangun. Informasi yang dihasilkan dari modul ini dapat digunakan kabupaten/kota dalam memberikan umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran.

- Modul Data Teknis/Pofil Sanitasi

Data teknis untuk air limbah dan persampahan diinput ke dalam Instrumen SSK dan dimutakhirkan secara rutin oleh kabupaten/kota. Pada modul ini kabupaten/kota dapat mengisikan hasilnya dan memantau peningkatan akses sanitasi layak sesuai dengan target yang telah disepakati bersama dengan provinsi. Ini menyangkut data teknis dan data non teknis.

- Modul SSK

Modul ini merupakan isian formulir kemajuan penyusunan, pemutakhiran, dan pendampingan implementasi SSK. Kabupaten/kota akan mengisi modul yang sesuai dengan masing-masing kondisi keberlakuan SSK-nya. Dengan mengisi modul ini, maka seluruh stakeholder pembangunan sanitasi di kabupaten/kota, provinsi, dan pusat dapat memantau setiap proses dan tahapan pencapaian milestone.

## Langkah

### *a. Modul Kemajuan Implementasi SSK*

Mengingat pengampu/pelaksana kegiatan pembangunan sanitasi permukiman terdiri dari beberapa OPD dan bahkan masyarakat dan organisasi-organisasi di luar pemerintahan, maka Pokja kabupaten/kota perlu mengkonsolidasi laporan dari dinas-dinas pengampu dan stakeholder sanitasi menjadi sebuah laporan monitoring yang komprehensif.

Dengan dukungan fasilitasi oleh fasilitator, Tim Kecil atau beberapa anggota Pokja yang ditunjuk dapat melaporkan proses pemantauan pembangunan sanitasi permukiman dengan cara mengkonsolidasikan laporan kegiatan dari OPD-OPD pengampu pelaksana melalui [www.nawasis.info](http://www.nawasis.info). Pokja kabupaten/kota dan provinsi dapat menempuh tiga langkah berikut:

- i. Pokja Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran secara berkala di Nawasis, pada tiga modul: Program dan Pendanaan; Sarana dan Prasarana, dan Data Teknis/Profil Sanitasi
- ii. Pokja Provinsi mengkonsolidasikan rencana Program/Kegiatan kabupaten/kota di wilayahnya yang terekam di Nawasis sebagai dasar (database) dalam proses Pra Lokakarya dan Lokakarya SSK.
- iii. Pokja Provinsi melaporkan secara rutin perkembangan kabupaten/kota di wilayahnya kepada Program Management Unit (PMU) PPSPP dengan tembusan kepada ketiga PIU.

### *b. Modul SSK*

Pemantauan terhadap setiap proses/milestone bertujuan untuk melihat kemajuan dan kedalaman informasi yang dihasilkan pada setiap kegiatan. Ada dua jenis modul berdasarkan keberlakuan (validitas SSK), yaitu:

- Untuk kabupaten/kota yang SSK-nya masih valid, maka mereka akan mengisi formulir pencapaian M1 s/d M4 yang berupa check list dan unggah bukti (MoM, file presentasi, dan sebagainya)
- Untuk kabupaten/kota yang sedang menyusun/memutakhirkan SSK, maka mereka mengisi formulir progres penyusunan SSK sesuai dengan kemajuan pencapaiannya sekaligus mengisi formulir pencapaian M1-M3 seperti pada

kasus pertama.

Berkaitan dengan pendampingan implementasi, ada lima milestone yang harus dipantau proses-outputnya agar nantinya Pokja dapat mengevaluasinya untuk perbaikan. Formulir yang harus diisi Pokja dapat langsung diakses pada [www.nawasis.org](http://www.nawasis.org). Milestone tersebut adalah:

*a. Milestone 1- Komitmen Kepala Daerah*

Pemantauan pada proses ini bertujuan untuk melihat kedalaman dan kelengkapan informasi kondisi profil sanitasi eksisting serta rekomendasinya berdasarkan analisis multiaspek: teknis, infrastruktur, kelembagaan, pendanaan, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat yang dikonsolidasikan dalam tabel-tabel seperti di Bab 2 SSK.

*b. Milestone 2 – Penetapan Kebijakan*

Pemantauan pada proses Milestone 2 difokuskan pemantauan proses mendapatkan komitmen kepala daerah (melalui sekretaris daerah) tentang pengembangan kebijakan untuk peningkatan akses dan penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan. Ini dimulai dengan (i) penetapan prioritas dan skala layanan (ii) pengawalan program kegiatan, baik internalisasi maupun eksternalisasi rencana program/kegiatan tahun N dan N+1.

*c. Milestone 3 – Uji Coba Model Layanan Sanitasi Skala Terbatas*

Pemantauan pada Milestone 3 difokuskan pada pelaksanaan ujicoba model layanan skala terbatas. Pada dasarnya pemantauan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah model yang dirancang dapat berjalan atau tidak di lapangan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar Pokja untuk melakukan evaluasi dan perbaikan model layanan.

Tiga hal yang dipantau dalam pelaksanaan uji coba model layanan mencakup:

- Efektif/tidaknya koordinasi kerja/tugas regulator-operator.
- Hambatan pelaksanaan uji coba model.
- Keefektifan skema penyelenggaraan layanan oleh OPD induk sebagai regulator.

*d. Milestone 4 – Uji Coba Model Layanan Sanitasi Skala Penuh*

Ini dilakukan pada tahun ke-2 pendampingan implementasi SSK. Pemantauan pada Milestone 4 difokuskan pada pelaksanaan model layanan sanitasi, air limbah atau persampahan, di tahun N+1 dan tahun-tahun sesudahnya. Fokus pemantauan, seperti pada Milestone 3, akan mencakup tiga hal di atas dalam skala yang lebih luas.

Formulir isian untuk Modul SSK, yakni terkait penyusunan, pemutakhiran, dan pendampingan implementasi SSK dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kegiatan/Proses	Cek	Ungah Bukti SSK Masih Valid	Ungah Bukti Penyusunan SSK
<b>Kegiatan 1-1: Mendapatkan Kesamaan Persepsi di Tingkat Pokja</b>				
1	Menyelenggarakan rapat koordinasi perdana		MoM	MoM dan Rencana Kerja
2	Memetakan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi		Perbaikan data Bab 2 SSK	
3	Menyiapkan rekomendasi penanganan permasalahan sanitasi, dan		Perbaikan data Bab 2 SSK	Draf Bab 1 Draf Bab 2 Draf Bab 3
4	Menyiapkan materi advokasi untuk kepala-kepala OPD			
<b>Kegiatan 1-2: Mendapatkan Dukungan Kepala Dinas (OPD)</b>				
1	Menyusun jadwal dan pembagian tugas untuk advokasi kepala dinas dan Sekretaris Daerah		MoM	
2	Melakukan audiensi dengan para kepala OPD untuk mendapatkan input tentang Rekomendasi strategis		MoM	Input OPD Perbaikan Bab 1, 2, 3
3	Menyusun draf Strategi Pembangunan Sanitasi		Rekomendasi strategis	
4	Menyusun usulan paket kebijakan pembangunan sanitasi		Usulan paket kebijakan	Draf Bab 4
<b>Kegiatan 1-3: Mendapatkan Komiten Bupati/Walikota</b>				
1	Menyiapkan materi advokasi untuk bupati/walikota dengan substansi profil sanitasi dan Usulan Paket kebijakan			
2	Melakukan audiensi dengan bupati/walikota untuk mendapatkan komitmen pembangunan sanitasi		MoM	Bab 1, 2 Final Perbaikan Draf Bab 3, 4
<b>Kegiatan 2-1: Menetapkan Prioritas dan Skala Layanan</b>				
1	Menetapkan prioritas kawasan/komunitas layanan		Usulan prioritas	
2	Mendapatkan dukungan Ketua TAPD		MoM	
3	Menetapkan strategi pembangunan sanitasi		MoM	Bab 3, 4 Final
<b>Kegiatan 2-2: Menyusun Program dan Kegiatan</b>				
1	Menyusun Program dan Kegiatan			Draf Bab 5
2	Internalisasi dan Eksternalisasi Program dan Kegiatan		Hasil Internalisasi dan Eksternalisasi	
<b>Kegiatan 3-1: Uji Coba Model Layanan Sanitasi Skala Terbatas</b>				
1	Pelaksanaan kegiatan ( <i>quick win</i> )			Bab 5 Final
2	Pemantauan			
3	Evaluasi		Catatan dan Rekomendasi perbaikan model	Bab 6 Final
<b>Kegiatan 4: Uji Coba Model Layanan Sanitasi Skala Penuh</b>				
1	Melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan sebelumnya		Pengisian di Modul Isian Kemajuan Pembangunan Sanitasi	
2	Melakukan monitoring pelaksanaan uji coba model layanan			
3	Melakukan evaluasi, modifikasi, dan penyesuaian model layanan		Catatan dan Rekomendasi perbaikan model	

Tabel Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK

No	Objek Pemantauan	Rencana Monev												Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan Penerima Laporan (Dinas/Badan/Instansi)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/Pemantau		
1	Input Capaian Strategis				X									BAPPLITBANGDA	PUPRPERKIM, DLH dan DINKES	PUPRPERKIM, DLH	APRIL	BAPPLITBANGDA/SETDA
2	Input Menu Investasi				X									BAPPLITBANGDA	PUPRPERKIM, DLH dan DINKES	PUPRPERKIM, DLH	APRIL	BAPPLITBANGDA/SETDA
3	Input Menu Akses				X	X								BAPPLITBANGDA	PUPRPERKIM, DLH dan DINKES	PUPRPERKIM, DLH	APRIL - MEI	BAPPLITBANGDA/SETDA
4	Input Menu Infrastruktur				X	X								BAPPLITBANGDA	PUPRPERKIM, DLH dan DINKES	PUPRPERKIM, DLH	APRIL – MEI	BAPPLITBANGDA/SETDA
5	Input Menu Progres				X	X	X	X	X	X	X	X		BAPPLITBANGDA	PUPRPERKIM, DLH dan DINKES	PUPRPERKIM, DLH dan DINKES	APRIL – NOVEMBER	BAPPLITBANGDA/SETDA
6	Pelatihan Nawasis			X										BAPPLITBANGDA	BAPPLITBANGDA.PUPRPERKIM,DLH dan BPMDes	BAPPLITBANGDA.PUPRPERKIM,DLH dan BPMDes	MARET	BAPPLITBANGDA/SETDA

Sumber : Pokja PPAS Kabupaten Barito Timur

# LAMPIRAN 1

RINGKASAI EKSEKUTIF KAJIAN EHRA

## **LAMPIRAN 1. Ringkasan Eksekutif Kajian EHRA**

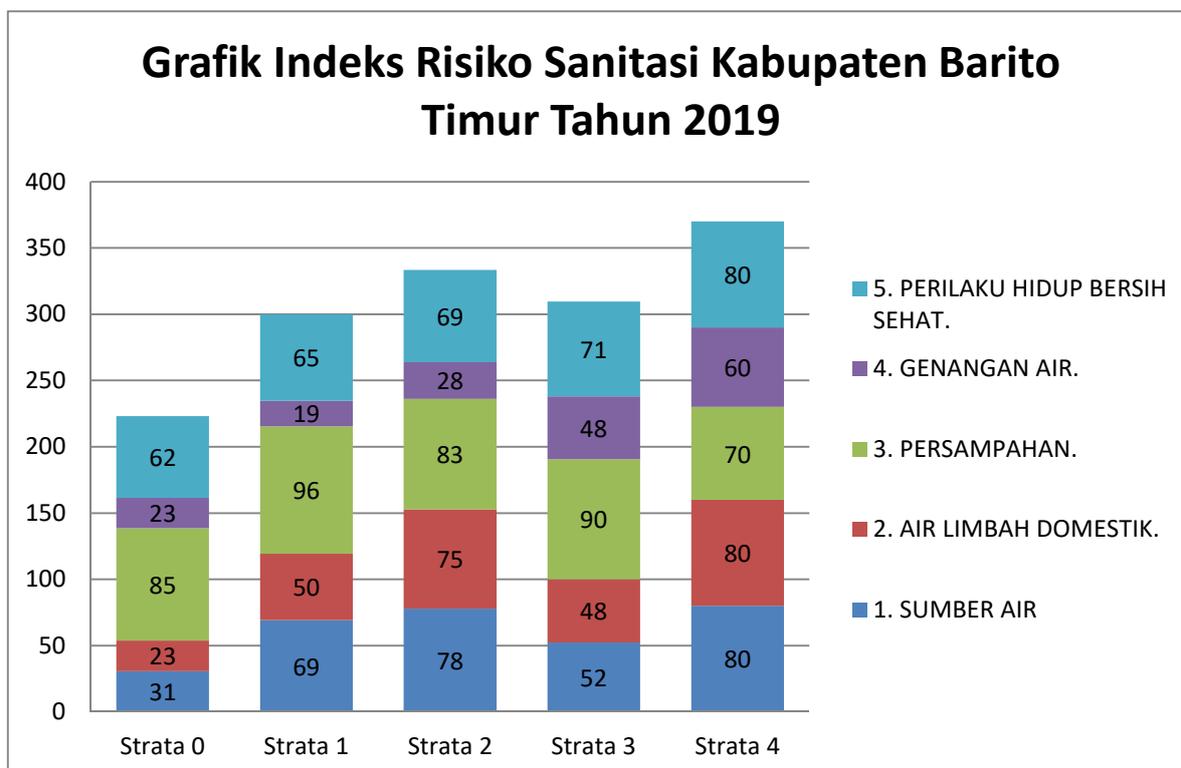
Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (*Environmental Health Risk Assessment* = EHRA) adalah sebuah survey partisipatif di tingkat Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku kesehatan masyarakat pada skala rumah tangga. Dalam pelaksanaan studi EHRA menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan 2 (dua) tekni pengumpulan data, yaitu 1) wawancara (*interview*) dan 2) pengamatan (*observation*). Pewawancara dan pelaku pengamatan dalam EHRA adalah Enumerator yaitu petugas kesehatan (perawat atau bidan) yang bertugas di desa atau kader kesehatan di desa studi EHRA. Sementara sanitarian puskesmas bertugas sebagai supervisor wilayah dan kepala puskesmas bertugas sebagai koordinator wilayah selama pelaksanaan survey studi EHRA.

Unit sampling utama (*primary sampling*) adalah RT (Rukun Tetangga). Jumlah sampel RT per desa/kelurahan minimal 8 RT dan jumlah sampel per RT sebanyak 5 responden/rumah. Dengan demikian jumlah sampel per desa/kelurahan adalah minimal 40 responden. Metode penentuan target area survey dilakukan secara geografi dan demografi melalui proses yang dinamakan stratified random sampling. Hasil stratified random sampling ini juga sekaligus bisa digunakan sebagai indikasi awal lingkungan berisiko. Kriteria utama penetapan strata tersebut adalah Kepadatan Penduduk, Angka Kemiskinan, daerah/wilayah yang dialiri sungai/kali/saluran drainase/saluran irigasi, daerah terkena banjir.

Dari 103 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Barito Timur terbagi 5 strata yaitu strata 0 sebanyak 13 desa (12,5 %), strata 1 sebanyak 21 desa (25 %), strata 2 sebanyak 36 desa (34,61 %), strata 3 sebanyak 21 desa (20,19 %) dan strata 4 sebanyak 10 desa (9,61 %). Untuk penentuan jumlah desa/kelurahan target area studi EHRA di Kabupaten Barito Timur diambil 100% dari total desa, sehingga total respondennya adalah 4.160 responden/ rumah tangga.

Hasil analisis indeks risiko sanitasi Kabupaten Barito Timur adalah: a) Sumber air minum kabupaten Barito Timur yang beresiko paling tinggi terhadap pencemaran sumber air minum adalah desa/kelurahan pada strata 4 (80%), dilanjutkan desa pada strata 2 (78%), strata 1 (69%), strata 3 (52%), dan terakhir adalah strata 0 (31%) dikarenakan masyarakat masih banyak menggunakan air sungai sebagai sumber air minum tanpa melalui proses pengolahan; b) Air limbah domestik Kabupaten Barito Timur yang beresiko paling tinggi dikarenakan rumah tangga responden belum mempunyai jamban sehat keluarga atau septik tanknya belum memenuhi syarat kesehatan adalah desa/kelurahan pada strata 4 (80%), dilanjutkan desa pada strata 2 (75%), strata 1 (50%) dan strata 3 (48%), dan terakhir adalah strata 0 (23%); c) Persampahan kabupaten Barito Timur yang beresiko paling tinggi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga yang tidak sehat baik itu pembuangan sampah maupun praktik 3R (reduce, reuse dan recycle) yang tidak optimal adalah desa/kelurahan pada strata 1 (96%), dilanjutkan desa pada strata 3 (90%), strata 0 (85%), strata 2 (83%) dan terakhir adalah strata 4 (70%); d) Genangan air Kabupaten Barito Timur yang beresiko paling tinggi terhadap genangan air adalah pada strata 4 (60 %), dilanjutkan desa pada strata 3 (48%), strata 2 (28%), strata 0 (23%) dan terakhir adalah strata 1 (19%). Hal ini disebabkan desa/kelurahan pada strata 4 dan 3 berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai sedangkan desa / kelurahan pada strata 2, 1 dan 0 berada di daerah dataran tinggi, tetapi secara keseluruhan strata, desa/ kelurahan tidak mempunyai saluran pembuangan air limbah (SPAL); e) Perilaku hidup bersih dan sehat Kabupaten Barito Timur yang masyarakatnya berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang paling rendah adalah desa/kelurahan pada strata 4 (80%), dilanjutkan strata 3 (71%), dilanjutkan desa pada strata 2 (69%), kemudian strata 1 (65%) dan terakhir adalah strata 0 (62%). Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang rendah dalam masyarakat menyebabkan lingkungan tidak bersih, kotor dan hidup tidak sehat sehingga masyarakat mudah terserang berbagai penyakit seperti penyakit diare, penyakit kecacangan, penyakit kulit dan lain-lain. Kebiasaan masyarakat tersebut harus dirubah dan diluruskan ke arah yang mendukung pola hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar.

Prioritas permasalahan sanitasi di Kabupaten Barito Timur berdasarkan Indeks Risiko Sanitasi (IRS) sesuai dengan persentasenya adalah masalah persampahan (85%), perilaku hidup bersih dan sehat (70%), sumber air minum (62%), air limbah domestik (55%), dan genangan air (36%).



# LAMPIRAN 2

RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN KEUANGAN  
DAERAH DAN PEREKONOMIAN DAERAH

## **LAMPIRAN 2. Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah**

SKPD yang terkait langsung dengan pembangunan sanitasi di Kabupaten Barito Timur, meliputi kegiatan investasi sanitasi maupun operasional/pemeliharaan (OM) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat , Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan.

Rata-rata pertumbuhan belanja sanitasi Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2021 yaitu sebesar 1,22 %. Sedangkan belanja sanitasi APBD murni dengan pertumbuhan rata-rata 0,19 %. Namun demikian belanja sanitasi di Kabupaten Barito Timur masih berada di bawah 2% dari total belanja langsung. Terkait retribusi sanitasi yaitu retribusi air limbah, retribusi sampah, dan retribusi drainase, di Kabupaten Barito Timur belum optimal dilaksanakan sebagai salah satu retribusi untuk pendapatan daerah. Dari hasil pengolahan data, diketahui bahwa belanja sanitasi perkapita Kabupaten Barito Timur dari tahun 2017 – 2021 terus mengalami kenaikan, yaitu dari Rp. 892.880.000 hingga sebesar Rp. 3.522.053.601 pada tahun 2021.

Data rekapitulasi realisasi APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2021, Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi OPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2021, Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2021, Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten untuk belanja sanitasi tahun 2017-2021 dan realisasi dan potensi retribusi sanitasi perkapita dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.



Tabel Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2027

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		N-5	N-4	N-3	N-2	N-1	
		2017	2018	2019	2020	2021	
<b>A</b>	<b>Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3)</b>	<b>620.872.802.945</b>	<b>657.579.076.215</b>	<b>648.797.369.839</b>	<b>597.328.291.546</b>	<b>100.672.894.137</b>	<b>2.625.250.434.682</b>
<b>a.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>100.370.174.462</b>	<b>47.824.632.244</b>	<b>58.023.576.121</b>	<b>61.662.173.128</b>	<b>98.462.990.679</b>	<b>366.343.546.634</b>
a.1.1	Pajak daerah	51.907.816.235	11.350.422.632	15.438.800.775	19.155.610.211	11.328.902.246	109.181.552.099
a.1.2	Retribusi daerah	2.448.459.173	2.061.191.752	2.251.525.262	2.111.338.328	2.174.988.530	11.047.503.045
a.1.3	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.638.910.497	8.635.182.355	7.681.995.596	7.738.215.980	11.499.947.418	44.194.251.846
a.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	37.374.988.557	25.777.835.506	32.651.254.489	32.657.008.609	73.459.152.484	201.920.239.644
<b>a.2</b>	<b>Dana Perimbangan (Transfer)</b>	<b>518.671.972.889</b>	<b>551.724.984.708</b>	<b>573.066.330.467</b>	<b>513.719.129.708</b>	<b>-</b>	<b>2.157.182.417.772</b>
a.2.1	Dana bagi hasil	15.671.477.889	23.148.641.698	14.167.531.400	19.212.070.527	-	72.199.721.514
a.2.2	Dana alokasi umum	477.145.707.000	478.975.191.000	491.080.267.000	443.711.145.000	-	1.890.912.310.000
a.2.3	Dana alokasi khusus	25.854.788.000	49.601.152.010	67.818.532.067	50.795.914.181	-	194.070.386.258
<b>a.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>1.830.655.594</b>	<b>58.029.459.263</b>	<b>17.707.463.251</b>	<b>21.946.988.710</b>	<b>2.209.903.458</b>	<b>101.724.470.276</b>
a.3.1	Hibah	1.680.655.594	13.787.123.390	17.707.463.251	21.796.988.710	2.209.903.458	57.182.134.402
a.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
a.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada kab./kota	-	14.992.335.874	-	-	-	14.992.335.874
a.3.4	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	-	27.750.000.000	-	-	-	27.750.000.000
a.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi/pemerintah daerah lainnya	150.000.000	1.500.000.000	-	150.000.000	-	1.800.000.000
<b>B</b>	<b>Belanja (b1 + b.2)</b>	<b>1.029.159.533.336</b>	<b>1.092.329.733.948</b>	<b>1.211.098.137.753</b>	<b>1.096.769.240.859</b>	<b>1.258.947.378.780</b>	<b>5.688.304.024.677</b>
<b>b.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>361.287.831.683</b>	<b>438.249.152.194</b>	<b>500.539.484.250</b>	<b>502.271.886.190</b>	<b>585.365.496.202</b>	<b>2.387.713.850.519</b>
b.1.1	Belanja pegawai	322.437.622.255	343.682.906.085	334.523.665.237	313.247.508.753	338.389.678.382	1.652.281.380.711
b.1.2	Bunga	-	-	-	-	-	-
b.1.3	Subsidi	450.000.000	450.000.000	600.000.000	599.999.999	600.000.000	2.699.999.999
b.1.4	Hibah	38.016.686.909	49.864.780.979	12.175.400.000	17.232.460.000	51.112.614.751	168.401.942.639
b.1.5	Bantuan sosial	383.522.520	889.520.000	567.470.000	528.400.000	11.149.721.170	13.518.633.690
b.1.6	Belanja bagi hasil	-	-	-	-	7.288.350.126	7.288.350.126
b.1.7	Bantuan keuangan	-	43.361.945.130	152.672.949.013	161.553.421.509	151.716.331.928	509.304.647.580
b.1.8	Belanja tidak terduga	-	-	-	9.110.095.929	25.108.799.846	34.218.895.775



## Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

<b>b.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	667.871.701.653	654.080.581.754	710.558.653.503	594.497.354.669	673.581.882.578	3.300.590.174.157
b.2.1	Belanja pegawai	322.437.622.255	343.682.906.085	334.523.665.237	313.247.508.753	338.389.678.382	1.652.281.380.711
b.2.2	Belanja barang dan jasa	217.875.873.546	218.116.492.012	258.986.941.874	209.117.294.430	212.814.960.293	1.116.911.562.155
b.2.3	Belanja modal	127.558.205.852	92.281.183.657	117.048.046.392	72.132.551.486	122.377.243.904	531.397.231.291
<b>C</b>	<b>Pembiayaan</b>						

### Surplus/Defisit Anggaran

Sumber : Realisasi APBD tahun ... - ..., diolah

Keterangan : n = tahun penyusunan pemutakhiran SSK

**Rekapitulasi Realisasi belanja Sanitasi OPD Kab. Barito Timur Tahun 2017- 2021**

No	OPD	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		N-5 2017	N-4 2018	N-3 2019	N-2 2020	N-1 2021	
1	PU - CK	4.385.000.000	4.133.450.000	1.104.880.000	4.274.659.000	3.537.668.970	0,48
1a.	Investasi	4.385.000.000	4.123.450.000	1.092.880.000	4.262.659.000	3.524.668.970	0,48
1b.	Operasional/pemeliharaan (OM)	-	10.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	0,09
2	DLH	600.873.209	669.636.910	735.966.000	735.969.000	1.755.086.244	0,40
2a.	Investasi	-	-	-	-	-	0
2b.	Operasional/Pemeliharaan	600.873.209	669.636.910	735.966.000	735.969.000	1.755.086.244	0,40
3	PU - PERKIM	85.472.000	959.455.207	586.609.999	120.000.000	511.249.221	0
3a	Investasi	-	-	-	-	-	0
3b	Operasional/Pemeliharaan	85.472.000	959.455.207	586.609.999	120.000.000	511.249.221	3,08
4	Dinkes	344.365.000	252.689.500	251.025.000	169.260.000	98.250.000	0
	Investasi	344.365.000	252.689.500	251.025.000	169.260.000	98.250.000	-0,25
	Operasional/Pemeliharaan	-	-	-	-	-	0
5	Bappeda	70.237.000	40.520.000	41.455.000	22.869.800	50.660.000	0,09
	Investasi	70.237.000	40.520.000	41.455.000	22.869.800	50.660.000	0,09
	Operasional/Pemeliharaan	-	-	-	-	-	0
6	-	-	-	-	-	-	0
	Investasi	-	-	-	-	-	0
	Operasional/Pemeliharaan	-	-	-	-	-	0
7	-	-	-	-	-	-	0
7.a	Investasi	-	-	-	-	-	0
7.b	Operasional/Pemeliharaan	-	-	-	-	-	0
8	Belanja Sanitasi (1+2+3+...n)	5.056.110.209	4.843.606.910	1.882.301.000	5.033.497.800	5.343.415.214	0,27
9	Pendanaan investasi sanitasi total (1a+2a+3a+...na)	4.455.237.000	4.163.970.000	1.134.335.000	4.285.528.800	3.575.328.970	0,45
10	Pendanaan JM (1b+2b+3b+...nb)	671.110.209	720.156.910	789.421.000	770.838.800	1.818.746.244	0,38
11	Belanja Langsung	351.118.063.686	116.932.350.154	723.901.523.503	621.968.310.598	920.557.700.399	1,22
12	Proporsi Belanja Sanitasi – Belanja Langsung (8/11)	0,014400029	0,0414223	0,002600217	0,008092853	0,005804541	0,69
13	Proporsi Investasi Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (9/8)	88%	86%	60%	85%	67%	-0,03
14	Proporsi OM DSanitasi – Total Belanja (10/8)	13%	15%	42%	15%	34%	0,63

Sumber : Realisasi APBD tahun 2017 - 2021, diolah oleh Pokja PPAS Kab. Barito Timur



**Tabel Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kab/Kota Tahun 2017–2021**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata Rata Pertumbuhan
		N-5	N-4	N-3	N-2	N-1	
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )	1.145.238.209	1.030.615.410	1.097.277.000	1.103.221.000	1.961.006.875	0,19
1.1	Air Limbah Domestik	200.000.000	110.286.000	110.286.000	197.992.000	107.670.631	-0,03
1.2	Sampah rumah tangga	600.873.209	667.639.910	735.966.000	735.969.000	1.755.086.244	0,40
1.3	PHBS	344.365.000	252.689.500	251.025.000	169.260.000	98.250.000	-0,25
2	Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )	2.888.600	4.914.677	845.880	4.152.373	3.413.629	0,90
2.1	DAK Sanitasi	2.888.600	3.624.000	845.880	4.152.373	3.413.629	0,80
2.2	DAK Lingkungan Hidup	-	1.290.677	-	-	-	0,00
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	0,00
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	0,00
4	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	0,00
<b>Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)</b>		<b>1.142.349.609</b>	<b>1.025.700.733</b>	<b>1.096.431.120</b>	<b>1.099.068.627</b>	<b>1.957.593.246</b>	<b>0,19</b>
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>351.118.063.686</b>	<b>116.932.350.154</b>	<b>723.901.523.503</b>	<b>621.968.310.598</b>	<b>920.557.700.399</b>	<b>1,22</b>
<b>% APBD murni terhadap Belanja Langsung</b>		<b>0%</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,31</b>

Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3) Total Belanja Langsung

% APBD murni terhadap Belanja Langsung

Sumber : Realisasi APBD tahun 2017 - 2021, diolah Pokja PPAS Kab. Barito Timur

**Tabel Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2021**

No	Deskripsi	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata Rata Pertumbuhan
		N-5	N-4	N-3	N-2	N-1	
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Total Belanja Sanitasi Kabupaten/Kota	892.880.000	4.152.373.000	3.414.382.970	4.152.373.000	3.522.053.601	0,88
2	Jumlah Penduduk	120.254	123.557	113.974	113.229	114.243	-0,01
<b>Belanja Sanitasi Perkapita (1 / 2)</b>		<b>7.425</b>	<b>33.607</b>	<b>29.958</b>	<b>36.672</b>	<b>30.829</b>	<b>0,87</b>

Sumber : APBD dan BPS, diolah Pokja PPAS Kab. Barito Timur

**Tabel Realisasi dan Potensi retribusi Sanitasi per Kapita**

No	OPD	Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)					Pertumbuhan (%)
		N-5 2017	N-4 2018	N-3 2019	N-2 2020	N-1 2021	
1	Retribusi Air Limbah						0
1.a	Realisasi retribusi	-	-	-	-	-	0
1.b	Potensi retribusi	-	-	-	-	-	0
2	Retribusi Sampah						0
2.a	Realisasi retribusi	-	-	-	-	-	0
2.b	Potensi retribusi	-	-	-	-	-	0
4	Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a)	-	-	-	-	-	0
5	Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b)	-	-	-	-	-	0
6	Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)	0	0	0	0	0	0

Sumber : Pokja PPAS Kab. Barito Timur

**Tabel peta Perekonomian Kabupaten Barito Timur 2017-2021**

No	DESKRIPSI	Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)				
		N-5 2017	N-4 2018	N-3 2019	N-2 2020	N-1 2021
1	OPDRB harga konstan (struktur perekonomian) (Rp)	11.103,50	12.095,95	12.876,44	12.285,85	13.286,29
2	Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota (Rp)	92,34	97,89	105,30	108,67	116,30
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,98	5,71	5,45	- 2,73	2,97

Sumber : Pokja PPAS Kab. Barito Timur

# LAMPIRAN 3

PETA RENCANA PENGEMBANGAN  
BERDASARKAN RENCANA INDUK (TIDAK ADA)

# LAMPIRAN 4

LEMBAR KERJA ANALISIS AREA BERISIKO  
MENGUNAKAN INSTRUMEN SSK

#### **LAMPIRAN 4. Lembar Kerja Analisis Area Berisiko menggunakan Instrumen SSK**

SKPD yang terkait langsung dengan pembangunan sanitasi di Kabupaten Barito Timur, meliputi kegiatan investasi sanitasi maupun operasional/pemeliharaan (OM) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat , Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan.

Rata-rata pertumbuhan belanja sanitasi Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2021 yaitu sebesar 1,22 %. Sedangkan belanja sanitasi APBD murni dengan pertumbuhan rata-rata 0,19 %. Namun demikian belanja sanitasi di Kabupaten Barito Timur masih berada di bawah 2% dari total belanja langsung. Terkait retribusi sanitasi yaitu retribusi air limbah, retribusi sampah, dan retribusi drainase, di Kabupaten Barito Timur belum optimal dilaksanakan sebagai salah satu retribusi untuk pendapatan daerah. Dari hasil pengolahan data, diketahui bahwa belanja sanitasi perkapita Kabupaten Barito Timur dari tahun 2017 – 2021 terus mengalami kenaikan, yaitu dari Rp. 892.880.000 hingga sebesar Rp. 3.522.053.601 pada tahun 2021.

Data rekapitulasi realisasi APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2021, Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi OPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2021, Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2021, Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten untuk belanja sanitasi tahun 2017-2021 dan realisasi dan potensi retribusi sanitasi perkapita dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

	Pembobotan EXPOSURE (%)		
	Air Limbah	Sampah	Drainase
Data Sekunder	30%	60%	50%
Indeks Risiko Sanitasi - EHRA	60%	35%	40%
Persepsi SKPD	10%	5%	10%

	Pembobotan IMPACT (%)
	Jumlah Penduduk
Kepadatan Penduduk	40%
Angka Kemiskinan	40%
Fungsi Urban - Urban/rural	2%

Kode BPS Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode BPS Kelurahan/Desa	Nama Kelurahan/Desa	IRS-EHRA					DLH			Baplitbangda			DPUPRPERKIM			DPMDSos		
				Genangan Air	Persampahan	Perilaku Hidup Bersih Sehat	Air Limbah Domestik	Sumber Air - di tingkat rumah tangga	Air Limbah Domestik	Sampah	Drainase Lingkungan	Air Limbah Domestik	Sampah	Drainase Lingkungan	Air Limbah Domestik	Sampah	Drainase Lingkungan	Air Limbah Domestik	Sampah	Drainase Lingkungan
				Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan
62120100	BENUA LIMA	6212010001	TANIRAN	5	35	40	86	25	1	3	1	1	2	1	2	3	2	2	2	
62120100	BENUA LIMA	6212010002	KANDRIS	15	44	38	88	26	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	
62120100	BENUA LIMA	6212010003	BANYU LANDAS	15	47	33	89	39	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2		
62120100	BENUA LIMA	6212010004	BAGOK	15	49	38	91	45	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2		
62120100	BENUA LIMA	6212010005	BAMBAN	21	44	38	63	44	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2		
62120100	BENUA LIMA	6212010006	TEWAH PUPUH	15	47	33	93	38	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2		
62120100	BENUA LIMA	6212010007	GUDANG SENG	21	70	48	83	44	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020001	PULAU PATAI	85	49	40	97	87	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020002	SARAPAT (EX HARARA)	81	49	45	95	91	2	2	1	1	1	2	2	2	3	2		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020003	MAGANTIS	80	50	46	100	89	3	3	1	2	1	2	3	3	3	2		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020004	JAAR	50	44	41	96	47	3	4	1	2	2	2	2	2	2	3		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020005	MATABU	50	44	41	96	47	2	3	1	1	1	2	3	2	2	3		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020006	TAMIANG LAYANG	27	32	38	70	74	4	4	3	2	2	1	3	3	4	3		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020007	JAWETEN	60	49	34	80	87	3	2	1	1	1	2	2	3	3	3		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020008	HARINGEN	80	50	40	100	89	3	2	1	2	2	2	2	2	3	2		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020009	DORONG	70	50	34	86	85	2	2	2	1	1	2	3	2	4	3		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020010	DIDI	3	50	40	89	68	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020011	KARANG LANGIT	3	50	32	88	43	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020012	HARARA	79	49	44	90	83	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020013	MANGKARAP	38	47	42	89	56	1	1	1	2	2	2	3	2	3	2		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020014	MATARRAH	3	50	40	87	68	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020015	GUMPA	33	48	36	93	53	2	1	1	2	2	2	2	2	3	2		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020016	MARAGUT	33	48	5	96	53	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2		
62120200	DUSUN TIMUR	6212020017	SUMUR	63	50	31	87	90	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2		
62120210	PAJU EPAT	6212021001	TELANG	13	41	30	93	49	1	1	1	2	2	1	2	2	3	2		
62120210	PAJU EPAT	6212021002	MURUTUWU	5	46	44	93	51	1	1	1	2	2	1	2	2	3	2		
62120210	PAJU EPAT	6212021003	BALAWA	3	44	34	94	43	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2		
62120210	PAJU EPAT	6212021004	MAIPE	10	47	34	93	33	1	1	1	2	1	2	2	2	3	2		
62120210	PAJU EPAT	6212021005	TELANG BARU	30	50	17	50	24	2	2	1	2	2	2	3	2	3	3		
62120210	PAJU EPAT	6212021006	JURU BANU	93	45	60	40	49	2	1	1	2	2	3	2	3	4	4		
62120210	PAJU EPAT	6212021007	TAMPU LANGIT	33	48	87	20	44	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4		
62120210	PAJU EPAT	6212021008	SIONG	13	44	20	88	18	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2		
62120210	PAJU EPAT	6212021009	KALINAPU	98	50	62	40	49	1	1	1	2	2	4	3	2	4	4		
62120300	AWANG	6212030001	JANAH JARI	10	50	75	100	73	1	1	1	1	2	1	2	2	3	3		
62120300	AWANG	6212030002	BANGKIRAYEN	8	50	75	100	65	1	1	1	2	1	2	2	2	3	3		
62120300	AWANG	6212030003	TANGKAN	30	50	82	100	61	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3		
62120300	AWANG	6212030004	AMPARI	5	50	75	100	81	1	2	1	1	1	2	2	3	2	2		
62120300	AWANG	6212030005	WUNGKUR NANAKAN	18	50	75	100	56	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2		
62120300	AWANG	6212030006	HAYAPING	23	50	76	100	75	2	1	2	1	1	2	2	2	3	3		
62120300	AWANG	6212030007	BIWAN	5	50	76	100	61	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3		
62120300	AWANG	6212030008	APAR BATU	5	50	82	100	63	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2		
62120300	AWANG	6212030009	PIANGGU	5	50	84	100	63	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2		
62120300	AWANG	6212030010	DANAU	5	50	79	100	78	1	1	1	2	1	2	2	2	3	2		
62120300	AWANG	6212030011	JANAH MANSIWUI	5	50	79	100	79	1	1	1	2	2	2	2	2	4	4		
62120400	PATANGKEP TUTUI	6212040001	PULAU PADANG	58	48	30	93	43	1	2	3	1	1	2	2	2	3	3		
62120400	PATANGKEP TUTUI	6212040002	RAMANIA	50	44	35	92	41	1	2	1	1	2	1	2	2	3	2		
62120400	PATANGKEP TUTUI	6212040003	KAMBITIN	23	50	28	91	27	2	2	1	2	2	2	2	2	3	2		
62120400	PATANGKEP TUTUI	6212040004	BENTOT	45	49	29	90	45	2	2	1	2	2	2	2	3	3	3		
62120400	PATANGKEP TUTUI	6212040005	AMPARI BORA	23	44	46	94	73	1	1	1	1	2	1	2	2	3	2		
62120400	PATANGKEP TUTUI	6212040006	KOTAM	12	38	52	95	51	1	1	1	1	2	1	3	2	2	2		
62120400	PATANGKEP TUTUI	6212040007	BETANG NALONG	3	43	30	94	68	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2		
62120400	PATANGKEP TUTUI	6212040008	MAWANI	18	49	44	98	75	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2		
62120400	PATANGKEP TUTUI	6212040009	JANGO	23	44	46	93	66	1	1	1	2	1	3	2	2	3	2		
62120400	PATANGKEP TUTUI	6212040010	LALAP	20	46	39	93	69	2	1	1	2	2	2	2	2	3	2		



62120500 DUSUN TENGAH	6212050004 SAING	7	40	41	95	21	2	2	1	1	1	1	2	2	3	3	3
62120500 DUSUN TENGAH	6212050005 RODOK	5	34	32	90	39	2	3	1	1	1	2	3	3	3	3	3
62120500 DUSUN TENGAH	6212050006 AMPAH DUA	58	46	24	94	54	2	2	1	1	2	2	2	2	4	4	4
62120500 DUSUN TENGAH	6212050007 PUTAI	15	44	32	81	41	3	3	1	2	2	2	3	3	3	3	3
62120500 DUSUN TENGAH	6212050008 AMPAH KOTA	35	44	50	96	48	4	4	4	2	2	2	1	4	4	4	4
62120500 DUSUN TENGAH	6212050009 NETAMPIN	24	48	38	86	21	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3
62120500 DUSUN TENGAH	6212050010 SUMBER GARUNGUNG	43	44	44	93	35	2	1	2	2	2	1	2	2	3	2	3
62120500 DUSUN TENGAH	6212050011 MUARA AWANG	15	48	49	93	49	1	1	1	2	2	3	2	2	3	2	3
62120510 RAREN BATUAH	6212051001 UNSUM	8	48	31	87	64	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3
62120510 RAREN BATUAH	6212051002 BARUYAN	5	44	37	71	46	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3
62120510 RAREN BATUAH	6212051003 LENGANG	50	63	30	82	21	2	2	1	1	2	1	2	3	2	2	3
62120510 RAREN BATUAH	6212051004 PURI	40	37	40	77	47	2	2	1	1	2	1	2	3	2	3	2
62120510 RAREN BATUAH	6212051005 BATUAH	30	48	35	88	49	2	2	1	1	1	1	2	2	3	2	2
62120510 RAREN BATUAH	6212051006 TURAN AMIS	5	44	30	84	46	2	2	1	2	2	2	2	2	3	2	2
62120510 RAREN BATUAH	6212051007 TANGKUM	30	40	31	73	42	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2
62120510 RAREN BATUAH	6212051008 SIBUNG	30	48	31	88	49	2	2	2	1	2	1	2	2	3	2	2
62120510 RAREN BATUAH	6212051009 MALINTUT	25	46	26	88	14	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
62120520 PAKU	6212052001 TAMPA	38	45	30	93	38	2	2	1	1	1	1	2	2	3	3	3
62120520 PAKU	6212052002 RUNGGU RAYA	15	47	32	89	23	1	2	1	1	1	1	2	2	3	3	3
62120520 PAKU	6212052003 PATUNG	10	46	26	87	53	2	2	1	1	2	1	2	2	3	2	3
62120520 PAKU	6212052004 KALAMUS	70	49	30	94	41	2	2	1	2	1	1	2	2	3	3	3
62120520 PAKU	6212052005 SIMPANG BINGKUANG	20	49	12	93	30	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2	3
62120520 PAKU	6212052006 KUPANG BARU	13	48	31	89	63	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	3
62120520 PAKU	6212052007 LUAU JAWUK	65	43	26	92	53	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	3
62120520 PAKU	6212052008 TARINSING	5	50	46	92	28	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
62120520 PAKU	6212052009 BANTAI NAPU	76	35	43	93	30	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3
62120520 PAKU	6212052010 PANGKAN	70	49	30	93	20	1	2	2	1	1	1	2	2	3	2	3
62120520 PAKU	6212052011 GANDRUNG	8	26	16	100	87	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3
62120520 PAKU	6212052012 PAKU BETO	55	50	54	98	13	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	3
62120530 KARUSEN JANANG	6212053001 DAYU	15	30	32	92	32	3	2	2	1	1	1	2	3	3	3	3
62120530 KARUSEN JANANG	6212053002 WURAN	8	36	32	88	70	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3
62120530 KARUSEN JANANG	6212053003 IPU MEA	3	27	32	86	39	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3
62120530 KARUSEN JANANG	6212053004 SIMPANG NANENG	5	28	26	93	61	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2
62120530 KARUSEN JANANG	6212053005 LAGAN	5	35	39	92	69	1	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2
62120530 KARUSEN JANANG	6212053006 PUTUT TAWULUH	2	34	47	93	63	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	3
62120530 KARUSEN JANANG	6212053007 KANDRIS	5	28	26	85	61	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2
62120600 PEMATANG KARAU	6212060001 MUARA PALANTAU	100	50	55	100	41	1	2	2	1	2	2	4	3	4	4	4
62120600 PEMATANG KARAU	6212060002 KETAB	100	50	55	97	41	1	2	2	1	2	1	4	3	4	4	4
62120600 PEMATANG KARAU	6212060003 KUPANG BERSIH	78	50	42	96	26	1	2	2	1	1	1	4	3	3	3	4
62120600 PEMATANG KARAU	6212060004 TUYAU	90	49	45	100	45	1	2	2	2	2	1	4	3	4	3	4
62120600 PEMATANG KARAU	6212060005 PINANG TUNGGAL	95	49	25	93	34	2	2	3	1	1	1	4	2	3	3	3
62120600 PEMATANG KARAU	6212060006 NAGALEAH	100	45	25	96	31	1	2	2	2	1	1	3	2	3	3	3
62120600 PEMATANG KARAU	6212060007 LAMPEONG	70	49	52	93	41	2	2	3	2	1	1	3	2	3	4	3
62120600 PEMATANG KARAU	6212060008 BARARAWA	95	45	61	98	39	2	2	4	2	1	1	3	2	3	3	3
62120600 PEMATANG KARAU	6212060009 BAMBULUNG	80	45	61	88	39	2	2	4	2	1	1	3	2	4	3	3
62120600 PEMATANG KARAU	6212060010 LEBU	95	49	35	98	34	2	2	3	1	1	1	2	2	3	3	3
62120600 PEMATANG KARAU	6212060011 TUMPUNG ULUNG	95	49	25	98	34	1	2	4	1	1	1	2	2	3	3	3
62120600 PEMATANG KARAU	6212060012 MURUDUYUNG	80	45	25	78	31	2	2	3	1	1	1	2	2	3	3	3
62120600 PEMATANG KARAU	6212060013 SUMBEREJO	3	68	23	78	20	2	2	2	1	2	1	2	2	3	3	3

1	3	1	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
1	3	1	2,0	1,0	1,0	2,0	3,0	1,0
1	3	3	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0
1	3	1	3,0	4,0	3,0	3,0	2,0	3,0
1	3	1	4,0	1,0	4,0	3,0	2,0	4,0
1	3	1	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
1	3	2	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0
1	3	1	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
1	3	1	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
2	3	1	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	2	2	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
1	3	2	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	2	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
1	3	1	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0
2	3	2	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	2	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0
1	3	1	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	2	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
1	3	2	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	2	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	2	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	1	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
1	3	3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	3	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
1	3	3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	1	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	2	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
1	3	2	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
1	3	1	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
1	3	1	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	1,0
1	3	1	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	1	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
1	3	1	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
1	3	1	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	4	2,0	2,0	3,0	4,0	1,0	3,0
1	3	4	3,0	2,0	3,0	3,0	1,0	3,0
1	3	4	2,0	3,0	4,0	3,0	1,0	4,0
1	3	4	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0
1	3	4	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	4	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	4	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	4	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0
1	3	4	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	4	2,0	2,0	4,0	2,0	1,0	4,0
1	3	4	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1	3	4	2,0	2,0	3,0	2,0	1,0	3,0
1	2	1	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0

# LAMPIRAN 5

HASIL PEMBAHASAN PROGRAM, KEGIATAN  
DAN INDIKASI PENDANAAN

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH  
REKAPITULASI**

Kab. / Kota : BARITO TIMUR  
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH  
Tahun : 2022

Halaman .....dari.....

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	DAK	SWASTA/CSR	MASYARAKAT
						2023	2024	2025	2026	2027													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>A.</b>	<b>SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK</b>																						
	Regulasi dan Kelembagaan Air Limbah Domestik dan Persampahan tuntas 2025																						
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																						
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																						
<b>1</b>	<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>																						
	a. Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Pengelolaan Air Limbah Domestik	Barito Timur	115.057	56.758	Paket	1	1	-	-	-	2	100	100	-	-	-	200	200					
	b. Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Retribusi Air Limbah Domestik	Barito Timur	115.057	56.758	Paket	-	1	1	-	-	2	-	100	100	-	-	200	200					
	c. Penyusunan Regulasi untuk penggunaan Dana Desa/Alokasi Dana Desa dan CSR secara proporsional terhadap Penanganan Air Limbah Domestik	Barito Timur	115.057	56.758	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	100	-	-	100	100					
	d. Pembentukan UPTD Pengelola Air Limbah Domestik	Barito Timur	115.057	56.758	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	600	-	-	600	600					
<b>2</b>	<b>Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik</b>																						
	a. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Air Limbah Domestik	Barito Timur	115.057	56.758	Paket	1	1	1	1	1	5	25	25	25	25	25	125	125					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik dan Persampahan																						
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																						
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																						
<b>1</b>	<b>Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman</b>																						
	a. Penyiapan lahan SPALD-T Skala Permukiman	Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur	10.747	1.276	Lokasi	-	1	-	-	-	1	-	200	-	-	-	200	200					
	b. Penyusunan DED SPALDT Skala Permukiman	Barito Timur	115.057	56.758	Dok	-	-	1	-	-	1	-	-	250	-	-	250	250					
	c. Penyusunan Dokumen Lingkungan SPALD-T Skala Permukiman	Barito Timur	115.057	56.758	Dok	-	-	1	-	-	1	-	-	100	-	-	100	100					
	d. Sosialisasi pembangunan SPALD-T Skala Permukiman	Barito Timur	115.057	56.758	Keg	-	-	1	-	-	1	-	-	25	-	-	25	25					
	e. Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman	Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur	10.747	1.276	Unit	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4.500	-	4.500		4.500				
	f. Monitoring dan Evaluasi SPALDT	Barito Timur	115.057	56.758	Paket	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	10	10	10					
<b>2</b>	<b>Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala</b>																						
	a. Sosialisasi Peningkatan SPALD-T Skala Permukiman	Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur	10.747	1.276	Keg	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	25	25					
	b. Peningkatan Sambungan Rumah IPAL Skala Permukiman Pondok Karet	Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur	10.747	1.276	SR	10	10	10	10	10	50	100	100	100	100	100	500	500					









d. Sosialisasi ODF tingkat Desa	40 Desa	66.150	2.250	Keg	10	10	10	10	-	40	75	75	75	75	-	300	150	-	-	150	-
e. Verifikasi Desa/Kelurahan Basno/ODF	82 Desa	142.300	4.800	Keg	20	20	20	20	2	82	50	50	50	50	5	205	105	-	-	100	-
f. Deklarasi Basno/ODF	9 Kecamatan dan 1 Kabupaten	113.229	3.834	Keg	2	3	2	2	1	10	30	45	30	30	75	210	100	-	-	75	35
g. Monitoring dan Evaluasi Pemicuan STBM	Ds. magantis, Ds. Telang Baru, Ds. Didi, Ds. Juru Banu, Ds. Tampu Langit, Ds. Kalinapu, Ds. Tangkan, Ds. Hayaping, Ds. Biwan, Ds. Apar Batu, Ds. Pianggu, Ds. Danau, Ds. Janah Mansiwui, Ds. Kotam, Ds. Mawani, Ds. Jango, Ds. Lalap, Ds. Putai, Kel. Ampah Kota, Ds. Nentampin, Ds. Sbr. Garunggung, Ds. Muara Awang, Ds. Puri, Ds. Malintut, Ds. Tamba, Ds. Patung, Ds. Kalamus, Ds. Bantai Napu, Ds. Pangkan, Ds. Gandrung, Ds. Paku Beto, Ds. Dayu, Ds. Muara Plantau, Ds. Ketab, Ds. Kupang Bersih, Ds. Tuyau, Ds. Lampeong, Ds. Bararawa, Ds. Bambulung, Ds. Lebo	66.150	2.250	Keg	10	10	10	10	-	40	25	25	25	25	-	100	75	-	-	25	-
h. Pendampingan Pasca Pemicuan STBM	Ds. magantis, Ds. Telang Baru, Ds. Didi, Ds. Juru Banu, Ds. Tampu Langit, Ds. Kalinapu, Ds. Tangkan, Ds. Hayaping, Ds. Biwan, Ds. Apar Batu, Ds. Pianggu, Ds. Danau, Ds. Janah Mansiwui, Ds. Kotam, Ds. Mawani, Ds. Jango, Ds. Lalap, Ds. Putai, Kel. Ampah Kota, Ds. Nentampin, Ds. Sbr. Garunggung, Ds. Muara Awang, Ds. Puri, Ds. Malintut, Ds. Tamba, Ds. Patung, Ds. Kalamus, Ds. Bantai Napu, Ds. Pangkan, Ds. Gandrung, Ds. Paku Beto, Ds. Dayu, Ds. Muara Plantau, Ds. Ketab, Ds. Kupang Bersih, Ds. Tuyau, Ds. Lampeong, Ds. Bararawa, Ds. Bambulung, Ds. Lebo	66.150	2.250	Keg	10	10	10	10	-	40	25	25	25	25	-	100	75	-	-	25	-



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH  
SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI**

Kabupaten / Kota : BARITO TIMUR  
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH  
Tahun : 2022

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Provinsi					Jumlah
							2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.		SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																
	1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																
	1.03.05.1.02	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>																
	1.03.05.1.02.06	<b>Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat</b>																
		a. Pembangunan Tangki Septik Individual	Kalinapu, Muara Palantau,	6.250	31.250	Unit	-	-	-	250	250	500	-	-	-	1.750	1.750	3.500
		b. Pembangunan Tangki Septik skala komunal	Kalinapu, Muara Palantau,	3.125	15.625	Unit	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	1.750	1.750
		<b>Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah</b>											-	-	-	1.750	3.500	5.250
B.		PENGOLAHAN SAMPAH																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan</b>																
C.		SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB</b>																
<b>Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD Provinsi</b>													-	-	-	1.750	3.500	5.250

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH  
SUMBER PENDANAAN APBN

Kabupaten / Kota : (nama kab./kota)  
Provinsi : (nama provinsi)  
Tahun : 2022

Halaman .....dari.....

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Jumlah Total	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBN							
							2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>A</b>		<b>SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK</b>																		
		<b>Regulasi dan Kelembagaan Air Limbah Domestik dan Persampahan tuntas 2025</b>																		
	1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																		
	1.03.05.1.02	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																		
	1.03.05.1.02.01	<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>																		
		a. Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman				Unit	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4.500	-	4.500	SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALTENG	PUPRPERKIM KAB. BARITO TIMUR
		<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik dan Persampahan</b>																		
	1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																		
	1.03.05.1.02	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik</b>																		
	1.03.05.1.02.15	<b>Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT</b>																		
		a. Pembangunan IPLT Kabupaten Barito Timur	Desa Murutuwu (Kec. Paju Epat) dan Desa Lenggang (Kec. Raren Batuah)	2409	8112	Unit	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5.000	-	5.000	SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALTENG	PUPRPERKIM KAB. BARITO TIMUR
		<b>BABS 0% tahun 2024</b>																		
	1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																		
	1.03.05.1.02	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik</b>																		
		<b>Intervensi Teknologi Tepat Guna (TTG) Sanitasi pada Lokus Spesifik</b>																		
		a. Swakelola Teknologi Tepat Guna (TTG) Sanitasi di kawasan pinggir sungai, rawa, dan daerah pasang surut	Kec Pematang Karau, Paju Epat, Dusun Tengah.	7.400	1.614	Paket	400	400	400	400	235	1.835	1.200	1.200	1.200	1.200	705	5.505	DPUPRPERKIM, DINKES	DPUPRPERKIM
		<b>Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah</b>											1.200	1.200	1.200	10.700	705	15.005		

B. PENGOLAHAN SAMPAH																			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik dan Persampahan																			
12.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN																			
12.11.11.2.01 Kegiatan Pengelolaan Persampahan																			
12.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																			
	a. Pembangunan TPA Sanitary Landfill	Desa Wuran Kec. Karusen Janang	115.057	56757,76	Unit	-	1	-	-	-	1	-	20.000	-	-	-	20.000	SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALTENG	DLH KAB. BARITO TIMUR
	b. Pembangunan TPST	Kel. Tamiang Layang	26.037	12844	Unit	-	1	-	-	-	1	-	800	-	-	-	800	SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALTENG	DLH KAB. BARITO TIMUR
	c. Pembangunan TPS 3R	Kec. Dusun Tengah	11.137	5494	Unit	-	1	1	1	2	10	-	800	800	800	1.600	4.000	SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALTENG	DLH KAB. BARITO TIMUR
	d. Pembangunan Bank Sampah	Kec. Dusun Tengah	11.137	5494	Unit	-	1	-	-	-	1	-	1.200	-	-	-	1.200	KLHK	DLH KAB. BARITO TIMUR
	12.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota																		
	a. Pengadaan Excavator	Kel. Tamiang Layang	115.057	56.758	Unit	-	1	-	-	-	1	-	1.200	-	-	-	1.200	KEMENTERIAN PUPR	DLH KAB. BARITO TIMUR
	b. Pengadaan Bulldozer	Kel. Tamiang Layang	115.057	56.758	Unit	-	1	-	-	-	1	-	2.000	-	-	-	2.000	KEMENTERIAN PUPR	DLH KAB. BARITO TIMUR
	c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA (Jembatan Timbang, Bengkel, Tempat Cuci Alat Berat, dll)	Kec. Karusen Janang	115.057	56.758	Paket	-	1	-	-	-	1	-	20.000	-	-	-	20.000	SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALTENG	DLH KAB. BARITO TIMUR
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan													0	46.000	800	800	1.600	49.200	
C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB													0	0	0	0	0	0	
Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBN												1.200	47.200	2.000	11.500	2.305	64.205		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH  
SUMBER PENDANAAN DAK

Kabupaten / Kota : BARITO TIMUR  
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH  
Tahun : 2022

Halaman .....dari.....

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN						Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Jumlah Total	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBN							
							2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026				2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.		SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																		
-		1000 Tangki Septik Individual Tuntas 2027																		
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR																		
	1.03.05.1.02	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																		
	1.03.05.1.02.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat																		
		a. Pembangunan Tangki Septik Individual	Kalinapu, Muara Palantau, Magantis, Telang Baru, Juru Banu, Tampu Langit, Putai, Ampah Kota, Muara Awang, Ketab, Kupang Bersih, Tuyau, Bararawa, Bambulung, Taniran, Kandris,	6.250	31.250	Unit	-	-	250	-	-	250	-	-	1.750	-	-	1.750	SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALTENG	PUPRPERKIM KAB. BARITO TIMUR
		b. Pembangunan Tangki Septik skala komunal	Kalinapu, Muara Palantau, Magantis, Telang Baru, Juru Banu, Tampu Langit, Putai, Ampah Kota, Muara Awang, Ketab, Kupang Bersih, Tuyau, Bararawa, Bambulung, Taniran, Kandris, Bagok, Tewah Pupuh, Gudang	3.125	15.625	Unit	-	25	25	-	-	50	-	1.750	1.750	-	-	3.500	SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALTENG	PUPRPERKIM KAB. BARITO TIMUR
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											-	1.750	3.500	-	-	5.250		
B.		PENGOLAHAN SAMPAH																		
	12.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN																		
	12.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Persampahan																		
	12.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
		a. Pembangunan TPS 3R	Kec. Dusun Tengah	11.137	5.494	Unit	1	1	1	1	1	10	800	800	800	800	800	4.000	SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALTENG	PUPRPERKIM KAB. BARITO TIMUR
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											800	800	800	800	800	4.000		
C.		SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																		
-																				
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB																		
Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBN													800	2.550	4.300	800	800	9.250		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH  
SUMBER PENDANAAN SWASTA / CSR

Kabupa : BARITO TIMUR  
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH  
Tahun : 2022

Halaman .....dari.....

NOMOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR							Sumber Pembiayaan dari CS/Swasta (juta rupiah)					Nama Swasta / CSR	KSM/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	CSR							
						2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027			Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik dan Persampahan																		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																		
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																		
	a. Pengadaan Truk Penyedot Tinja	Barito Timur	115.057	56.758	Unit	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	700	700		
	<b>BABS 0% tahun 2024</b>																		
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																		
A	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
	Intervensi Teknologi Tepat Guna (TTG) Sanitasi pada Lokus Spesifik																		
	a. Swakelola Teknologi Tepat Guna (TTG) Sanitasi di kawasan pinggiran sungai, rawa, dan daerah pasang surut	Kec Pematang Karau, Paju Epat, Dusun Tengah.	7.400	1.614	Paket	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	15	15		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											-	-	-	-	715	715		
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																		
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik dan Persampahan																		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN</b>																		
	Kegiatan Pengelolaan Persampahan																		
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota																		
	a. Pengadaan Motor sampah	Kel. Tamiang Layang	115.057	56.758	Unit	-	-	2	5	2	9	-	-	92,8	232	93	417,6		
	b. Pengadaan Truk Sampah	Kel. Tamiang Layang	115.057	56.758	Unit	-	-	1	2	2	5	-	-	409	819	819	2.047		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											-	-	502	1.051	912	2.465		
C.	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																		
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>																		
	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabupaten/Kota																		
	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat																		
	a. Pendampingan Pemicuan STBM	Ds. magantis, Ds. Telang	66.150	2.250	Keg	-	-	10	10	-	20	-	-	75	75	-	150		
	b. Sosialisasi ODF tingkat Desa	40 Desa	66.150	2.250	Keg	-	-	10	10	-	20	-	-	75	75	-	150		
	c. Verifikasi Desa/Kelurahan Basno/ODF	82 Desa	142.300	4.800	Keg	-	-	20	20	-	40	-	-	50	50	-	100		
	d. Deklarasi Basno/ODF	9 Kecamatan dan 1 Kabupaten	113.229	3.834	Keg	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	75	75		

e. Monitoring dan Evaluasi Pemicuan STBM	Ds.magantis, Ds. Telang Baru, Ds. Didi, Ds. Juru Banu, Ds. Tampu Langit, Ds. Kalinapu, Ds. Tangkan, Ds. Hayaping, Ds. Biwan, Ds. Apar Batu, Ds. Piangu, Ds. Danau, Ds. Janah Mansiwui, Ds. Kotam, Ds. Mawani, Ds. Jango, Ds. Lalap, Ds. Putai, Kel. Ampah Kota, Ds. Nentampin, Ds. Sbr. Garunggung, Ds. Muara Awang, Ds. Puri, Ds. Malintut, Ds. Tampa, Ds. Patung, Ds. Kalamus, Ds. Bantai Napu,	66.150	2.250	Keg	-	-	-	10	-	10	-	-	-	25	-	25
f. Pendampingan Pasca Pemicuan STBM	Ds.magantis, Ds. Telang Baru, Ds. Didi, Ds. Juru Banu, Ds. Tampu Langit, Ds. Kalinapu, Ds. Tangkan, Ds. Hayaping, Ds. Biwan, Ds. Apar Batu, Ds. Piangu, Ds. Danau, Ds. Janah Mansiwui, Ds. Kotam, Ds. Mawani, Ds. Jango, Ds. Lalap, Ds. Putai, Kel. Ampah Kota, Ds. Nentampin, Ds. Sbr. Garunggung, Ds. Muara Awang, Ds. Puri, Ds. Malintut, Ds. Tampa, Ds. Patung, Ds. Kalamus, Ds. Bantai Napu,	66.150	2.250	Keg	-	-	-	10	-	10	-	-	-	25	-	25
<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas</b>																
a. Pengelolaan kesling ( Pemicuan Desa STBM)	82 desa	142.300	4.800	Keg	-	-	20	20	-	40	-	-	50	50	-	100
<b>Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan</b>													250	300	75	625
<b>Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber Swasta / CSR</b>											-	-	752	1.351	1.702	3.805

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH SUMBER PENDANAAN MASYARAKAT

Kabupaten : BARITO TIMUR  
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH  
Tahun : 2022

Halaman .....dari.....

NOMOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Masyarakat							Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)						Nama Masya- rakat/KSM Penanggungjawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	Masyarakat					Jumlah		
						2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																		
	1000 Tangki Septik Individual Tuntas 2027																		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																		
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat																		
	a. Penyiapan lahan SPALD-S skala Individual	Kalinapu, Muara	6.250	31.250	Lokasi	5	5	5	5	5	25	25	25	25	25	25	125		
	b. Penyiapan lahan SPALD-S skala komunal	Kalinapu, Muara	3.125	15.625	Lokasi		5	5	5	5	20	25	25	25	25	25	125		
	<b>BABS 0% tahun 2024</b>																		
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																		
A	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
	Intervensi Teknologi Tepat Guna (TTG) Sanitasi pada Lokus Spesifik																		
	a. Swakelola Teknologi Tepat Guna (TTG) Sanitasi	Kec Pematang	7.400	1.614	Paket	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	15	15		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											50	50	50	50	65	265		
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											0	0	0	0	0	0		
C.	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																		
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>																		
	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif																		
	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat																		
	a. Deklarasi Basno/ODF	9 Kecamatan dan	113.229	3.834	Keg	-	-	1	2	-	3	-	-	5	30	-	35		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB											0	0	5	30	0	35		
	<b>Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber PARTISIPASI MASYARAKAT</b>											-	50	50	55	80	65	300	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH  
SUMBER PENDANAAN APBD KAB./KOTA

Kabupaten / Kota : BARITO TIMUR  
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH  
Tahun : 2022

Halaman .....dari.....

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan	Perangkat Daerah/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi		
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Kab./Kota							Jumlah	
							2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>A. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK</b>																					
<b>Regulasi dan Kelembagaan Air Limbah Domestik dan Persampahan tuntas 2025</b>																					
1.03.05		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																			
1.03.05.1.02		<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																			
1.03.05.1.02.01		<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>																			
		a. Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Pengelolaan Air Limbah Domestik	Barito Timur	115.057	56.758	Paket	1	1	-	-	-	2	100	100	-	-	-	200	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM	
		b. Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Retribusi Air Limbah Domestik	Barito Timur	115.057	56.758	Paket	-	1	1	-	-	2	-	100	100	-	-	200	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM	
		c. Penyusunan Regulasi untuk penggunaan Dana Desa/Alokasi Dana Desa dan CSR	Barito Timur	115.057	56.758	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM	
		d. Pembentukan UPTD Pengelola Air Limbah Domestik	Barito Timur	115.057	56.758	Paket	-	-	-	1	-	1	-	-	-	600	-	-	600	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM
1.03.05.1.02.09		<b>Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik</b>																			
		a. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Air Limbah Domestik	Barito Timur	115.057	56.758	Paket	1	1	1	1	1	5	25	25	25	25	25	125	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM	
<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik dan Persampahan</b>																					
1.03.05		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																			
1.03.05.1.02		<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																			
1.03.05.1.02.12		<b>Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman</b>																			
		a. Penyiapan lahan SPALD-T Skala Permukiman	Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur	10.747	1.276	Lokasi	-	1	-	-	-	1	-	200	-	-	-	200	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM	
		b. Penyusunan DED SPALDT Skala Permukiman	Barito Timur	115.057	56.758	Dok	-	-	1	-	-	1	-	-	250	-	-	250	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM	
		c. Penyusunan Dokumen Lingkungan SPALD-T Skala Permukiman	Barito Timur	115.057	56.758	Dok	-	-	1	-	-	1	-	-	100	-	-	100	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM	
		d. Sosialisasi pembangunan SPALD-T Skala Permukiman	Barito Timur	115.057	56.758	Keg	-	-	1	-	-	1	-	-	25	-	-	25	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM	
		e. Monitoring dan Evaluasi SPALDT	Barito Timur	115.057	56.758	Paket	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	10	10	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM	
1.03.05.1.02.05		<b>Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman</b>																			
		a. Sosialisasi Peningkatan SPALD-T Skala Permukiman	Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur	10.747	1.276	Keg	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	25	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM	
		b. Peningkatan Sambungan Rumah IPAL Skala Permukiman Pondok Karet	Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur	10.747	1.276	SR	10	10	10	10	10	50	100	100	100	100	100	500	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM	

1.03.05.1.02.15	<b>Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT</b>																		
	a. Penyiapan Lahan IPLT Kabupaten Barito Timur	Desa Murutuwu (Kec. Paju Epat) dan Desa Lenggang (Kec. Raren Batuah)	2.409	8.112	Lokasi	-	1	1	-	-	2	-	200	200	-	-	400	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM
	b. Penyiapan Dokumen Lingkungan IPLT Kabupaten Barito Timur	Desa Murutuwu (Kec. Paju Epat) dan Desa Lenggang (Kec. Raren Batuah)	2.409	8.112	Dok	-	-	1	-	-	1	-	-	100	-	-	100	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM
	c. Penyusunan DED IPLT Kabupaten Barito Timur	Desa Murutuwu (Kec. Paju Epat) dan Desa Lenggang (Kec. Raren Batuah)	2.409	8.112	Dok	-	-	1	-	-	1	-	-	500	-	-	500	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM
	d. Sosialisasi Pembangunan IPLT Kabupaten Barito Timur	Desa Murutuwu (Kec. Paju Epat) dan Desa Lenggang (Kec. Raren Batuah)	2.409	8.112	Keg	-	-	1	-	-	1	-	-	25	-	-	25	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM
	e. Monitoring dan Evaluasi IPLT Kabupaten Barito Timur	Desa Murutuwu (Kec. Paju Epat) dan Desa Lenggang (Kec. Raren Batuah)	2.409	8.112	Keg	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	15	15	DPUPRPERKIM	DPUPRPERKIM
12.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN</b>																		
12.11.11.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Persampahan</b>																		
12.11.11.2.01.07	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</b>																		
	a. Pembersihan lahan lokasi pembangunan TPA	Desa Wuran Kec. Karusen Janang	115.057	56.758	Paket	-	1	-	-	-	1	-	200	-	-	-	200		
	b. Penyediaan Akses Listrik, Air dan Jalan lokasi Pembangunan TPA	Desa Wuran Kec. Karusen Janang	115.057	56.758	Paket	-	1	-	-	-	1	-	1.500	-	-	-	1.500		
1.03.05	<b>BABS 0% tahun 2024</b>																		
1.03.05.1.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																		
1.03.05.1.02	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Intervensi Teknologi Tepat Guna (TTG) Sanitasi pada Lokus Spesifik</b>																		
	a. Swakelola Teknologi Tepat Guna (TTG) Sanitasi di kawasan pinggir sungai, rawa, dan daerah pasang surut	Kec Pematang Karau, Paju Epat, Dusun Tengah.	7.400	1.614	Paket	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	15	15		

1000 Tangki Septik Individual Tuntas 2027																	
1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																
1.03.05.1.02	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.03.05.1.02.06	<b>Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat</b>																
	a. Penyusunan DED SPALD-S skala Individual dan komunal	Kalinapu, Muara	9.375	46.875	Dok	5	10	10	10	10	40	100	200	200	200	200	900
	b. Sosialisasi pembangunan SPALDS skala individu dan komunal	Kalinapu, Muara	9.375	46.875	Keg	1	1	1	1	1	4	10	10	10	10	10	50
	c. Pembangunan Tangki Septik Individual	Kalinapu, Muara	6.250	31.250	Unit	250	250	-	-	-	250	1.750	1.750	-	-	-	3.500
	d. Pembangunan Tangki Septik skala komunal	Kalinapu, Muara	3.125	15.625	Unit	-	-	-	25	-	25	-	-	-	1.750	-	1.750
	e. Monitoring dan Evaluasi SPALD-S	Barito Timur	115.057	56.758	Keg	1	1	1	1	1	4	10	10	10	10	10	50
	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>																
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
	<b>Pelayanan Informasi Publik</b>																
	a. Publikasi Sektor Sanitasi melalui media	Barito Timur	115.057	56.758	Keg	1	1	1	1	1	5	10	10	10	10	10	50
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>																
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>																
	<b>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>																
	a. Monitoring dan evaluasi kegiatan PPSP	Barito Timur	115.057	56.758	Keg	2	2	2	2	2	10	15	15	15	15	15	75
	b. Pemutakhiran dokumen SSK	Barito Timur	115.057	56.758	Dok	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	55	55
<b>Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah</b>												2.125	4.425	2.375	2.125	470	11.520

B. PENGOLAHAN SAMPAH																			
<b>Regulasi dan Kelembagaan Air Limbah Domestik dan Persampahan tuntas 2025</b>																			
12.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN</b>																		
12.11.11.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Persampahan</b>																		
12.11.11.2.01.01	<b>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengolahan Sampah Kabupaten/ Kota</b>																		
	a. Penyusunan Regulasi untuk penggunaan Dana Desa/Alokasi Dana Desa dan CSR	Tamiang Layang	115.057	56.758	Paket	-	1	1	1	1	4	-	50	50	50	50	200		
	b. Pembentukan UPTD Persampahan	Kec. Karusen Janang	115.057	56.758	Paket	2	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-	100		
	c. Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Persampahan	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	115.057	56.758	Keg	-	1	-	1	-	2	-	50	-	50	-	100		
	d. Peningkatan Kapasitas UPTD	Kec. Dusun Timur dan Kec. Dusun Tengah	115.057	56.758	Keg	-	1	1	1	1	4	-	100	100	100	100	400		
	e. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tamiang Layang	115.057	56.758	Keg	-	2	2	2	2	8	-	50	50	50	50	200		
<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik dan Persampahan</b>																			
12.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN</b>																		
12.11.11.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Persampahan</b>																		
12.11.11.2.01.07	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</b>																		
	a. Penyiapan Lahan TPA Sanitary Landfill	Desa Wuran Kec. Karusen Janang	115.057	56.758	Lokasi	1	-	-	-	-	1	800	-	-	-	-	800		
	b. Penyiapan Lahan TPST	Kel. Tamiang Layang	115.057	56.758	Lokasi	1					1	200					200		
	c. Penyiapan Lahan TPS 3R	Kec. Dusun Tengah	115.057	56.758	Lokasi	1	2	2	2	3	10	200	400	400	400	600	2.000		
	d. Penyusunan Dokumen Lingkungan TPST	Kec. Dusun Tengah	115.057	56.758	Dok	-	1	-	-	-	1	-	600	-	-	-	600		
	e. Penyusunan DED TPST	Kel. Tamiang Layang	115.057	56.758	Paket	-	1	-	-	-	1	-	300	-	-	-	300		
	f. Penyusunan DED TPS 3R	Kel. Tamiang Layang	115.057	56.758	Paket	-	1	-	-	-	1	-	300	-	-	-	300		
	g. Sosialisasi Pembangunan TPA Sanitary Landfill	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	115.057	56.758	Keg	-	2	-	-	-	2	-	40	-	-	-	40		
	h. Sosialisasi Pembangunan TPST	Kel. Tamiang Layang	26.037	12.844	Keg	-	2	-	-	-	2	-	40	-	-	-	40		
	i. Sosialisasi Pembangunan TPS 3R/Bank Sampah	Kec. Dusun Tengah	115.057	56.758	Keg	-	2	-	-	-	2	-	40	-	-	-	40		
	j. Pembangunan Tempat Penitipan Sampah	Kec. Dusun Tengah	11.137	5.494	Paket	-	1	-	-	-	1	-	150	-	-	-	150		
	k. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Persampahan	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	115.057	56.758	Keg	-	1	-	-	-	1	-	50	-	-	-	50		
12.11.11.2.01.07	<b>Supervisi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</b>																		
	a. Supervisi Pembangunan TPA Sanitary Landfill	Desa Wuran Kec. Karusen Janang	115.057	56.758	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100		
	b. Supervisi Pembangunan TPST	Desa Wuran Kec. Karusen Janang	5.338	2.633	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100		
12.11.11.2.01.03	<b>Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota</b>																		
	a. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Kab. Barito Timur	115.057	56.758	Unit	-	2	2	2	2	8	-	15	15	15	15	60		
	b. Pengadaan Tong Sampah	Banyu Landas, Jaar, Tamiang Layang, Saing	115.057	56.758	Unit	-	10	10	10	10	40	-	5	5	5	5	20		
	c. Pengadaan kontainer sampah	Kel. Tamiang Layang	115.057	56.758	Unit	-	5	5	5	5	20		45	45	45	45	180		
	d. Pengadaan Motor sampah	Kel. Tamiang Layang	115.057	56.758	Unit	5	5	3	-	-	13	232	232	139,2	-	-	603,2		
	e. Pengadaan Truk Sampah	Kel. Tamiang Layang	115.057	56.758	Unit	3	3	1	-	-	8	1.228	1.228	409	-	-	2.886		

12.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota																			
	a. Pemeliharaan Berkala TPA	Kec. Karusen Janang	115.057	56.758	Keg	-	-	1	1	1	3	-	-	200	200	200	200	600		
	b. Belanja Penggantian Spare Part/ Suku Cadang Alat Berat	Kec. Karusen Janang	115.057	56.758	Paket	-	1	1	1	1	4	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		
	c. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	Kec. Karusen Janang	115.057	56.758	Paket	-	1	1	1	1	4	-	800	800	800	800	800	3.200		
	d. Pemeliharaan Periodik Alat Berat	Kec. Karusen Janang	115.057	56.758	Keg	-	4	4	4	4	16	-	200	200	200	200	200	800		
	e. Fasilitas Composting	Kec. Karusen Janang	115.057	56.758	Paket	-	1	-	-	-	1	-	200	-	-	-	-	200		
	f. Tanah Urug Penutup Sampah	Kec. Karusen Janang	115.057	56.758	m3	-	7.200	7.200	7.200	7.200	28.800	-	432	432	432	432	432	1.728		
12.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengolahan Sampah Kabupaten/ Kota																			
	a. Review Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan	Kel. Tamiang Layang	115.057	56.758	Dok	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	-	100		
<b>JEJAL KOTA (Jemput Sampah Tertinggal Perkotaan)</b>																				
12.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN</b>																			
12.11.11.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Persampahan</b>																			
12.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota																			
	a. Program Jemput Sampah Tertinggal di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah wilayah Perkotaan	dari jumlah 19 titik TPS, 7 titik TPS diantaranya (TPS Pasar, sepanjang 2 km ruas jalan protokol Jl. A. Yani, TPS. Jalan Pramuka, TPS Jl. Magantis, TPS Jl. 45)	26.037	12.844	Keg	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	200		
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan												2.761	6.627	3.846	3.347	3.497	20.297			

C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																		
<b>BABS 0% tahun 2024</b>																		
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>																	
1.02.05.2.02	<b>Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah</b>																	
1.02.05.2.02.01	<b>Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat</b>																	
	a. Sosialisasi dan Advokasi Percepatan Pemucuan STBM Tingkat Kabupaten	Kabupaten, Kec. Dusun Timur, Pematang Karau, Dusun Tengah, Karusen Janang, Paju Epat	66.150	2.250	Keg	1	2	2	1	-	6	30	20	20	10	-	80	
	b. Jejaring Kemitraan percepatan Desa STBM	Kabupaten, Kec. Dusun Timur, Pematang Karau, Dusun Tengah, Karusen Janang, Paju Epat.	66.150	2.250	Keg	1	2	2	1	-	6	30	20	20	10	-	80	
	c. Pendampingan Pemucuan STBM	Ds. magantis, Ds. Telang Baru, Ds. Didi, Ds. Juru Banu, Ds. Tampu Langit, Ds. Kalinapu, Ds. Tangkan, Ds. Hayaping, Ds. Biwan, Ds. Apar Batu, Ds. Pianggu, Ds. Danau, Ds. Janah Mansiwui, Ds. Kotam, Ds. Mawani, Ds. Jango, Ds. Lalap, Ds. Putai, Kel. Ampah Kota, Ds. Nentampin, Ds. Sbr. Garunggung, Ds. Muara Awang, Ds. Puri, Ds. Malintut, Ds. Tamba, Ds. Patung, Ds. Kalamus, Ds. Bantai Napu, Ds. Pangkan, Ds. Gandrung, Ds. Paku Beto, Ds. Dayu, Ds. Muara Plantau, Ds. Ketab, Ds. Kupang Bersih, Ds. Tuyau, Ds. Lampeong, Ds. Bararawa, Ds. Bambulung, Ds.	66.150	2.250	Keg	10	10	-	-	-	20	75	75	-	-	-	150	

	d. Sosialisasi ODF tingkat Desa	40 Desa	66.150	2.250	Keg	10	10	-	-	-	20	75	75	-	-	-	150
	e. Verifikasi Desa/Kelurahan Basno/ODF	82 Desa	142.300	4.800	Keg	20	20	-	-	2	42	50	50	-	-	5	105
	f. Deklarasi Basno/ODF	9 Kecamatan dan 1	113.229	3.834	Keg	2	3	2	-	-	7	30	45	25	-	-	100
	g. Monitoring dan Evaluasi Pemicuan STBM	Ds.magantis, Ds. Telang Baru, Ds. Didi, Ds. Juru Banu, Ds. Tampu Langit, Ds. Kalinapu, Ds. Tangkan, Ds. Hayaping, Ds. Biwan, Ds. Apar Batu, Ds. Pianggu, Ds. Danau, Ds. Janah Mansiwui, Ds. Kotam, Ds. Mawani, Ds. Jango, Ds. Lalap, Ds. Putai, Kel. Ampah Kota, Ds. Nentampin, Ds. Sbr. Garunggung, Ds. Muara Awang, Ds. Puri, Ds. Malintut, Ds. Tampa, Ds. Patung, Ds. Kalamus, Ds. Bantai Napu, Ds. Pangkan, Ds. Gandrung, Ds. Paku Beto, Ds. Dayu, Ds. Muara Plantau, Ds. Ketab, Ds. Kupang Bersih, Ds. Tuyau, Ds. Lampeong, Ds. Bararawa, Ds. Bambulung, Ds.	66.150	2.250	Keg	10	10	10	-	-	30	25	25	25	-	-	75
	h. Pendampingan Pasca Pemicuan STBM	Ds.magantis, Ds. Telang Baru, Ds. Didi, Ds. Juru Banu, Ds. Tampu Langit, Ds. Kalinapu, Ds. Tangkan, Ds. Hayaping, Ds. Biwan, Ds. Apar Batu, Ds. Pianggu, Ds. Danau, Ds. Janah Mansiwui, Ds. Kotam, Ds. Mawani, Ds. Jango, Ds. Lalap, Ds. Putai, Kel. Ampah Kota, Ds. Nentampin, Ds. Sbr. Garunggung, Ds. Muara Awang, Ds. Puri, Ds. Malintut, Ds. Tampa, Ds. Patung, Ds. Kalamus, Ds. Bantai Napu, Ds. Pangkan, Ds. Gandrung, Ds. Paku Beto, Ds. Dayu, Ds. Muara Plantau, Ds. Ketab, Ds. Kupang Bersih, Ds. Tuyau, Ds. Lampeong, Ds. Bararawa, Ds. Bambulung, Ds.	66.150	2.250	Keg	10	10	10	-	-	30	25	25	25	-	-	75

	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</b>																		
	a. Review Studi EHRA	Barito Timur	115.057	56.758	Dok	-	1	-	-	-	1	-	500	-	-	-	500		
	b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPSP	Barito Timur	115.057	56.758	Keg	1	1	1	1	1	5	20	20	20	20	20	100		
	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas</b>																		
	a. Pengelolaan kesling ( Pemicuan Desa STBM)	82 desa	142.300	4.800	Keg	20	20	-	-	2	42	50	50	-	-	5	105		
	<b>Intervensi Teknologi Tepat Guna (TTG) Sanitasi pada Lokus Spesifik</b>																		
	a. Sosialisasi dan Advokasi penentuan Teknologi Tepat Guna Sanitasi khususnya pinggir sungai, rawa, dan daerah pasang surut	Skala Kabupaten Barito Timur, Kec Pemaang Karau, Paju Epat, Dusun Tengah.	7.400	1.614	Keg	1	2	1	-	-	4	30	20	20	-	-	70		
	<b>Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB</b>											440	925	155	40	30	1.590		
	<b>Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD KABUPATEN / KOTA</b>											<b>5.326</b>	<b>11.977</b>	<b>6.376</b>	<b>5.512</b>	<b>3.997</b>	<b>33.407</b>		

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH  
DAFTAR TUNGGU (YANG BELUM ADA SUMBER PENDANAAN)**

Kabupat : BARITO TIMUR  
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH  
Tahun : 2022

Halaman .....dari.....

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume							Indikasi Biaya (juta rupiah)					Indikasi Sumber Pendanaan Potensial	Ketersediaan Proposal / Project Digest	Pengelola Paska Konstruksi	
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	Daftar Tunggu								
						2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027				Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah																			
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan																			
C.	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB																			
	Total Kebutuhan Pembiayaan / Pendanaan YANG BELUM ADA SUMBER PENDANAAN											-	-	-	-	-	-			